



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR **11** TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun pertama dan tahun kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 perlu dilakukan penyelarasan terhadap prioritas, sasaran dan strategi pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010–2014;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri E Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2013);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2013);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jateng adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan maupaun yang belum dirubah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun sekali.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7) dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat 3 (tiga), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017 menjadi Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan sampai dengan Tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2018 sebelum disusun dan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang menurut Visi dan Misi Bupati terpilih.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Renstra SKPD Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku dan RKPD tahun berikutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal **30 Desember 2014**

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (305/2014).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Batang pada setiap tahun anggaran.

Berdasar Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan perubahan, apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini (c) terjadi perubahan yang mendasar; dan /atau (d) merugikan kepentingan nasional.

Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013, menunjukkan (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini (c) terjadi perubahan yang mendasar; maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Batang serta menjamin konsistensinya.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD serta melakukan evaluasi RPJMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUPATI BATANG

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a final upward stroke.

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1. Latar Belakang	1.1
	1.2. Landasan Hukum	1.5
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	1.7
	1.4. Sistematika Penulisan	1.9
	1.5. Maksud dan Tujuan	1.11
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II.1
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.23
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II.32
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II.67
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III.1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III.1
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III.19
	3.3. Kerangka Pendanaan	III.28
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV.1
	4.1. Permasalahan Pembangunan	IV.1
	4.2. Isu Strategis	IV.8
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
	5.1. Visi	V.1
	5.2. Misi	V.4
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V.5
	5.4. Pentahapan Pembangunan	V.13
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI.1
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII.1
	7.1. Kebijakan Umum	VII.1
	7.2. Program Pembangunan Daerah	VII.4
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII.1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX.1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X.1
	10.1. Pedoman Transisi	X.1
	10.2. Kaidah Pelaksanaan	X.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan RPJMD	I.9
Gambar 2.1.	Peta Geologi Kabupaten Batang	II.3
Gambar 3.1.	Perkembangan Komponen Pendapatan di Kabupaten Batang selama tujuh tahun terakhir	III.5
Gambar 3.2.	Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Kabupaten Batang selama tiga tahun terakhir	III.11

PERUBAHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Batang	II.17
Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007-2013	II.23
Tabel 2.3. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, dan batang Tahun 2007-2013	II.24
Tabel 2.4. PDRB Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2007-2013	II.24
Tabel 2.5. Angka Kriminalitas Tahun 2007-2013	II.26
Tabel 2.6. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II.26
Tabel 2.7. <i>Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007 -2013</i>	II.27
Tabel 2.8. <i>Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2013</i>	II.30
Tabel 2.9. Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2007 -2013	II.31
Tabel 2.10. <i>Kinerja Makro Urusan Olah-Raga Tahun 2007-2013</i>	II.32
Tabel 2.11. <i>Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007 -2013</i>	II.32
Tabel 2.12. <i>Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007 - 2013</i>	II.35
Tabel 2.13. <i>Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007 -2013</i>	II.39
Tabel 2.14. <i>Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007 -2013</i>	II.40
Tabel 2.15. <i>Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2007 -2013</i>	II.40
Tabel 2.16. <i>Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007 - 2013</i>	II.41
Tabel 2.17. <i>Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007 -2013</i>	II.42
Tabel 2.18. <i>Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2007 -2013</i>	II.44
Tabel 2.19. <i>Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007-2013</i>	II.45
Tabel 2.20. <i>Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2007-2013</i>	II.45
Tabel 2.21. <i>Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2007-2013</i>	II.47
Tabel 2.22. <i>Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2007-2013</i>	II.49
Tabel 2.23. <i>Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2007 -2013</i>	II.51
Tabel 2.24. <i>Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007 -2013</i>	II.51
Tabel 2.25. <i>Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2013</i>	II.52
Tabel 2.26. <i>Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007 -2013</i>	II.53
Tabel 2.27. <i>Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2007 - 2013</i>	II.54

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 2.28. Kinerja Makro Urusan Kep emudaan dan Olahraga Tahun 2007 - 2013	II.54
Tabel 2.29. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2007-2013	II.55
Tabel 2.30. Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2007-2013	II.56
Tabel 2.31. Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007 - 2013	II.56
Tabel 2.32. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2007-2013	II.58
Tabel 2.33. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007 -2013	II.59
Tabel 2.34. Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tah un 2007-2013	II.59
Tabel 2.35. Kinerja Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2007 - 2013	II.60
Tabel 2.36. Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2013	II.61
Tabel 2.37. Kinerja Makro Urusan Pertanian Tahun 2007 -2013	II.61
Tabel 2.38. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007 -2013	II.62
Tabel 2.39. Kinerja Makro Urusan ESDM Tahun 2007 -2013	II.63
Tabel 2.40. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007 -2013	II.63
Tabel 2.41. Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 -2013	II.63
Tabel 2.42. Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2007 -2013	II.64
Tabel 2.43. Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2007 -2013	II.65
Tabel 2.44. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007 -2013	II.67
Tabel 2.45. Aksesibilitas Daerah tahun 2007 - 2013	II.68
Tabel 2.46. Penataan Wilayah Tahun 2007-2013	II.69
Tabel 2.47. Banyaknya Pelanggan Air Bersih dan Jaringan Pipa Kabupaten Batang Tahun 2007-2013	II.70
Tabel 2.48. Banyaknya Pelanggan Listrik, Kwh dan Nilai Disalurkan Kabupaten Batang Tahun 2007-2013	II.71
Tabel 2.49. Fokus Iklim Berinvestasi tahun 2007 - 2013	II.72
Tabel 2.50. Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2007 - 2013	II.72
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013 Kabupaten Batang	III.4
Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Batang	III.8
Tabel 3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Batang	III.10

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.4	Neraca Kabupaten Batang Tahun 2009-2013	III.13
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2009-2013	III.17
Tabel 3.6.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Batang	III.20
Tabel 3.7.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang	III.21
Tabel 3.8.	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang	III.24
Tabel 3.9.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang	III.26
Tabel 3.10.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Batang	III.27
Tabel 3.11.	Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan di Kabupaten Batang	III.30
Tabel 3.12.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang	III.32
Tabel 3.13.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang	III.34
Tabel 3.14.	SKPD dan Program Prioritas	III.36
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017	V.9
Tabel 6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Misi I Kabupaten Batang	VI.2
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Misi II Kabupaten Batang	VI.4
Tabel 6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Misi III Kabupaten Batang	VI.6
Tabel 6.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV Kabupaten Batang	VI.8

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Seperti diketahui, pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Urgensi perencanaan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berkaitan dengan amanat undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 yang ditetapkan melalui Peraturan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Daerah Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 –2017 dimana dokumen tersebut merupakan perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Batang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012 - 2017.

Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang menginjak tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dimana berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan ulang/ perubahan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 282 . Hal ini menjadi landasan hukum dalam melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Dijelaskan berikutnya bahwa Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah (pasal 158), meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Batang tahun 2012 - 2017 hanya meliputi bagian c yaitu evaluasi terhadap hasil. Evaluasi terhadap hasil pada tahun 2013 yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti keuangan, capaian program visi dan misi serta aspek indikator makro. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keuangan tahun 2013 RPJMD Kabupaten Batang baik yang dilihat dari aspek pendapatan, belanja dan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

pembiayaan masih terdapat selisih antara anggaran dengan realisasi dan serapan anggaran yang masih rendah. Tingginya capaian target dan realisasi pada pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan karena penetapan target yang terlalu rendah sehingga mudah untuk dicapai bahkan jauh melebihi target yang telah ditetapkan .

Sementara itu, evaluasi terhadap realisasi capaian program prioritas dalam Misi I-Misi IV, dimana masih terdapat variasi capaian yang masuk dalam kategori sedang dan rendah. Beberapa urusan pada Misi I- Misi IV yang masuk dalam kategori merah dengan capaian sangat rendah seperti urusan Komunikasi dan Informatika; Kesbangpolinmas; Energi dan Sumber Daya Mineral; Penataan Ruang; Kependudukan dan Catatan Sipil;serta Urusan Ketrasmigrasian sehingga diperlukan penyesuaian target akhir tahun RPJMD (2017).

Demikian halnya evaluasi terhadap indikator makro yang dilihat dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing, dimana terdapat beberapa indikator yang masuk dalam kategori hijau, dimana sebelum tahun akhir RPJMD (2017) target tersebut telah tercapai bahkan terlampaui. Hal ini terjadi karena penetapan target indikator yang rendah, sehingga mudah tercapai. Demikian halnya pada indikator yang masuk dalam kategori merah , yang realisasinya masih jauh dari target akhir RPJMD sehingga dibutuhkan usaha keras dalam pencapaiannya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target akhir RPJMD (2017) baik yang sudah tercapai di tahun 2013 maupun yang masih jauh dari target yang sudah ditetapkan.

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri.

Kondisi di Kabupaten Batang yang menjadi pertimbangan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah hasil evaluasi yang telah dilakukan baik pada tahun 2012 dan tahun 2013, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan target terlalu rendah sehingga mudah tercapai, disisi lain terdapat beberapa target yang realisasinya sangat rendah, sehingga demikian diperlukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan diatasnya. Pada sisi lain juga proses perumusan program kegiatan beserta pagu indikatif

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

anggaran pada setiap urusan tidak didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Kondisi perubahan yang mendasar pada Kabupaten Batang yang juga menjadi pertimbangan diperlukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah terjadinya perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Sebelumnya SOTK diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Batang yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang.

Bentuk perubahan mendasar lainnya adalah sangat pesatnya peningkatan atau penurunan pada beberapa realisasi capaian indikator pembangunan daerah, seperti halnya pada indikator pembangunan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB yang hanya memiliki realisasi 4,91 dari target yang ditetapkan 5,99 pada tahun 2013, sementara jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2017 ditetapkan 9,19 artinya capaian target tahun berjalan masih rendah. Demikian halnya pada indikator lainnya seperti Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dimana realisasi pada tahun 2013 sebanyak 295.219 jiwa, dari target yang ditetapkan hanya 21.370 jiwa hal ini berarti jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun akhir 2017 harus mengalami penurunan menjadi 19.974 jiwa.

4. Merugikan kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan nasional adalah apabila bertentangan dengan kebijakan nasional, dalam hal ini kondisi di Kabupaten Batang tidak merugikan kepentingan nasional, namun demikian perlu tetap memperhatikan kondisi kekinian yang terjadi pada level nasional seperti kenaikan harga BBM, target inflasi, upah minimum daerah, untuk disesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

1.2. LANDASAN HUKUM

Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dilandasi beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011–2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–2017.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012–2017**

26. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Provinsi Jawa Tengah 2011-2015;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dimana Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 merupakan kelanjutan pembangunan dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 sehingga penyusunan dan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batang terpilih, berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.

Selain itu, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 -2031 diacu sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Batang tanpa mengesampingkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 juga digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan, sehingga sinergitas pembangunan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Batang dapat terbangun. Demikian halnya dengan sinergitas dokumen perencanaan ditingkat pusat/ nasional, Perubahan RPJMD Kabupaten Batang mengacu dan melihat pada RPJP Nasional 2005-2025 dan juga Rancangan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Teknokratrik RPJMN 2015-2019 hal ini dikarenakan belum terbitnya RPJMN 2015 - 2019.

Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017 pada tahun berjalan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batang.

Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017 akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Batang sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Batang untuk setiap tahunnya, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang pada setiap tahun anggaran.

Selengkapnya, hubungan antar dokumen diilustrasikan pada gambar berikut:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN. Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah kedalam sub-bab meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan kebijakan umum anggaran .

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indicator kinerja setiap misi pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, sebagai arah bagi SKPD dan lembaga terkait dalam merumuskan sasaran strategis guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang upaya pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah secara efektif dan efisien.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih .

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN. Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan .

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN. Bab ini memuat penjelasan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan yang mencakup mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian terhadap target baik anggaran dan indikator pembangunan daerah serta memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Batang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012 -2017 adalah:

- a. Memberikan penyesuaian arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah

P E R U B A H A N

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

pembangunan daerah yang telah disepakati bersama setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017;

- b. Menjadi pedoman penyesuaian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Batang untuk tahun berjalan setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017;
- c. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar “*stakeholders*” dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Batang selama lima tahun mendatang, khususnya pada tahun berjalan setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah Kabupaten Batang selama tahun 2007-2013.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 Ha dengan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) Kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan.

Adapun perincian kecamatan tersebut di antaranya adalah Kecamatan Batang terdiri dari 12 Desa 9 Kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 Desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 Desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 Desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 Desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 Desa; Kecamatan Bawang terdiri dari 20 Desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 Desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 Desa; Kecamatan Pecalongan terdiri dari 10 Desa; serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 Desa.

P E R U B A H A N

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan serta antara 109° 40' 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

- Pekalongan : 9 km
- Pemalang : 43 km
- Tegal : 72 km
- Brebes : 85 km
- Cirebon : 144 km
- Jakarta : 392 km
- Kendal : 64 km
- Semarang : 93 km
- Surabaya : 480 km

3. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 2.000 m, yaitu:

- Gunung Prau : tinggi 2.565 dpal
- Gunung Sipandu : tinggi 2.241 dpal
- Gunung Gajah Mungkur : tinggi 2.101 dpal
- Gunung Alang : tinggi 2.239 dpal
- Gunung Butak : tinggi 2.222 dpal

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Gambar 2.1
Peta Geologi Kabupaten Batang

b. Potensi

Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.

5. Klimatologi**a. Tipe**

Kabupaten Batang yang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) memiliki iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau pada bulan April -Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun.

b. Curah Hujan

Berdasarkan data pengukuran tinggi curah hujan yang ada di setiap kecamatan, dapat diketahui bahwa jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2012 di Kecamatan Blado dan paling sedikit di Kecamatan Gringsing, sedangkan curah hujan yang paling tinggi di Kecamatan Reban dan paling rendah di Kecamatan Tulis.

c. Suhu

Suhu Kabupaten Batang berkisar antara 25 °C-32°C. Hal ini dikarenakan Kabupaten Batang berada dalam iklim tropis.

d. Kelembaban

Kelembaban Kabupaten Batang berkisar antara 55% - 91%.

6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Batang memiliki luas wilayah mencapai 78.864,16 Ha. Luas pemanfaatan lahan pada tahun 2012 terdiri dari 22.433,13 Ha (28,44%) lahan sawah dan 56.431,03 Ha (71,55%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,95%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,51%), sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Data berkaitan dengan luas pemanfaatan lahan pada tahun 2013 adalah belum tersedia datanya.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kebijakan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Batang, terdapat beberapa kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu:

- a) Pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki;
- b) Pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
- c) Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang;
- d) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energy yang berwawasan lingkungan;
- e) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah;
- f) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem;
- g) Pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan dan tempat-tempat strategis;
- h) Pengembangan prasarana pengolahan limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga;
- i) Pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya;
- j) Pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- k) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung;
- l) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air;
- m) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air;
- n) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- o) Pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor;
- p) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi;
- q) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- r) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian;
- s) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan;
- t) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan;
- u) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- v) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata;
- w) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman;
- x) Pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
- y) Pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- z) Pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam.
- aa) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2. Strategi Penataan Ruang

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Batang, disusun strategi penataan ruang wilayah, yang meliputi:

- a) Strategi pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki, meliputi :
 - memperkuat keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat jasa, simpul koleksi dan distribusi hasil produksi, barang dan jasa secara optimal sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah;
 - mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - mengembangkan struktur pusat pelayanan secara berjenjang sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah, serta daya dukung lingkungannya.
- b) Strategi pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya, meliputi :
 - mengembangkan desa-desa sebagai desa pusat pertumbuhan dan desa sebagai *hinterland*;
 - membentuk pusat pertumbuhan kawasan perdesaan menjadi DPP dan mengembangkan secara terpadu dengan desa-desa sekitarnya menjadi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);
 - mengembangkan jaringan transportasi untuk menunjang sistem perdesaan;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- mengembangkan fasilitas lingkungan sesuai dengan peran dan jangkauannya.
- c) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang, meliputi :
- mengembangkan pola dan fungsi jaringan jalan secara berjenjang dan terpadu;
 - meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang dan jasa;
 - meningkatkan keterpaduan berbagai moda transportasi yang ada;
 - mengembangkan sistem angkutan wilayah, sistem angkutan perkotaan dan sistem angkutan perdesaan secara menyeluruh dan terpadu;
 - mengembangkan fasilitas transportasi untuk menunjang sistem angkutan dan barang.
 - meningkatkan fungsi jaringan jalan;
 - mengembangkan jalan baru;
 - memperluas jangkauan pelayanan sistem angkutan perdesaan.
- d) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkungan, meliputi :
- menata sistem jaringan transmisi untuk kepentingan regional dan lokal, yang meliputi jaringan listrik dan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - mengembangkan jaringan listrik distribusi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan;
 - mengembangkan prasarana distribusi minyak dan gas bumi untuk meningkatkan pelayanan.
 - mengendalikan kegiatan yang berada di sekitar jaringan listrik transmisi yang bertegangan tinggi;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- mengembangkan sistem penyediaan energi alternatif yang terbarukan sesuai dengan potensi kawasan.
- e) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah, meliputi :
- mengembangkan jumlah sambungan telepon sesuai dengan standard pelayanan;
 - mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan;
 - mengalokasikan stasiun transmisi telekomunikasi pada kawasan yang sesuai dan tidak mengganggu lingkungan.
- f) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem, meliputi :
- menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan resapan air;
 - menetapkan dan mengendalikan kawasan lindung sempadan sungai dan sekitar mata air untuk menjaga kelestarian sumberdaya air.
 - meningkatkan penghijauan kawasan;
 - mengembangkan sistem resapan air hujan di setiap bangunan.
 - mengkonservasikan kawasan resapan air dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - menetapkan fungsi kawasan perairan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 - membatasi dan mengendalikan sumber pencemaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan penurunan klasifikasi perairan.
 - mengkonservasikan kawasan resapan air dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - membatasi eksploitasi sumberdaya air untuk kepentingan komersial;
 - mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan sektor-sektor yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- g) Strategi pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan dan tempat-tempat strategis, meliputi :
- menyediakan sarana dan prasarana pengumpul dan pengangkut sampah;
 - meningkatkan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu.
 - mengolah sampah organik menjadi kompos yang dilakukan dari skala lingkungan hingga skala wilayah;
 - mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan sistem pengolahan sampah terpadu.
- h) Strategi pengembangan prasarana pengolahan limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, meliputi :
- mensyaratkan bagi industri besar dan menengah untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara swadaya;
 - mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah;
 - mengembangkan instalasi pengolahan limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal di beberapa lokasi sesuai dengan kebutuhan;
 - mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga kawasan perkotaan secara komunal dan terpadu oleh pihak ketiga (off site);
 - mengembangkan beberapa instalasi pengolahan limbah rumah tangga di beberapa kawasan perkotaan padat penduduk;
 - mengembangkan instalasi pengolahan limbah tinja yang digunakan untuk pelayanan wilayah.
- i) Strategi pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya, meliputi :
- menjaga daya tampung sungai;
 - mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sungai;
 - merencanakan sistem drainase kawasan sesuai dengan batasan daerah tangkapan airnya;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- mengembangkan jaringan drainase secara berjenjang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- j) Strategi pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya, meliputi :
- mempertahankan fasilitas sosial yang ada serta secara teknis cukup layak keberadaannya;
 - mengembangkan fasilitas baru sesuai dengan standard pelayanannya.
 - mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan wilayah pada PKL;
 - mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan kecamatan pada PPK, dan PPL.
- k) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung, meliputi :
- menetapkan dan menjabarkan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya tentang kawasan lindung;
 - menetapkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - menetapkan batas kawasan hutan lindung;
 - melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung;
 - melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan.
- l) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan resapan air sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi resapan air;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air;
 - melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- memberikan insentif yang memadai terhadap kegiatan budidaya yang menunjang fungsi resapan air.
- m) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan sesuai dengan kriteria teknisnya;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan;
 - melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan
- n) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :
- mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan perlindungan dan pengamanan kawasan;
 - melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan;
 - memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan
- o) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, meliputi :
- mengidentifikasi dan menetapkan deliniasi kawasan rawan longsor ataupun yang berpotensi terjadi longsor;
 - melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana longsor;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang sudah ada yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan rawan tanah longsor;
 - melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan bencana longsor;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan rawan longsor;
 - mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang meningkatkan kerawanan terjadinya bencana;
 - menghindarkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis pada kawasan rawan bencana.
- p) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan produksi sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang berkembang di kawasan hutan produksi;
- q) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan rakyat sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya hutan rakyat dengan kegiatan pertanian lahan kering dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola hutan rakyat secara berkelanjutan.
- r) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan kering dengan kegiatan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;
 - mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan basah dengan kegiatan perikanan dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu kegiatan budidaya pertanian;
 - memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola pertanian lahan basah secara berkelanjutan.
- s) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - membatasi kegiatan budidaya lainnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan budidaya perikanan;
 - mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan dan pariwisata secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal.
- t) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan;
 - memberikan insentif terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan.
- u) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan industri yang ditetapkan;
 - memberikan insentif terhadap kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan .
- v) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pariwisata sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pariwisata dengan kegiatan lainnya secara terbatas, untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- w) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman, meliputi :
- menetapkan deliniasi kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya;
 - melarang dan membatasi perkembangan permukiman di luar kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan dengan pemberian disinsentif sesuai dengan ketentuan ;
 - mengembangkan sistem kasiba dan lisiba untuk merealisasikan kawasan peruntukan permukiman.
- x) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing, meliputi :
- menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di luar kawasan strategis kabupaten pengembangan ekonomi;
 - mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya lokal;
 - mengintensifkan promosi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - mengelola dampak negatif dari kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.
- y) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, meliputi :

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - mengembangkan sarana dan prasarna wilayah untuk mendukung kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
 - menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- z) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, meliputi :
- menetapkan kawasan strategis kabupaten sesuai dengan daya dukung lingkungannya serta kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah;
 - membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan;
 - membatasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan yang dapat memicu kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan;
 - membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang dilindungi;
 - merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.
- aa) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi :
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
- Turut serta menjaga dan memelihara asset -aset pertahanan/TNI.

3. Kawasan Strategis

Berdasarkan lampiran II Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, terdapat beberapa sudut kepentingan dalam penetapan kawasan strategis. Adapun penetapan kawasan strategis di Kabupaten Batang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Batang

No	Sudut Kepentingan	KSN	KSP	KSK	Kewenangan
1	Pertumbuhan Ekonomi			• Kawasan Koridor Jl. Anjir-Warungasem (Kecamatan Batang, Warungasem) • Kawasan Pelabuhan Niaga dan Sekitarnya (Kecamatan Batang) • Kawasan Pengembangan Pariwisata (Wisata Alam Pagilaran Kecamatan Blado, Wisata Pantai Sigandu iV Ujungnegoro Kecamatan Batang, Kandeman) • Kawasan Peruntukan Industri (Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Subah, Tulis dan Kandeman) • Kawasan Peruntukan Industri Kelautan (Celong/Plabuhan Kecamatan Banyuputih)	
2	Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi			Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Ujungnegoro Kecamatan Kandeman)	
3	Daya Dukung Lingkungan		Kawasan Ujung Negoro Roban	• Hutan Lindung/ Kawasan Dataran Tinggi Dieng (Kecamatan Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, dan Bawang) • Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	

Sumber : Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031

4. Potensi Daerah

a. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Batang. Adapun luas pemanfaatan lahan pertanian terdiri dari 22.462,41 Ha (28,48%) lahan sawah dan 56.401,75 Ha (71,52%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,90%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,59%), selainnya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan.

Sedangkan lahan bukan sawah digunakan untuk tegal/ huma sebesar 37,52% yang merupakan presentase penggunaan terbesar, kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput.

Potensi sumber daya alam di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang daun, kentang, kubis dan cabe. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.

b. Potensi Perikanan

Kabupaten Batang yang sebagian wilayahnya terletak di tepi pantai Laut Jawa yang didukung dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air). Jenis-jenis ikan hasil penangkapan ikan di laut yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan mata besar, ikan remang, ikan bambangan/kakap merah dan ikan bawal. Sedangkan untuk jenis perikanan budidaya adalah udang windu, vanamae, udang putih, ikan bandeng serta ikan lele. Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saat ini belum dapat tergarap secara optimal, hal ini dapat dilihat dari

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

belum dapat dimanfaatkannya wilayah laut seluas 249,395 km². Untuk perikanan budidaya dari potensi lahan air payau seluas 1.429,2 Ha baru dimanfaatkan seluas 292,6 Ha. Sedangkan potensi lahan budidaya air tawar seluas 300 Ha, baru dimanfaatkan seluas 16,70 Ha. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan.

c. Potensi Pariwisata

Kabupaten Batang yang wilayahnya terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan dengan keindahan alamnya merupakan anugrah Tuhan yang patut disyukuri. Keindahan alam Kabupaten Batang merupakan asset daerah yang sangat berharga dan merupakan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Batang yang saat ini cukup menonjol adalah Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negro, Kolam renang Bandar, Curug Genting dan Curug Gombong. Sedangkan untuk jenis agrowisata adalah Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran dan Agrowisata Salak Sodong, sedangkan untuk jenis wisata boga adalah madu, emping, kerupuk kulit ikan, keripik nangka, keripik pisang, buah durian, rambutan, pisang tanduk serta salak. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya tarik wisata di Kabupaten Batang antara lain :

- **Kirab Budaya**

Kirab budaya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Batang. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan dan melestarikan berbagai jenis budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Batang. Dengan dikenalnya kesenian dan kebudayaan yang ada diharapkan akan meningkatkan karakter masyarakat dan bangga dengan kearifan lokal yang ada. Dalam kirab budaya ini diikuti oleh segenap lapisan masyarakat dan lembaga swasta dan negeri, dengan menampilkan berbagai seni dan budaya di Kecamatan masing – masing, mobil hias, marching band dan lainnya dengan peserta dari para pelajar SMA,SMP,SD,para kepala desa di wilayah

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

kabupaten Batang. Sepanjang rute yang dilalui para peserta kirab budaya menunjukkan berbagai atraksinya dihadapan ribuan masyarakat yang sangat antusias menyaksikan Kirab Budaya tersebut.

Tema kirab budaya berganti di tiap penyelenggaraan. Diawali dengan tema Batang Batik Carnival pada tahun 2012, 1001 Bunga Carnival pada tahun 2013 dan Batang maritim Carnival pada tahun 2014.

Melalui kirab budaya ini diharapkan akan lebih mengenalkan budaya dan kesenian Kabupaten Batang ke tingkat nasional dan menambah kunjungan wisatawan yang datang.

- **Lomban**

Lomban adalah kegiatan pesta nelayan yang berupa lomba perahu, sebagai tradisi para nelayan Kabupaten Batang yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan tanggal 1 Syawal di Sungai Sambong Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Kegiatan tersebut adalah merupakan perwujudan rasa syukur atas kemenangannya dalam menjalankan ibadah puasa.

- **Malam Jum’at Kliwonan**

Malam Jum’at Kliwonan adalah merupakan arena keramaian berupa pasar malam dimana banyak penjual / pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Disamping itu para pengunjung juga dapat membeli berbagai makanan khas Batang dan menikmati pagelaran kesenian tradisional.

- **Kesenian Daerah**

Berbagai kesenian daerah yang menjadi daya dukung wisata adalah kesenian lengger, kuntulan dan dengklung. Adapun sarana pendukung pariwisata yang teridentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang antara lain:

- Rumah Makan : 78 buah
- Hotel : 10 buah
- Panti pijat : 22 buah
- Salon kecantikan : 45 buah

- Rias Pengantin :122 buah
- Biro perjalanan : 8 buah
- Arena ketangkasan : 30 buah
- Jasa boga/catering : 16 buah
- Karaoke : 24 buah

d. Potensi Hutan

Kabupaten Batang memiliki kawasan hutan negara seluas 20.796,95 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi 15.316,51 Ha, kawasan hutan lindung 2.969,68 Ha, kawasan hutan konservasi 93,89 Ha dan kawasan lindung 2.416,87 Ha. Selain itu, masih terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 10.771,44 Ha yang tersebar di 15 Kecamatan. Hutan ini menghasilkan berbagai jenis kayu seperti sengon, jati, dan pinus. Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di Kabupaten Batang digunakan untuk bahan baku mebel, pertukangan, bak truk, galangan kapal, kayu bakar, sedangkan limbah kayu digunakan untuk kerajinan tangan. Adapun kayu bulat (log) maupun kayu setengah jadi dijual keluar daerah bahkan untuk jenis kayu jati dieksport ke Jepang. Disamping hasil hutan berupa kayu, dikembangkan pula budidaya aneka usaha kehutanan (non kayu) yaitu berupa budi daya lebah madu, sarang burung walet, persuteraan alam dan kebun bibit desa.

e. Potensi Industri dan Perdagangan

Banyaknya hasil sumber daya alam di Kabupaten Batang baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sumber daya air yang cukup melimpah, sangat potensial bagi perkembangan industri dan perdagangan. Adapun jenis-jenis industri yang ada dan potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Batang adalah:

- Kerajinan Kulit.
- Pembuatan keripik buah pisang dan buah nangka.
- Pengolahan ikan.
- Emping melinjo.
- Pembuatan bak truk
- Galangan kapal.
- Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- Tepung Tapioka.
- Madu lebah

2.1.3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2013 tercatat sejumlah 760.596 jiwa, yang terdiri dari 384,777 jiwa penduduk laki-laki dan 375,819 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 102,38.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

- Usia 0 – 14 tahun : 112.255 jiwa (14,76%)
- Usia 15 – 64 tahun : 591.919 jiwa (77,82%)
- Usia 65 keatas : 56.416 jiwa (7,42%)

Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan penduduk sebesar 28,49%. Angka ketergantungan penduduk sebesar 28,49%, sehingga setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 29 orang penduduk non produktif.

Sementara itu, jumlah penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya) sebanyak 129,973 jiwa atau 17%. Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah wiraswasta sebanyak 122,718 jiwa atau 16%. Sementara itu, terdapat pula data masyarakat yang tidak bekerja mencapai 130,077 jiwa atau 17%. Selain itu, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS, TNI dan Polri kurang dari 2% .

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Batang selama periode tahun 2013 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Kabupaten Batang pada tahun 2013 memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 4,91%, sehingga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 sebesar 6,5% dan 5,02%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Batang atas harga berlaku telah mencapai 6.492 milyar rupiah, naik 627 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah PDRB menurut harga konstan yang mencapai 2.612 milyar, naik 125 milyar rupiah dari tahun sebelumnya.

Andil terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2012 berasal dari sektor pertanian yang menyumbang 24,38% dari total PDRB atas dasar harga berlaku disusul sektor industri pengolahan sebesar 27,53%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,14%, sektor jasa-jasa sebesar 14,22% serta sektor lainnya dibawah 10% .

Tabel 2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten batang
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007 -2013

Tahun	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2007	4,77*	5,59	6,28
2008	3,67	5,61	5,74
2009	3,72	5,14	4,77
201	4,97	5,84	6,22
2011	6,50	6,03	6,49
2012	5,02	6,34	6,23
2013	4,91	6,32*	6,3*

Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014

2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun 2012 sebesar 3,83% lebih tinggi dari inflasi tahun sebelumnya sebesar 3,01%. Laju inflasi pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan laju inflasi di tingkat nasional dan Jawa Tengah yaitu masing-masing sebesar 2,87% dan 2,86%.

Tabel 2.3.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Nasional, Jawa Tengah, dan batang Tahun 2007 -2013

Tahun	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2007	5,64	5,38*	6,59
2008	10,44	9,55	11,06
2009	3,16	3,32	2,78
2010	6,62	6,88	6,96
2011	3,01	2,86	2,87
2012	3,83	4,3	4,23

Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014

3. PDRB Perkapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku, pada tahun 2008sebesar Rp 6.213.000,-. Kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 6.637.000,-, serta pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 7.431.000,- dan selanjutnya pada tahun 2012 turun menjadi Rp 6.492.405,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 10.058.692,- artinya dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Batang secara signifikan .

Tabel 2.4.
PDRB Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2007-2013

Tahun	Harga Berlaku
2007	7.222.549*
2008	6.213.000
2009	6.637.000
2010	7.431.000
2011	6.503.200
2012	6.492.405
2013	10.058.692

Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014

4. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM Kabupaten Batang menunjukkan trend yang meningkat mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. IPM Kabupaten Batang tahun 2006 sebesar 68,4 dan pada tahun 2007 menjadi 68,6 atau mengalami peningkatan sebesar 0,2. Kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 68,90 atau meningkat sebesar 0,3 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 69,84 atau mengalami peningkatan sebesar 0,94. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 70,41 atau meningkat 0,57, pada tahun 2011 sebesar 70,84. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat sebesar 71,41 .

5. **Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 14,67% dari 16,61% pada tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 16,11%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang pada tahun 2009 sebesar 112.169 jiwa, kemudian pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 103.587 jiwa. Kondisi ini mencerminkan semakin berhasilnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batang. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, daerah pedesaan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah agar ketimpangan tingkat kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan dapat diminimalkan.

6. **Angka Kriminalitas Yang Tertangani**

Angka kriminalitas yang ditangani selama tahun 2013 mencapai 342 kasus, dari target sebanyak 262 kasus atau terealisasi sebesar 130,53% . Hal ini

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

mengindikasikan sangat tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Batang. Secara rata-rata selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat 214 kasus per tahunnya.

Tabel 2.5.
Angka Kriminalitas Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka kriminalitas yang tertangani	160	156	175	168	222	273	342

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2014

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan pada fokus kesejahteraan masyarakat meliputi indikator pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, dan kesempatan kerja.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Oleh karena itu bidang pendidikan menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan memasuki sektor-sektor lainnya. Jika dilihat kondisi bidang pendidikan pada akhir tahun 2013, komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	110.682
2	Tidak Tamat SD	88.706
3	SD	353.894
4	SMP	115.534
5	SMA	71.620
6	Diploma II	2.907
7	Diploma III	4.502
8	Strata 1	12.338
9	Strata 2	395
10	Strata 3	17
Jumlah		760.596

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014

Pada PAUD Non Formal dan TK/RA/BA berjumlah 694 sekolah dengan jumlah guru 2.380 orang dan jumlah siswa 16.067 anak, pada pendidikan SD/SDLB/MI berjumlah 571 sekolah dengan jumlah guru 4.957 orang dan jumlah siswa 78.866 anak, selanjutnya pada jenjang pendidikan menengah

SMP/SMPLB/SMPT/MTs berjumlah 108 sekolah dengan jumlah guru 1.885 orang dan jumlah siswa 33.287 anak, selanjutnya pada jenjang SMA/MA/SMK berjumlah 48.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mengurangi jumlah anak putus sekolah maka ditempuh kebijakan melalui Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Negeri se-Kabupaten Batang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan telah dilakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar SD sejumlah 21 sekolah, SMP sejumlah 9 sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD sejumlah 4 sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah SD sejumlah 39 sekolah, penambahan ruang kelas SD sejumlah 1 sekolah, SMP sejumlah 4 sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum 4 sekolah, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 204 ruang, SMP sejumlah 22 sekolah, pembangunan ruang kelas SMP sejumlah 14 ruang.

Sementara itu, pembangunan pendidikan pada fokus ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, dan Angka Partisipasi Murni.

Tabel 2.7.
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka melek huruf	80,53	82,35	83,97	88,83	99,20	99,20	99,78
Angka rata-rata lama sekolah	6,08	6,12	6,14	6,17	6,20	6,37	6,67
Angka Partisipasi Kasar:							
APK SD/MI/Paket A	115,82	112,89	111,34	104,70	102,10	102,05	102,30
APK SMP/MTs/Paket B	87,29	88,68	91,90	88,06	83,55	87,89	88,51
APK SMA/SMK/MA/Paket C	29,70	30,39	34,16	35,32	35,90	37,32	42,21
Angka Pendidikan yang Ditamatkan:							
APT SD/MI/Paket A	55,64	56,90	58,02	59,51	61,29	40,68	41,65
APT SMP/MTs/Paket B	19,36	20,01	20,23	20,76	21,38	12,89	16,06
APT SMA/SMK/MA/Paket C	8,27	8,60	8,67	8,90	9,16	7,43	8,86
Angka Partisipasi Murni:							
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,71	93,96	92,97	98,56	86,55	90,26	90,42
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	62,63	64,77	63,62	66,67	60,79	66,03	70,35
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	21,54	22,97	21,90	25,47	29,91	30,71	33,14

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator kinerja urusan pendidikan secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada angka melek huruf selama tahun 2007 sampai dengan 2013 yang mengalami peningkatan dan mempunyai rata-rata sebesar 90,55% per tahunnya, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 99,78%. Angka melek huruf pada tahun 2012 jika dilihat pada targetnya adalah sebesar 99,5% dengan realisasi sebesar 99,20% sehingga tingkat pencapaiannya sebesar 99,70%. Sedangkan pada tahun 2013, dari target sebesar 99,8% dicapai realisasi sebesar 99,78% sehingga tingkat pencapaiannya sebesar 99,98%.

Pada angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dengan rata-rata selama tahun 2007 sampai dengan 2012 adalah sebesar 6,25 tahun dan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2013 yaitu mencapai 6,67 tahun. Target angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 adalah sebesar 6,5% dan tercapai realisasi sebesar 6,37 tahun sehingga tingkat capaiannya sebesar 98% . Sedangkan pada tahun 2013, dari target sebesar 7 tahun tercapai realisasi sebesar 6,67 tahun sehingga tingkat capaiannya sebesar 95,29%.

Rata-rata Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A selama tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah sebesar 107,314% per tahunnya dengan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2007 yaitu sebesar 115,82%. Jika dikaitkan dengan target Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A pada tahun 2012 adalah sebesar 103,15% dan tercapai realisasi sebesar 102,05% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,93%. Untuk tahun 2013 dari target sebesar 104,1% tercapai realisasi sebesar 102,3% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,27%.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B mempunyai rata-rata sebesar 87,98% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dengan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2009 yaitu sebesar 91,9%. Target Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B pada tahun 2012 adalah sebesar 90,1% dan terealisasi sebesar 87,89% sehingga tingkat capaiannya sebesar 97,55%. Sedangkan pada tahun 2013, dari target sebesar 92,1% tercapai realisasi sebesar 88,51% sehingga tingkat capaiannya sebesar 96,10%.

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C mengalami peningkatan dan mempunyai rata-rata sebesar 35% per tahunnya dengan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2013 yaitu sebesar 42,21%. Pada tahun 2012 ditargetkan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 40,03% dan tercapai realisasi

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

sebesar 37,32% sehingga tingkat capaiannya sebesar 93,23%. Sedangkan pada tahun 2013 dari target sebesar 48,8% tercapai realisasi 42,21% sehingga tingkat capaiannya sebesar 86,50%.

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C selama tahun 2007 sampai dengan 2013 mempunyai rata-rata masing-masing sebesar 53,38%, 18,67% dan 8,56% per tahunnya. Capaian tertinggi untuk masing-masing angka pendidikan yang ditamatkan adalah pada tahun 2011 untuk jenjang SD/MI/Paket A yaitu sebesar 61,29%; pada tahun 2011 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B yaitu sebesar dan pada tahun 2011 untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yaitu sebesar 9,16%.

Pada Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C selama tahun 2007 sampai dengan 2013 mempunyai rata-rata masing-masing sebesar 92,63%, 64,98% dan 26,52% per tahunnya. Capaian tertinggi untuk masing-masing angka partisipasi murni adalah pada tahun 2010 untuk SD/MI/Paket A yaitu sebesar 98,56%, pada tahun 2013 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B yaitu sebesar 70,35% dan pada tahun 2013 untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yaitu sebesar 33,14%.

2. Kesehatan

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, pada tahun 2013 di Kabupaten Batang telah mempunyai sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 2 buah Rumah Sakit Umum, 21 Puskesmas dan 5 di antaranya difasilitasi dengan Rawat Inap, 44 Buah Puskesmas Pembantu, 32 Puskesmas Keliling dan 177 Poliklinik Kesehatan Desa, dan 1.215 Posyandu.

Sementara itu, tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Batang meliputi: 14 dokter spesialis, 60 dokter umum, 7 dokter gigi, 441 bidan, 414 perawat, 24 perawat gigi, 25 nutrisionis, 14 sanitarian, 7 apoteker, 26 asisten apoteker, 11 tenaga kesehatan masyarakat, 14 analis kesehatan, 14 tenaga medis/radiographer, 6 tenaga rekam medis, serta 1 fisio terapi.

Dengan meningkatnya jumlah Dokter Spesialis dan sarana prasarana lain pelayanan semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan pasien dalam dua tahun terakhir yang secara umum menunjukkan peningkatan sebagai berikut:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 2.8.
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka kelangsungan hidup bayi	985,21	978,70	983,28	982,90	982,70	986,86	985,15
Angka usia harapan hidup	69,3	69,66	69,88	70,11	70,48	70,48	70,57
Persentase balita gizi buruk	0,81	0,81	0,81	0,85	0,91	1,07	1,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan pada kinerja makro urusan kesehatan yaitu Angka usia harapan hidup meningkat, dari 69,3 di tahun 2007 menjadi 70,57 di tahun 2013; presentase balita gizi buruk meningkat dari 0,81 di tahun 2008 menjadi 1,42 di tahun 2013. Adapun angka kelangsungan hidup bayi menurun secara kumulatif, dari 985,21 di tahun 2007 menjadi 985,15 di tahun 2013.

3. Kepemilikan Tanah

Bidang pertanahan adalah merupakan bidang yang cukup sensitif terutama dalam hal penguasaan hak atas tanah. Untuk itu tanah -tanah aset pemerintah daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Sampai dengan akhir tah un 2010 telah terinventarisir tanah Pem kab sejumlah 707 bidang yang terdiri dari:

- Telah bersertifikat : 663 bidang
- Masih dalam proses : 15 bidang
- Belum bersertifikat : 29 bidang

Data yang berkaitan dengan inventarisir tanah Pemda pada tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah belum tersedia datanya. Adapun kewenangan bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, ada 9 (sembilan) kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yai tu:

1. pemberian ijin lokasi;
2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. penyelesaian sengketa tanah garapan;
4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

- 5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, sert a ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- 6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- 7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- 8. pemberian izin membuka tanah;
- 9. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota;

4. Kesempatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Batang antara lain bisa dilihat dari indikator rasio penduduk yang bekerja. Selama tahun 2007 s/d 2013, rasio penduduk yang bekerja mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu masing -masing sebesar 67,39 di tahun 2007; 65,74 di tahun 2008; 64,08 di tahun 2009; 67,95% di tahun 2010; 67,17 di tahun 2011; 47,48 di tahun 2012 dan di tahun 2013 sebesar 47,48.

Tabel 2.9.
Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio penduduk yang bekerja	67,39	65,74	64,08	67,95	67,17	47,48	47,48

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014

2.2.3. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah dan jenis kesenian dan gedung olahraga.

1. Kebudayaan

Jumlah dan jenis kesenian yang ada di Kabupaten Batang seluruhnya ada 372 jenis, yang terbina/tertangani baru mencapai 95 jenis kesenian atau 25,51%, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain keterbatasan mobilitas dan tenaga khusus belum memadai, sedangkan benda cagar budaya dan situs kepurbakalaan sebanyak 304 (tiga ratus empat) akan tetapi penanganannya baru mencapai 158 atau 51,97%, hal ini terjadi karena belum terbentuknya pamong budaya yang ada di kecamat an-kecamatan.

2. Pemuda dan Olah Raga

Kondisi umum yang berkaitan dengan bidang keolahragaan di Kabupaten Batang dapat dilihat dari jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Adapun jumlah klub olahraga pada tahun 2013 mencapai 235 sedangkan

Kabupaten Batang memiliki 4 Gedung Olahraga . Jumlah klub olahraga mengalami peningkatan selama tahun 2008 sampai dengan 2010 yaitu sebanyak 20 klub olahraga kemudian menurun pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 20 klub olahraga serta meningkat pada tahun 2013 sebanyak 35 klub olahraga.

Tabel 2.10.
Kinerja Makro Urusan Olah-Raga Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah klub olahraga	200	200	220	220	200	200	235
Jumlah gedung olahraga	4	4	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama tahun 2007-2013 secara keseluruhan dapat dikatakan meningkat. Adapun secara rinci kinerja makro urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendidikan Dasar:							
Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs)	957,14	939,62	929,66	925,62	865,47	902,60	904,20
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI dan SMP/MTs)	626,25	647,74	636,24	666,68	607,91	660,30	703,50
Rasio guru/murid (SD/MI dan SMP/MTs)	60,93	60,86	60,08	58,63	57,75	60,21	60,02
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD dan SMP)	483,92	535,69	569,78	595,34	616,15	618,15	619,14
Pendidikan Menengah:							
Angka partisipasi	215,35	229,67	218,99	254,75	299,03	307,10	331,40

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
sekolah							
Rasio guru terhadap murid	8,39	8,57	8,52	9,61	9,47	11,64	11,87
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	745,59	720,71	752,61	852,99	672,36	741,15	742,18
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (SMU)	2,40	2,28	2,05	1,99	1,99	1,80	1,75
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	80,53	82,35	83,97	88,83	99,20	99,20	99,78
Angka Putus Sekolah:							
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,17	0,18	0,17	0,22	0,22	0,15	0,17
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,96	0,83	1,14	0,78	0,50	0,66	0,49
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,29	1,24	1,13	0,83	0,78	0,63	0,46

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada jenjang pendidikan dasar, APS jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat selama tahun 2007 sampai dengan 2013 mempunyai rata -rata sebesar 917,76 per tahunnya dan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,6. Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah mempunyai rata-rata per tahun sebesar 649,8 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 dan mengalami peningkatan sebesar 43,2 selama tahun 2012 sampai dengan 2013; rasio Guru/Murid mempunyai rata-rata per tahun sebesar 59,783 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 dan mengalami penurunan sebesar 0,19 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 serta rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs mempunyai rata-rata per tahun sebesar 576,88 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 serta mengalami peningkatan sebesar 0,99 selama tahun 2012 sampai dengan 2013.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan sebesar 24,3 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 265,18 selama tahun 2007 sampai dengan 2013; Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami peningkatan sebesar 1,03 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 746,8 selama tahun 2007 sampai dengan 2013; Rasio guru terhadap murid mengalami penurunan sebesar

0,05 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 2,0371 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 ; sedangkan penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) mengalami peningkatan sebesar 0,58 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 90,551% selama tahun 2007 sampai dengan 2013.

Selain itu, Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan sebesar 0,02% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 0,1829% selama tahun 2007 sampai dengan 2013; pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 0,17% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 0,7657% selama tahun 2007 sampai dengan 2013 serta jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan 0,17% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 0,9086% selama tahun 2007 sampai dengan 2013.

2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Batang bisa dilihat dengan beberapa indikator pelayanan kesehatan, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6 -24 bulan) keluarga miskin, Keluarga sadar gizi, Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR), Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure), Incident rate DBD, Penderita DBD yang ditangani, CFR/Angka kematian DBD, CFR/Angka kematian Diare, Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati, Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS, Prevalensi penderita kusta, Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) dan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia balita.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 2.12.
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007 - 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio posyandu per 50 balita	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,89	0,89
Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88
Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,14	0,14	0,14	0,28	0,28	0,28	0,28
Rasio dokter per satuan penduduk							
Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	1,7	1,7	1,27	1,84	1,96	1,8	1,67
Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	8	7,95	6,65	9,05	9,54	9,5	8,37
Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	0,62	0,71	0,85	0,85	1,12	1,3	1,12
Rasio tenaga medis per satuan penduduk							
Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	42	47,16	43,12	68,71	67,05	75	73
Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	43	47,16	43,12	68,71	62,84	66	65,6
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	26,12	33,47	45,93	58,36	78,64	110,63	120,67
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	81,65	84,13	90,02	93,74	92,79	99,89	95,41
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94,35	95,56	88,31	63,31	67,74	95,16	97,58
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	82,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70,97	71,13	74,35	76,03	72,70	77,28	72,59
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	4,13	4,02	4,09	3,21	4,34	10,58	9,91
Cakupan kunjungan bayi	93,80	91,80	100,88	89,86	99,71	97,35	96,36
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	125,48	198,33	135,11	161,28	183,80	188,75	111,77
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	14,79	21,30	16,72	17,10	17,30	13,14	14,85
Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	24,75	22,94	19,42	18,39	19,02	14,72	18,12
Cakupan Desa Siaga Aktif	1,20	1,20	23,39	70,16	61,69	100,00	100,00
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	1,98/10 0,000	0,92/10 0,000	1,37/100 ,000	0,46/10 0,000	0,91/100 ,000	2,26/100 ,000	2,25/10 0,000
Incident rate DBD	2,93	2,86	4,32	8,73	0,63	0,38	6,18
Prevalensi penderita kusta	0,69	0,57	0,49	0,64	0,46	0,67	0,85
Cakupan tempat2 umum yg memenuhi syarat kesehatan	31,98	63,16	63,16	72,40	78,72	69,61	61,80

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	27,11*	32,53*	24,26	45,02	68,94	68,99	69,11
Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	12,65*	12,66	12,67	12,76	13,14	12,36	11,83
Cakupan Puskesmas Terakreditasi	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81	23,81
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
Jam buka pelayanan gawat darurat	na	na	na	na	na	100	100
Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	na	na	na	na	na	185	185
Kematian pasien kurang < 24 jam	na	na	na	na	na	90,90	111,00
Kematian pasien > 48 jam	na	na	na	na	na	53,33	61,58
Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	55,75	55,98	59,12	67,59	69,54	74,13	82,63
kunjungan Ibu hamil K4	78,45	79,16	92,78	90,95	89,37	93,93	93,66
pelayanan nifas	83	83,32	93,60	93,74	93,88	99,95	95,34
neonatus dengan komplikasi yang ditangani	16,12	33,01	29,04	36,72	58,98	100,05	107,99
Pelayanan Anak Balita	85,58	98,82	84,33	99,50	80,23	83,98	83,17
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bl miskin	100,00	100	100	100	100	2,53	3,19
Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	61,91	62,60	98,60	99,00	100	100,00	99,40
peserta KB aktif	79,18	79,86	79,30	79,22	78,62	83,03	81,08
penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia	19,79*	31,50	13,62	13,80	20,12	25,13	14,59
penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare	49,12*	31,20	76,63	46,77	57,17	39,06	43,91
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	Tidak ada KLB	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	49,05*	47,90*	50,14*	49,04	47,89	50,13	51,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa indikator mengalami peningkatan dan penurunan selama tahun 2012 sampai dengan 2013. Adapun indikator yang mengalami peningkatan diantaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup yaitu meningkat sebesar 1,71; Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup yaitu meningkat sebesar 3,4;

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan) keluarga miskin yaitu meningkat sebesar 0,0066; Keluarga sadar gizi yaitu meningkat sebesar 0,0655; Incident rate DBD yaitu meningkat sebesar 5,8/10.000; Prevalensi penderita kusta yaitu meningkat sebesar 0,18/ 10.000; Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) yaitu meningkat sebesar 0,0343% dan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia balita yaitu meningkat sebesar 0,0066%.

Sedangkan beberapa indikator yang mengalami penurunan yaitu antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup yaitu menurun sebesar 76,98; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yaitu menurun sebesar 0,0469; Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR) yaitu menurun sebesar 0,0469; Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure) yaitu menurun sebesar 0,0456; serta CFR/Angka kematian DBD yaitu menurun sebesar 0,0122.

Selama tahun 2007 sampai dengan 2013, rata-rata per tahun untuk indikator urusan kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dengan rata-rata sebesar 158; Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup dengan rata-rata sebesar 17; Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dengan rata-rata sebesar 20; Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan dengan rata-rata sebesar 97,46%; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dengan rata-rata sebesar 73,58%; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6 -24 bulan) keluarga miskin dengan rata-rata sebesar 72,25%; Keluarga sadar gizi dengan rata-rata sebesar 21,04%; Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR) dengan rata-rata sebesar 73,58%; Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure) dengan rata-rata sebesar 92,1%; Incident rate DBD dengan rata-rata sebesar 6,18/10.000; Penderita DBD yang ditangani dengan rata-rata sebesar 100%; CFR/Angka kematian DBD dengan rata-rata sebesar 1,6731%; Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati dengan rata-rata sebesar 100%; Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dengan rata-rata sebesar 100%; Prevalensi penderita kusta dengan rata-rata sebesar 0,6071/10.000; Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) dengan rata-rata sebesar 89,96% dan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia balita dengan rata-rata sebesar 72,25%.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

3. Pekerjaan Umum

Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa Jalan dan Jembatan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat terwujud apabila pelaksanaan perbaikan Jalan dan Jembatan dilakukan secara efisien dengan mengutamakan aksesibilitas yang tinggi dan teratur. Adapun kinerja makro urusan Pekerjaan Umum ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan pemukiman.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja makro urusan Pekerjaan Umum yang mengalami penurunan selama tahun 2012 sampai dengan 2013, yaitu luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan pemukiman yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 3.853 m² dan 4,852%. Sedangkan beberapa indikator yang lain mengalami peningkatan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 yaitu antara lain persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat sebesar 7,97%; rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk meningkat sebesar 0,0314%; rasio rumah layak huni meningkat sebesar 0,227%; dan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat meningkat sebesar 0,018%.

Jika dilihat rata-rata pencapaian indikator kinerja makro urusan Pekerjaan Umum per tahunnya selama tahun 2007 sampai dengan 2013 ada lah menunjukkan kondisi rata-rata persentase rumah tinggal bersanitasi adalah sebesar 53,934%; rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah sebesar 0,1714%; rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,2288%; drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 32,85%; luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 5.768,8 m² dan lingkungan pemukiman adalah sebesar 13,287%.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 2.13.
Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	48	48	48	48	48	48	49
Persentase rumah tinggal bersanitasi	52,88	50,08	49,28	48,02	45,29	46,20	86,03
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,14	0,16
Rasio rumah layak huni	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	55	58	60	64	47	36	36,5
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	33,89	33,79	33,69	33,48	33,00	31,05	31,05
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	26	48	65,00	59,27	59,27	42,78	59,26
Lingkungan Pemukiman	10,9	10,9	10,9	10,9	13,13	18,139	18,139
Panjang Jalan Desa Dalam Kondisi Baik	na	na	na	45	45	45	50
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	na	na	na	89,60	89,82	95,64	95,88
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	na	na	na	0,00	0,00	0,00	0,00
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	na	na	na	100	100	100	100
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	na	na	na	27,78	33,33	36,22	38,44
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	na	na	na	27,78	33,33	36,22	38,44
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	na	na	na	0	0	0	0

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Tahun 2014

4. Perumahan

Pembangunan perumahan dan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain. Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah menurun sementara di sisi lain tidak

diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan dan permukiman secara proporsional.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kondisi rumah tangga pengguna air bersih mengalami penurunan sebesar 0,01%; rumah tangga pengguna listrik mengalami penurunan sebesar 0,40%; rumah tangga ber-sanitasi mengalami peningkatan sebesar 0,54%; serta rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 6,35 %.

Tabel 2.14.
Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rumah tangga pengguna air bersih	57,31	59,88	67,51	45,45	57,31	68,51	68,50
Rumah tangga pengguna listrik	91,72	92,01	92,95	93,48	93,75	94,00	93,60
Rumah tangga ber-Sanitasi	52,88	50,08	49,28	48,02	45,29	45,96	46,50
Lingkungan pemukiman kumuh	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,41	0,25
Rumah layak huni	79,84	63,98	56,34	55,91	55,98	75,70	82,05

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang dan PDAM Kabupaten Batang Tahun 2014

5. Penataan Ruang

Urusan penataan ruang merupakan bagian dari bidang keciptakaryaan. Pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan di Kabupaten Batang mencakup pembangunan, pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum, gedung-gedung pemerintah, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana prasarana perumahan permukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati/difungsikan oleh masyarakat dengan optimal.

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,59 Ha serta Ketaatan terhadap RTRW tetap pada angka 95%.

Tabel 2.15.
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	11,75*	11,75*	11,74	11,74	0,39	2,99	3,58
Ketaatan terhadap RTRW	95	95	95	95	95	95	95

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Kabupaten Batang Tahun 2014

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD.

Tabel 2.16.
Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2103
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tah un 2007 sampai dengan 2013, BAPPEDA Kabupaten Batang telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA, dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A, dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, serta Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 100%.

7. Perhubungan

Kabupaten Batang merupakan Kabupaten termuda di antara kabupaten - kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan tantangan tersendiri di sektor transportasi merupakan bagian integral dari kegiatan dan distribusi, dengan demikian mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembangunan Nasional, baik sebagai penunjang maupun perangsang pertumbuhan ekonomi dan berbagai sektor pembangunan lainnya. Kinerja makro urusan Perhubungan antara lain bisa dilihat dari indikator jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji kir angkutan

umum, pelabuhan laut, pelabuhan lokal, terminal type B, terminal type C, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dan biaya pengujian kelayakan angkutan umum.

Tabel 2.17.
Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah arus penumpang angkutan umum	15.421.343	15.210.034	15.421.344	15.421.342	15.210.033	14.916.997	14.917.520
Rasio ijin trayek	62	62	62	62	62	62	60
Jumlah uji kir angkutan umum	610	610	612	610	610	612	614
Pelabuhan Laut	1	1	1	1	1	1	1
Pelabuhan Lokal	6	6	6	6	6	6	6
Terminal Type B	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Type C	8	8	8	8	9	9	9
Angkutan darat	72	72	72	72	72	72	70
Kepemilikan KIR angkutan umum	622	622	622	622	622	622	622
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	65	65	65	65	65	65	65
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2011 telah terjadi penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 211.309 orang atau menurun sebesar 1,37%. Kemudian selama tahun 2011 sampai dengan 2012 terdapat penurunan jumlah arus penumpang sebesar 293.036 orang atau menurun sebesar 1,93%. Sedangkan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat kenaikan jumlah arus penumpang sebesar 523 orang atau naik sebesar 0,0035%.

Pada rasio ijin trayek selama tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebesar 62%, sedangkan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat penurunan sebesar 2%. Jumlah uji kir angkutan umum selama tahun 2010 sampe dengan 2011 telah dilaksanakan sebanyak 610 kali dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 612 kali di tahun 2012 serta meningkat menjadi 614 kali di tahun 2013. Selama tahun 2010 sampai dengan 2013 terdapat 1 pelabuhan laut, 6 pelabuhan lokal, 1 terminal type B dan terminal type C berjumlah 8 terminal pada tahun 2010 serta meningkat menjadi 9 terminal di tahun 2011 sampai dengan 2013. Jumlah angkutan darat sebanyak 72 unit pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dan menurun menjadi 70 unit pada tahun 2013. Terdapat 622 kepemilikan KIR angkutan umum dengan lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama 65 menit pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Sedangkan biaya pengujian kelayakan angkutan umum sebesar Rp 31.000 selama tahun 2010 sampai dengan 2013.

Dalam rangka mendukung kelancaran transportasi di Kabupaten Batang telah diadakan sarana dan prasarana, antara lain 1) Jalan, berupa jalan nasional dan jalan provinsi/kabupaten dengan kelas jalan yaitu kelas II dan III; 2) Fasilitas Lalu Lintas, berupa pemasangan sarana perlengkapan jalan di jalan-jalan yang ada di Kabupaten Batang (Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi, jalan Negara). Sarana perlengkapan jalan yang dimiliki berupa Rambu Lalu Lintas, Gazon, RPPJ, Marka Jalan, Deliniator, Traffic Light, Lampu Kedip, Peralatan PDPS, Palang Pintu PDPS palang perlintasan, Portal Perlintasan Sebidang, Rambu Kaca, Guard Rail, Papan Nama Jalan, Periferial Interface, Countdown Timer, Led Display Traffic Cone, Pipa Corne, dan Papan tambahan peringatan dan petunjuk untuk keamanan; 3) Fasilitas Transportasi, berupa sarana fisik (terminal angkutan penumpang pedesaan, pangkalan truk dan pos jaga polisi), angkutan (angkutan dalam trayek (24 jalur) dan angkutan tidak dalam trayek (5 jalur)); 4) Fasilitas Pengamanan/SAR berupa penunjang pengamanan pantai / SAR wisata pantai, berupa Gedung Pos Pengamatan Angkutan Laut dan Perahu Karet/Mesin; dan 5) Fasilitas Pelayanan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk mengetahui kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan guna menunjang keselamatan lalu lintas di jalan.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

8. Lingkungan Hidup

Kabupaten Batang yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa merupakan salah satu kabupaten termuda di Jawa Tengah. Berbagai kegiatan/pembangunan yang sangat kompleks menimbulkan konsekuensi adanya berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Kinerja makro urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Persentase penanganan sampah, Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit), Jumlah daya tampung TPS (m³), dan Rasio TPS per penduduk.

Tabel 2.18.
Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase penanganan sampah	58.81	58.56	58.56	60,00	51,84	58,39*	58,26*
Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit)	94	94	94	94	122	122	122
Jumlah daya tampung TPS (m ³)	129,92	129,92	129,92	135,17	137,00	138,21*	140,15*
Rasio TPS per penduduk	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,18*	0,18*

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2011, Persentase penanganan sampah mengalami penurunan sebesar 8,16%; Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit) mengalami peningkatan sebesar 28 unit; Jumlah daya tampung TPS (m³) mengalami peningkatan signifikan sebesar 1001,83 m³; serta Rasio TPS per penduduk mengalami penurunan sebesar 0,01.

9. Pertanahan

Bidang pertanahan adalah merupakan bidang yang cukup sensitif terutama dalam hal penguasaan hak atas tanah. Untuk itu tanah-tanah aset pemerintah daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Kinerja makro urusan Pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator persentase pemohon sertifikat dan Prona (Program Nasional). Pada kurun waktu 1 tahun terakhir, persentase pemohon sertifikat adalah sebesar 100% sedangkan pencapaian Prona (Program Nasional) adalah juga sebesar 100%.

Tabel 2.19.
Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase pemohon sertifikat	100	100	100	100	100	100	100
Prona (Program Nasional)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Tahun 2014

Adapun kewenangan bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Per tanahan, ada 9 (sembilan) kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu:a) Pemberian ijin lokasi; b) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; c) Penyelesaian sengketa tanah garapan; d) Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan; e) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; f) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah kosong; g) Pemberian ijin membuka tanah; dan h) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kepend udukan mengacu pada 3 hal sebagai berikut:

- a. Tertib database kependudukan yang akurat di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
- b. Tertib Nomor Induk Kependudukan, diarahkan pada setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda;
- c. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Tabel 2.20.
Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,79	0,75	0,76	0,76	0,81	0,85	0,85
Rasio bayi berakte kelahiran	0,32	0,39	0,35	0,29	0,45	0,66	0,73
Rasio pasangan berakte nikah	0,96	0,97	0,96	0,97	0,96	1	1
Kepemilikan KTP	79	75	76	76	81	85	85

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	225	230	235	265	295	318	332
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	100	100
Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun	37.122	45.377	49.249	64.964	89.508	460.439	33.329
Rasio Akta Kematian	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	0,005
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	79	75	76	76	81	85	85
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	32	39	35	29	48	66	73
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	89	89	89	90	90	90	91
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	0,2	0,2	0,2	0,3	0,38	0,48	0,5

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BatangTahun 2014

Di bidang pelayanan akta kelahiran pada Desember tahun 2012 mulai dilakukan uji coba pelayanan akte kelahiran 1 hari jadi. Sehingga pada tahun 2013 pelayanan akte kelahiran selesai dalam waktu 1 hari. Pelaksanaan program nasional KTP Elektronik di Kabupaten Batang telah mulai dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011, dan sampai dengan 31 Desember 2012 capaian realisasi dari pelaksanaan program e-KTP tersebut adalah telah berhasil direkam data penduduk wajib e-KTP sejumlah 460.439 orang dari 492.372 orang wajib e-KTP atau 93,51 %. Sedangkan e-KTP yang telah jadi sebanyak 403.421 keping atau 87,6% dan pada tanggal 6 November 2012 mulai didistribusikan kepada penduduk wajib KTP.

Rata-rata pencapaian indikator makro urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mempunyai rata-rata 79% per tahun; Rasio bayi berakte kelahiran mempunyai rata-rata 45% per tahun; Rasio pasangan berakte nikah mempunyai rata-rata 97,4% per tahun; Kepemilikan KTP mempunyai rata-rata 79,57% per tahun; Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mempunyai rata-rata 271,429; kemudian belum ada ketersediaan database kependudukan skala provinsi per tahunnya dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah mencapai 100%. Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun

mempunyai rata-rata 111,43 buah, rasio akta kematian mempunyai rata-rata sebesar 0,00329%, cakupan penerbitan akta kelahiran mempunyai rata-rata sebesar 46%, cakupan penerbitan kartu keluarga mempunyai rata-rata sebesar 89,71% serta cakupan penerbitan kutipan akta kematian mempunyai rata-rata sebesar 0,323%.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Pembangunan Nasional saat ini diantaranya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut salah satunya ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), serta meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Adapun kinerja makro urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21.
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,01	2,004	1,83	3,17	2,06	2,02	1,94
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	61.853	63.262	91.497	124.018	175.196	178.409	181.058
Rasio KDRT	0.002	0.003	0.003	0.004	0.016	0.00	0.00
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0
Partisipasi angkatan kerja perempuan	63.122	64.556	93.202	124.991	178.887	182.086	184.642
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	na	na	na	100	100	46	74
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana	na	na	na	100	100	46	74

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit:							
cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	na	na	na	0	0	0	0
cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	na	na	na	0	0	0	0
cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	na	na	na	100	100	46	74
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	na	na	na	0	0	0	0
cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	na	na	na	0	0	0	0
cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	na	na	na	0	0	0	0

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Tahun2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2,1477%; kemudian terdapat rata-rata partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 125.042 orang. Sementara itu, rasio KDRT mempunyai rata-rata sebesar 0,004%, partisipasi angkatan kerja perempuan mempunyai rata-rata sebesar 127.355 orang serta rata-rata penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tetap pada angka 100%, kemudian cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pen anganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu mempunyai rata -rata sebesar 80%, dan

cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit mempunyai rata -rata sebesar 80%.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Tabel 2.22.
Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,2522	0,2592	0,2547	0,2577	0,2522	0,253	0,2513
Rasio akseptor KB	80,3419	79,863	79,3374	79,2246	80,3419	83,49	80,8549
Cakupan peserta KB aktif	125,964	117,837	119,878	122,505	125,964	133,942	131,618
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	128,023	130,158	128,738	126,244	128,023	127,848	125,287
Rata-rata jumlah JIWA per kepala keluarga	3,5108	3,6511	3,6003	3,5452	3,5108	3,49	3,4333
Cakupan Pasangan Usia Subur(PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	na	na	na	2,7	2,85	4,258	163,086
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	na	na	na	79,2	80,3	133,942	163,975
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	na	na	na	11,70	10,50	13,631	163,086
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	na	na	na	67,3	80,1	22,262	30,466
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	na	na	na	82,4	81	16,190	22,084

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan	na	na	na	0,35	0,31	248	87
Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	na	na	na	1,02	1,02	248	253
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	na	na	na	0	0	0	0
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	na	na	na	100	100	248	248

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga selama tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah sebesar 0,2543 anak, rata-rata rasio akseptor KB adalah sebesar 680.145, rata-rata cakupan peserta KB aktif adalah sebesar 125.387 orang, rata-rata jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah sebesar 12 7.760 keluarga.

13. Sosial

Kinerja makro urusan Sosial terlihat dari beberapa indikator antara lain sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yg memperoleh bantuan sosial, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosi al (PMKS (jiwa). Pada tahun 2008 terdapat 8 unit sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dan mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat 9 unit sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2009 adalah sebanyak 461 orang kemudian meningkat menjadi 490 orang pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 13.813 orang. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah sebanyak 66 orang pada tahun 2009 kemudian meningkat menjadi 667 orang pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 850 orang pada tahun 2012 dan mengalami penurunan menjadi 441 orang pada

tahun 2013. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 22.699 jiwa serta pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebanyak 295.219 jiwa.

Pelayanan terhadap Penyandang permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Batang. Pelayanan terhadap PMKS adalah menghubungkan PMKS dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta memberikan rujukan terhadap sumber-sumber yang ada diluar Kabupaten Batang.

Tabel 2.23.
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	8	8	9	9	9	9	9
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	468*	475*	461	490	524	7168*	13.813
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	605*	615*	666	667	674	850	441
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(jiwa)	22.530*	22.362*	22.699	22.699	22.025	295.219	295.219

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014

14. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Batang terlihat dari beberapa indikator yaitu Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Keselamatan dan perlindungan. Adapun kinerja makro urusan ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka partisipasi angkatan kerja	na	na	na	na	451.467	339.516	339.516
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	na	na	na	na	13	1	2
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	na	na	na	na	75,39	68,71	68,71

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	na	na	na	na	50	31	23
Tingkat pengangguran terbuka	na	na	na	na	6,5	2,18	2,87
Keselamatan dan perlindungan	na	na	na	na	115	224	179

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang meningkat menjadi 2 sengketa pada tahun 2013 serta tingkat pengangguran mencapai terbuka meningkat sebesar 0,69%. Beberapa indikator yang menurun antara lain adalah pencari kerja yang ditempatkan menurun sebesar 8% serta keselamatan dan perlindungan menurun sebesar 45 orang.

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja makro urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terlihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif dan usaha mikro dan kecil. Perkembangan koperasi di Kabupaten Batang dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase koperasi aktif	63,50	75,00	75,00	76,00	77,00	70	70,99
Jumlah UKM non BPR/LKM	na	na	na	na	na	0	0
Jumlah BPR/LKM	na	na	na	na	na	3	3
Usaha Mikro dan Kecil	100.327	100.327	99.974	100.072	100.912	88,139	88,299
Jumlah UKM (unit)	10.128	10.228	10.309	10.404	10.808	10.516	10.776

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif meningkat sebesar 0,99% dan Usaha Mikro dan Kecil meningkat sebesar 160 unit selama tahun 2012 sampai dengan 2013. Sedangkan rata -rata persentase koperasi aktif selama tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah sebesar 72,49% per tahunnya.

Kemudian UKM non BPR/ LKM dan jumlah BPR/ LKM baru dihitung pada tahun 2012 dan 2013, dengan jumlah masing -masing adalah tidak terdapat UKM non BPR/ LM serta 3 BPR/ LKM

16. Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang, ada 16 jenis ijin yang dilimpahkan penandatangana nnya, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan. Kinerja makro urusan Penanaman Modal antara lain bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.26.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	na	na	na	500	500	626	508
Jumlah penyerapan tenaga kerja	na	na	na	1.000	1.000	2.520	2.285
Jumlah realisasi nilai investasi	na	na	na	102,6	108	132	150,61
Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	na	na	na	2.500	2.600	2.820	3.240

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 626 perusahaan, namun menurun pada tahun 2013 menjadi 508 perusahaan, dengna rata rata perusahaan baru per tahun sebanyak 533,5 perusahaan. Demikian halnya dengan Jumlah penyerapan tenaga kerja dengan rata rata serapan tiap tahunnya sebanyak 1.701,25 orang per tahun, dan pada tahun 2012 dengan serapan paling tinggi sebanyak 2.520 orang. Hal ini sejalan dengan jumlah realisasi nilai investasi dengan rata rata tiap tahun 123,30 Milyar rupuah yang terus mengalami peningkatan sejalan dengan jumlah ijin usaha yang diterbitkan dengan rata rata ijin sebanyak 2.790 ijin, dengan ijin terbanyak ditahun 2013 sebanyak 3.240 ijin.

17. Kebudayaan

Kinerja makro urusan Kebudayaan di Kabupaten Batang antara lain bisa dilihat dari indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya dan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.27.
Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2007 – 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	10	15	12	12	12	12
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1	1	1
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	289	289	304	304	307	309	312
Kajian seni	na	na	na	3	1	5	10
Gelar seni	na	na	na	3	4	3	4
Misi kesenian	na	na	na	2	2	2	3
Sumber daya manusia kesenian	na	na	na	2	4	4	7
Tempat (kesenian)	na	na	na	0	0	0	0
Organisasi (kesenian)	na	na	na	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2008 terlaksana sebanyak 10 kali kemudian pada tahun 2009 sebanyak 15 kali serta pada tahun 2010 sebanyak 15 kali. Sedangkan rata-rata benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan per tahun selama tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 299,5 benda cagar budaya dengan pencapaian terbanyak ada pada tahun 2011 yaitu sebanyak 307 benda cagar budaya.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja makro urusan Pemuda dan Olahraga di KabupatenBatang antara lain bisa dilihat dari indikator Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Olahraga, dan Jumlah Kegiatan Olahraga.

Tabel 2.28.
Kinerja Makro Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2007 - 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah Organisasi Olahraga	25	25	25	25	25	25	27
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	1	3	3	2	3
Jumlah Kegiatan Olahraga	2	2	3	3	3	2	7
Jumlah Lapangan Olahraga	3	3	3	3	3	3	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata per tahun kinerja makro urusan Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2007 sampai dengan 2013

menunjukkan bahwa Jumlah Organisasi Pemuda mempunyai rata-rata sebanyak 10 organisasi per tahun; Jumlah Organisasi Olahraga mempunyai rata-rata sebanyak 25 organisasi per tahun; Jumlah Kegiatan Kepemudaan mempunyai rata-rata sebanyak 2 kali per tahun; Jumlah Kegiatan Olahraga mempunyai rata-rata sebanyak 3 kali per tahun dan Jumlah Lapangan Olahraga sebanyak 3 lapangan olahraga.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain bisa dilihat dari indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Selama tahun 2012 dan 2013, telah terealisasi kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 5 kali. Sedangkan kegiatan pembinaan politik daerah baru terlaksana sebanyak 1 kali pada tahun 2012 dan 2013. Secara rata-rata selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terlaksana kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 4 kali per tahun serta kegiatan pembinaan politik daerah rata-rata terlaksana sebanyak 1,85 kali per tahun.

Tabel 2.29.
Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	4	2	2	7	5	5
Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	2	3	1	1
Jumlah kasus konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2014

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terlihat dari beberapa indikator antara lain jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan dan jumlah demo. Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa jumlah demo pada tahun 2012 adalah sebanyak 7 kali dan meningkat menjadi 10 kali pada tahun 2013. Sedangkan jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan rerata 0,77. Kemudian rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan rerata 4,58.

Tabel 2.30.
Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Linmas	7.599	9.674	7.601	7.601	9.974	8.9375	4.700
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,75	0,96	0,76	0,76	0,99	0,75	0,47
Jumlah Pos Kamling	817	817	968	1.312	1.534	1.668	1.193
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (248)	3,29	3,29	3,90	5,29	6,18	5,30	4,81
Jumlah demo	2	2	3	4	6	7	10

Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Batang Tahun 2014

21. Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan bangsa didalam melaksanakan pembangunan nasional karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pangan adalah sebagai sentral kehidupan untuk dapat terciptanya manusia berkualitas yang akan melaksanakan perannya didalam pembangunan. Pembangunan ketahanan pangan memiliki aspek yang luas tidak hanya menyangkut sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan akan tetapi juga menyangkut bagaimana pangan berproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman ,merata dan harga terjangkau oleh masyarakat sehingga menjadikan bangsa yang berdaulat penuh dinegaranya dengan kemandirian pangannya. Hal ini menjadi tujuan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan, untuk mencapainya tentu perlu keterlibatan semua yang terkait didalam pelaksanaan pembangunan .Kinerja makro urusan Ketahanan Pangan bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.31.
Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007 - 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ketersediaan pangan utama:							
- Beras	109.358,64	116.055,29	106.937,67	113.608,55	98.863,34	155.870	164.330
-Jagung	31.577,04	51294,80	42822,24	40.034,40	41.216,80	42.973	49.769
-Kedelai	17,00	8,67	21,25	6,21	73,10	58,19	78,73
Produksi hasil ternak:							
-Daging (kg)	na	na	na	na	na	9.198.399	9.588.099

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-Telur (kg)	na	na	na	na	na	4.182.577	6.765.697
-Susu (liter)	na	na	na	na	na	105.500	103.884
Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	na	na	76	78	83	80	80
Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	na	na	Na	Na	82	82	80
Cadangan Pangan Daerah	na	na	Na	Na	3	4.17	6.50
Ketersediaan energi dan protein per kapita	na	na					
- Energi per kapita	na	na	1,750	1,800	2,000	2,271	7,042
- Protein per kapita	na	na	66	70	70	262	195
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	na	na	79	80	80	83.10	83
Penguatan cadangan pangan	na	na	Na	Na	3	4.17	6.50
Stabilitas harga dan pasokan pangan	na	na	69	70	82	82	80
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	na	na	78	80	80	100	100
Penanganan Daerah Rawan Pangan	na	na	6	13	31	47	50

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator ketersediaan pangan mengalami peningkatan selama tahun 2012 sampai dengan 2013, diantaranya adalah ketersediaan pangan padi meningkat sebesar 8.460 ton dan ketersediaan pangan jagung juga mengalami peningkatan sebesar 6.796 ton. Sementara itu, produksi hasil ternak juga mengalami peningkatan, di antaranya produksi daging meningkat 389.700 kg, produksi telur meningkat sebesar 2.583.120 kg; serta produksi susu menurun sebesar 1.616 liter. Secara rata-rata per tahun, selama tahun 2007 sampai dengan 2013 ketersediaan pangan utama (padi) mempunyai rata-rata sebesar 123.574,78 ton per tahun; ketersediaan pangan utama (jagung) mempunyai rata-rata sebesar 41.114,05 ton per tahun dan ketersediaan pangan utama (kedelai) mempunyai rata-rata sebesar 25,25 ton per tahun.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah LPM, PKK aktif, Posyandu aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.32.
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	na	na	na	na	na	4,83	5,00
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	na	na	na	na	na	8,47	8,06
Jumlah LSM	na	na	na	na	na	86	98
LPM berprestasi	na	na	na	na	na	1	3
PKK aktif	na	na	na	na	na	29,03	34,27
Posyandu aktif	na	na	na	na	na	46,45	93,60
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	na	na	na	na	na	1,96	2,00
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	na	na	na	na	na	29,17	41,66

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2012 adalah sebesar 4,83% dan mengalami peningkatan menjadi 5,00% atau meningkat sebesar 0,17% pada tahun 2013. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah sebesar 8,47% pada tahun 2012 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 8,06% atau menurun sebesar 0,41% di tahun 2013. Jumlah LSM pada tahun 2012 adalah sebanyak 86 LSM dan meningkat menjadi 98 LSM atau meningkat sebesar 12 LSM pada tahun 2013. Jumlah LPM Berprestasi adalah sebanyak 1 LPM pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 3 LPM atau meningkat sebesar 2 LPM pada tahun 2013. Jumlah PKK Aktif adalah sebanyak 29,03% pada tahun 2012 serta meningkat menjadi 34,27% atau meningkat sebesar 5,24% pada tahun 2013. Jumlah Posyandu Aktif adalah sebanyak 46,45% di tahun 2012 serta meningkat menjadi 93,60 atau meningkat sebesar 47,15% di tahun 2013.

Pada tahun 2012, Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat mencapai 1,96% dan meningkat menjadi 2,00% atau meningkat sebesar 0,04% pada tahun 2013. Sedangkan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai 29,17% di tahun 2012 serta meningkat menjadi 41,66% atau meningkat sebesar 12,49% di tahun 2013.

23. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Batang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Batang setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

Tabel 2.33.
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPSKabupaten Batang tahun 2007– 2013

24. Kearsipan

Kinerja makro urusan Kearsipan bisa dilihat dari indikator yaitu pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Selama 1 tahun terakhir terdapat peningkatan pengelolaan arsip secara baku sebesar 2%. Sedangkan indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan naik sebesar 0,11%.

Tabel 2.34.
Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pengelolaan arsip secara baku	na	na	na	na	na	55	57
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	na	na	na	na	na	3,34	3,45

Sumber: Kantor Kearsipan Kabupaten Batang Tahun 2014

25. Komunikasi dan Informatika

Kinerja makro urusan Komunikasi dan Informatika antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah jaringan komunikasi dan web site milik pemda. Selama 1 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah jaringan komunikasi sebanyak 23 unit jaringan komunikasi sedangkan website milik pemerintah

daerah sudah ada sejak tahun 2007. Kemudian, Kabupaten Batang telah melaksanakan 3 kali pameran/ ekspo selama kurun waktu 7 tahun terakhir.

Tabel 2.35.
Kinerja Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah jaringan komunikasi	na	na	na	na	na	25	48
Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	5	5	6	12
Jumlah penyiaran radio/TV lokal	3	3	3	3	4	4	4
Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pameran/ ekspo	1	0	0	0	0	1	1
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	na	na	na	na	12	12	12
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	na	na	na	na	setiap hari	setiap hari	setiap hari
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	na	na	na	na	0	0	1
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	na	na	na	na	0	0	0
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	na	na	na	na	12	12	12
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	na	na	na	na	0	0	273,33

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2014

26. Perpustakaan

Kinerja makro urusan Perpustakaan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat rata-rata per tahun untuk indikator jumlah

pengunjung perpustakaan per tahun adalah sebesar 85.344 orang dan rata-rata koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah sebesar 34.281 buku. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun sebesar 193.845 orang sedangkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan sebesar 3.442 buku.

Tabel 2.36.
Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	50.504	49.504	88.957	106.182	85.501	11.457	205.302
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	21.238	22.348	26.512	28.963	44.921	46.271	49.713

Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Batang Tahun 2014

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Kabupaten Batang ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Adapun kinerja makro urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Kinerja Makro Urusan Pertanian Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
Produktivitas Padi sawah (Ton/Ha)	5.50	5.12	4.78	4.80	4.31	4.019	4.19
Produksi Padi (Ton)	220,193.1	210,829.0	201,456.7	215,227.9	187,556.9	155,870	164,330
Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	6.08	7.72	6.11	6.72	6.24	6.337	6
Produksi Jagung (Ton)	39,468.3	64,118.5	54,209.6	50,043.0	51,521.0	42,973	49,769
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB							
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	28.94	29.36	29.15	29.36	30.05	28.38	27.46
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB (%)	17.65	18.23	17.91	18.11	18.82	17.09	16.4
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK (%)	15.45	15.91	15.70	15.34	15.66	4.57	13.84

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
Jumlah Kelompok Tani Binaan	777	792	807	821	852	866	870
Populasi Hewan ternak							
- Sapi perah	81	76	74	50	65	50	167
- Sapi potong	14759	16554	17850	17992	24,037	25,895	16,927
- Kerbau	3468	2621	2870	2288	2,246	2,270	1,373
- Kambing	59084	57682	62899	64860	66,658	67,659	75,659
- Domba	32159	29098	33078	21102	22,102	23,102	29,102
- Ayam buras	602100	604134	634838	503404	554,404	564,404	567,772
- Ayam ras	2990920	5231640	6430900	3062488	2,747,085	3,717,085	11,212,585
- Itik	82710	105537	113703	87720	144,542	97,720	106,945
Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	32	34	35	37	39	43	47
Ketersediaan Lahan Ternak (ha)	71.17	72.62	74.10	75.62	77.16	78.70	80.28
Penyakit ternak yang tertangani :							
- Jumlah ternak yang disuntik	500	650	650	398	600	1600	4017
- Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)	3.39	3.93	3.64	2.21	2.50	2.32	23.50

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2014

2. Kehutanan

Kinerja makro urusan Kehutanan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasan hutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Tabel 2.38.
Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	16,00	15,37	14,28	14,10	13,83	18,05	7,46
Kerusakan Kawasan Hutan	26,63	22,15	22,04	19,22	16,51	18,29	14,41

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang Tahun 2014

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator pertambangan tanpa ijin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat penurunan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB yaitu dari 5,28% menjadi 1,33% atau menurun sebesar 3,95%.

Tabel 2.39.
Kinerja Makro Urusan ESDM Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	na	na	na	na	na	5,28	1,33

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Kabupaten Batang Tahun 2014

4. Pariwisata

Kinerja makro urusan Pariwisata bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kunjungan wisata, tingkat kunjungan hotel, obyek wisata yang ditangani, jumlah obyek wisata yang dikelola pihak swasta, daya dukung kelompok sadar wisata dan jumlah usaha pariwisata.

Tabel 2.40.
Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kunjungan wisata	421.312*	422.296*	420.328*	424.265	416.391	426.495	430.123
Tingkat Kunjungan Hotel	31.046	25.290	29.618	30.502	29.404	31.000	31.700
Obyek Wisata yang ditangani	5	5	5	5	5	3	5
Jumlah objek wisata yg dikelola pihak swasta	3	3	3	3	3	3	5
Daya dukung kelompok sadar wisata (kelompok)	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah usaha pariwisata	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang tahun 2007 - 2013

5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja makro urusan Kelautan dan Perikanan antara lain bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi perikanan:							
Produksi perikanan Tangkap (ton)	18.455	22.854	23.296	27.005	27.545	30.548	32.716
Produksi perikanan Budidaya (ton)	729	768	792	910	1.152,3	1.283,2	1.796,1
Tingkat Konsumsi ikan	12	13	13	14	14	14	24.17
Cakupan bina kelompok nelayan :							
Cakupan bina kelompok Tangkap (Kelompok)	na	na	2	5	12	40	49

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cakupan bina kelompok Budidaya (Kelompok)	22	30	32	35	42	85	70
Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklaksar)	na	na	na	na	na	17	14
Tingkat Pengelolaan Konservasi	na	na	na	na	na	didirikan	Dikelola secara minimum

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2014

Produksi perikanan tangkap menunjukkan adanya kenaikan yaitu dari 18.455 ton di tahun 2007 menjadi 32.716 ton di tahun 2013. Kemudian produksi perikanan budidaya juga menunjukkan peningkatan dari 729 ton di tahun 2007 menjadi 1.796,1 ton di tahun 2013. Cakupan bina kelompok tangkap menunjukkan peningkatan dari 2 kelompok pada tahun 2009 menjadi 49 kelompok di tahun 2013. Cakupan bina kelompok budidaya juga menunjukkan peningkatan dari 22 kelompok di tahun 2007 menjadi 70 kelompok di tahun 2013. Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan menunjukkan penurunan dari 17 kelompok di tahun 2012 menjadi 14 kelompok di tahun 2013. Kemudian, pengelolaan Konservasi di Kabupaten Batang baru didirikan pada tahun 2012, kemudian di tahun berikutnya telah dikelola secara minimum

6. Perdagangan

Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan serta cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.42.
Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2007 -2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB%)	16.23	15.99	16.00	15.85	15.89	16.19	16.19
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK%)	16.65	16.49	16.61	16.66	16.76	17.14	16.65
Ekspor Bersih Perdagangan dalam US \$/ Rp	19.374.667,057	18.476.620,146.	21.563.205,23	36.191.182,94	37.580.945,45	48.175.517,70	215.159.438,67 (rupiah)
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	254	254	254	267	254	326	442

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Tahun 2014

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 16,23% di tahun 2007 menjadi 16,19% di tahun 2013. Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB (ADHK) menunjukkan angka yang relatif stabil pada besaran 16,65%. Ekspor Bersih Perdagangan selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 19.374.667,057 US\$ di tahun 2007 menjadi 215.159.438,67 US\$ di tahun 2013. Sedangkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal menunjukkan peningkatan dari 254 kelompok di tahun 2007 menjadi 442 kelompok di tahun 2013.

7. Perindustrian

Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 2.43.
Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	27.73	26.42	25.85	25.11	25.12	25,61	26,02
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK (%)	28.33	28.33	27.14	27.33	27.49	27,62	27,53
Pertumbuhan Industri.	9.963	10.05	10128	10226	10.309	10.404	10488
Cakupan bina kelompok pengrajin	178	199	188	200	207	210	215
Jumlah Unit usaha sentra industri (Unit)	210	213	216	216	220	212	216

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Tahun 2014

Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 27,73 % di tahun 2007 menjadi 26,02% di tahun 2013. Demikian pula kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK juga menunjukkan penurunan yaitu dari 28,33% di tahun 2007 menjadi 27,53% di tahun 2013. Cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan peningkatan yaitu dari 178 kelompok di tahun 2007 menjadi 215 kelompok di tahun 2013. Sedangkan jumlah unit usaha sentra industri juga menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 210 unit di tahun 2007 menjadi 216 unit di tahun 2013.

8. Ketransmigrasian

Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan".

Banyaknya transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2010 sebanyak 10 keluarga atau sekitar 33 jiwa. Adapun kebijakan bidang ketransmigrasian diarahkan pada memberikan informasi kepada calon transmigran. Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, potensi unggulan daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pertanian

Urusan pertanian dalam Fokus ini dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. NTP ini baru mulai dihitung pada tahun 2012. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa nilai tukar petani naik dari 100,32 menjadi 104,88.

Tabel 2.44.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
NTP	na	na	na	na	96,71	100,32	104,88

Sumber : BPS Kabupaten Batang

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara Kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten.

1. Aksesibilitas Daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat diukur dengan indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal.

Tabel 2.45.
Aksesibilitas Daerah tahun 2007 - 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	na	na	na	na	na	0,016	0,018
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	na	na	na	na	na	10.540.112	10.442.376
Jumlah orang melalui terminal per tahun	na	na	na	na	na	10.540.112	10.442.376

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 2007 - 2013

Pada tahun 2012, ditargetkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,012 dan tercapai realisasi sebesar 0,016 sehingga tingkat capaiannya sebesar 133,33%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,014 dan tercapai realisasi sebesar 0,018 sehingga tingkat capaiannya sebesar 128,57%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kenaikan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,002. Untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 16.057.360 orang dan tercapai realisasi sebanyak 10.540.112 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 70%. Pada tahun 2013, target yang ditetapkan untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah sebanyak 14.917.680 orang dan tercapai realisasi sebanyak 10.442.376 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 70%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat penurunan jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 97.736 orang. Kondisi ini sama dengan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal selama tahun 2012 dan 2013.

2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Batang bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain bisa dilihat dari ketaatan terhadap RTRW , luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, dan luas wilayah perkotaan.

Tabel 2.46.
Penataan Wilayah Tahun 2007-2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ketaatan terhadap RTRW	na	na	na	na	na	95	95
Luas wilayah produktif	na	na	na	na	na	79,85	79,85
Luas wilayah industri	na	na	na	na	na	1,49	1,51
Luas wilayah banjir	na	na	na	na	na	0,10	0,11
Luas wilayah kekeringan	na	na	na	na	na	na	na
Luas wilayah perkotaan	na	na	na	na	na	14,38	14,38

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 2007 - 2013

Pada tahun 2012, target pada ketaatan terhadap RTRW adalah sebesar 95% dan tercapai realisasi sebesar 95% sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2013, target pada ketaatan terhadap RTRW adalah sebesar 100% tetapi baru tercapai realisasi sebesar 95% sehingga tingkat capaiannya sebesar 95%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terjadi kondisi yang tetap pada realisasi terhadap ketaatan terhadap RTRW yaitu sebesar 95%.

Untuk indikator wilayah produktif, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 81,45% dan tercapai realisasi 79,85% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,04%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan wilayah produktif sebesar 83,08% dan tercapai realisasi sebesar 79,85% sehingga tingkat capaiannya sebesar 96,12%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kondisi yang tetap pada pencapaian realisasi wilayah produktif yaitu sebesar 79,85%.

Pada indikator luas wilayah industri, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 1,51% dan tercapai realisasi sebesar 1,49% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,70%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan luas wilayah industri adalah sebesar 1,54% dan tercapai realisasi sebesar 1,51% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,07%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat peningkatan luas wilayah industri sebesar 0,02%.

Kemudian untuk luas wilayah banjir, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 0,11% dan tercapai realisasi sebesar 0,10% sehingga tingkat capaiannya sebesar 92,76%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan luas wilayah banjir adalah sebesar 0,11% dan tercapai realisasi sebesar 0,11% sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kenaikan luas wilayah banjir sebesar 0,01%.

Untuk indikator luas wilayah perkotaan, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 14,67% dan tercapai realisasi sebesar 14,38% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,04%. Sedangkan pada tahun 2013, luas wilayah perkotaan ditargetkan sebesar 14,96% dan tercapai realisasi sebesar 14,38% sehingga tingkat capaiannya sebesar 96,12%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kondisi yang tetap pada luas wilayah perkotaan yaitu sebesar 14,38%.

3. Ketersediaan Air Bersih

Pengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM Kabupaten Batang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90.

Tabel 2.47.
Banyaknya Pelanggan Air Bersih dan Jaringan Pipa
Kabupaten Batang Tahun 2007-2013

Tahun	Jumlah Pelanggan
2007	39.350*
2008	39.666*
2009	39.034
2010	40.299
2011	42.339
2012	44.913
2013	46.566

Sumber: PDAM Kabupaten Batang Tahun 2014

Terdapat 11 (sebelas) sumber mata air yang dikelola oleh PDAM yaitu Sidosari, Combrang, Blambangan, Banyu Temumpang, Semaren, Karang Ampel, Kanoman, Sipragak, Sigandulan, Slicat, Sijajurang, Kalinongko, Sidandang/Tuk Songo, Lebak, Tlogorejo, Gedad/Citroso, Kalimas dan Nglimut. Pada tahun 2012 debit air dari 11 sumber mata air tersebut adalah 2.955 liter/detik dengan kapasitas yang dimanfaatkan oleh PDAM sebesar 881 liter/detik. Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan dari 39.034 orang di tahun 2009 menjadi 40.229 orang di tahun 2010, kemudian menjadi meningkat menjadi 42.339 di tahun 2011 serta meningkat lagi menjadi 44.913 di tahun 2012.

4. Fasilitas Listrik

Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Batang, menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir

menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Batang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri.

Tabel 2.48.
Banyaknya Pelanggan Listrik, Kwh dan Nilai Disalurkan
Kabupaten Batang Tahun 2007-2013

Tahun	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Listrik (KwH)	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
2007*	263.158	380.471.976	223.856.401.111
2008*	267.144	365.771.140	214.136.448.796
2009	259.172	395.172.812	233.576.353.427
2010	275.116	336.369.469	194.696.544.166
2011	231.473	455.888.225	293.440.103.508
2012	253.867	468.170.138	306.737.248.151
2013*	242.670	462.029.181	300.088.675.829

Sumber: PLN Cabang Batang Tahun 2014

Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Batang adalah untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk keperluan sosial, untuk keperluan usaha, keperluan pemerintah dan keperluan industri.

5. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sampai dengan tahun 2013, di Kabupaten Ba tang terdapat 61 jenis bank dan cabangnya, 5 perusahaan asuransi dan cabangnya, 80 restoran dan 9 penginapan/hotel.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudaha n perijinan dan pengenaan pajak daerah. Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungan tersebut diwadahkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida sebagai wadah perumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Batang.

Selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa angka kriminalitas mempunyai kecenderungan yang meningkat yaitu sebanyak 175 kasus di tahun 2007 dan meningkat menjadi 342 kasus di tahun 2013. Jumlah demo selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan kenaikan yaitu dari 2 kasus demo di tahun 2007 menjadi 10 kasus demo di tahun 2013.

Tabel 2.49.
Fokus Iklim Berinvestasi tahun 2007 - 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka kriminalitas	175	168	222	232	242	273	342
Jumlah demo	2	2	3	4	6	7	10

Sumber : berbagai SKPD Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2013

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Tabel 2.50.
Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2007 - 2013

Indikator	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio lulusan S1/S2/S3	568*	571*	574*	577*	580*	583	586
Rasio ketergantungan	54.94	54.9	54.91	54.89*	54.87*	54.86*	54.84*

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dari lulusan S1/S2/S3, pada tahun 2012 telah ditargetkan sebanyak 1.151 lulusan dan tercapai sebanyak 583 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 50,65%. Untuk tahun 2013, ditargetkan lulusan S1/S2/S3 sebanyak 1.266 orang dan tercapai 586 orang sehingga tingkat

capaiannya sebesar 46,29%. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat kenaikan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 3 orang.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tentang kebijakan dan capaian kinerja serta proyeksi ke periode yang akan datang. Kebijakan merupakan garis besar yang direncanakan akan dijalani atau ditetapkan untuk ditepati dalam kurun waktu pelaksanaan rencana strategis Kabupaten Batang. Kinerja capaian menggambarkan berbagai hasil pelaksanaan kebijakan yang dicapai pada tiap-tiap tahun baik berupa capaian lebih, capaian kurang, beserta perkembangannya.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan arah sasaran semakin meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan pengelolaan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang dimaksud anggaran berbasis kinerja adalah alokasi dan perkembangan anggaran didasarkan sasaran pembangunan dan capaian kinerja yang sudah berjalan.

Penyusunan estimasi dan kajian capaian anggaran pada RPJ MD Kabupaten Batang Tahun 2014-2019, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Batang didasarkan pada Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah; Belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung); serta Pembiayaan Daerah. Sedangkan Neraca Daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi Aset Pemerintah

PERUBAHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

Daerah, Kondisi Kewajiban Pemerintah Daerah dan Kondisi Ekuitas Dana tersedia.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja.

Analisis kinerja keuangan Tahun 2008-2013, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Batang. Keuangan Daerah Kabupaten Batang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kinerja pelaksanaan APBD kabupaten Batang Tahun 2008-2013, digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Analisis Pendapatan Daerah akan dilihat dari tingkat pertumbuhan yang berhasil dicapai sebagai gambaran capaian kinerja pada suatu periode tertentu. Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, maka periodenya adalah 3 (tiga) tahun, namun demikian agar diperoleh gambaran yang lebih baik pada Tabel 3.1

P E R U B A H A N

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

berikut disajikan tingkat pertumbuhan dalam rentang waktu 6 (enam) tahun.

Menurut Permendagri tersebut, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Berikut ini disajikan gambaran trend perkembangan Pendapatan Kabupaten Batang dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun.

PERUBAHAN

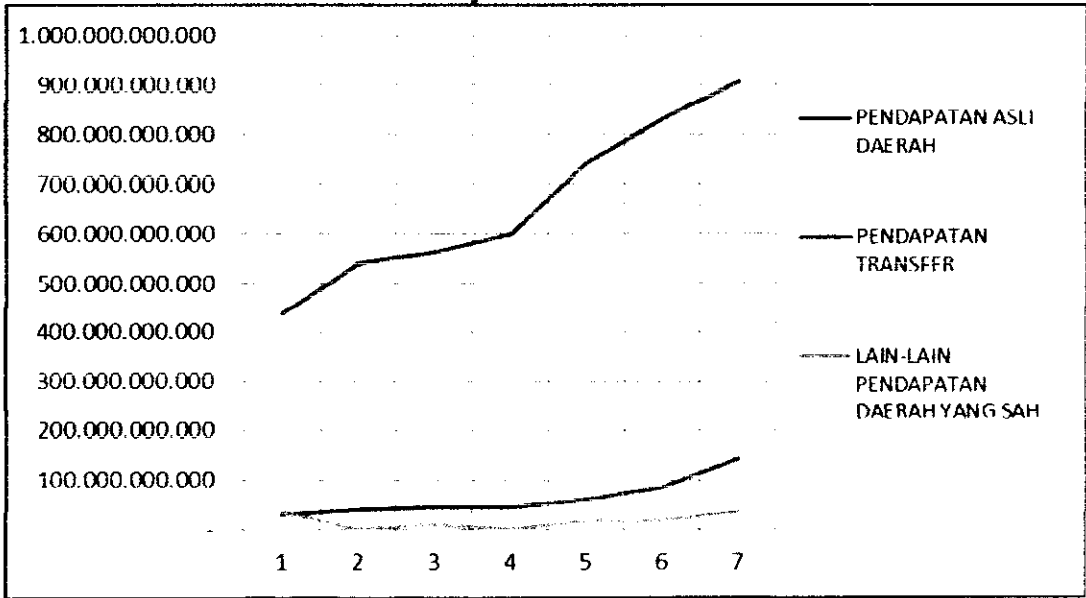
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2013 Kabupaten Batang

No	Uraian	Realisasi Tahun (Rp)							Rerata
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	PENDAPATAN	503.000.814.176	579.900.101.435	616.827.817.969	644.772.288.739	820.066.813.501	933.943.656.710	1.086.627.383.076	13,66%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.968.198.154	41.192.714.868	44.643.602.159	45.421.689.588	60.155.029.031	84.720.949.515	143.502.571.339	30,56%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.833.315.721	9.112.036.901	9.102.024.148	10.055.788.374	14.380.058.531	17.246.379.938	40.333.063.058	41,43%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.197.800.359	20.811.791.556	22.764.685.984	24.687.956.366	29.644.279.421	16.303.639.041	35.812.498.970	22,51%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	875.315.375	1.156.422.724	1.409.925.876	1.460.791.762	3.267.693.623	5.367.435.011	5.647.941.063	43,74%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.061.766.699	10.112.463.687	11.366.966.151	9.217.153.086	12.862.997.456	45.802.595.525	61.709.068.248	64,77%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	437.572.485.283	538.707.386.567	561.858.365.810	598.900.599.151	741.621.254.470	830.321.907.195	907.042.678.471	11,18%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	28.821.311.384	33.276.210.879	36.454.378.017	42.920.692.542	42.180.292.865	38.781.980.095	27.951.001.154	-2,08%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.464.173.899	1.295.010.516	-	-	1.497.011.830	7.014.223.518	8.141.498.700	94,87%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	362.659.000.000	401.574.876.000	416.406.338.000	414.493.766.000	472.130.602.000	577.238.039.000	641.663.630.000	10,11%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	44.628.000.000	55.568.000.000	68.377.000.000	46.457.400.000	57.219.000.000	54.673.900.000	49.792.440.000	0,16%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.460.130.739	-	10.325.850.000	450.000.000	18.290.530.000	18.901.700.000	36.082.133.266	990,79%
1.3.1	Pendapatan Hibah	15.625.969.870			450.000.000	-	-	-	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	18.834.160.869		10.325.850.000	-	18.290.530.000	18.901.700.000	36.082.133.266	-1,92%
	JUMLAH PENDAPATAN	503.000.814.176	579.900.101.435	616.827.817.969	644.772.288.739	820.066.813.501	933.943.656.710	1.086.627.383.076	13,66%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Gambar 3.1
Perkembangan Komponen Pendapatan di Kabupaten Batang
selama tujuh tahun terakhir



Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Batang selama 7 (tujuh) tahun laju perkembangannya adalah 6%. Perkembangan PAD selama kurun waktu tersebut mencapai 8%, dengan kinerja perkembangan ter tinggi ada pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yang besarnya 22%, dan urutan kedua adalah Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang besarnya laju perkembangan adalah 12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah berhasil mengembangkan sumber pendapatan lain di luar Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua sumber pendapatan ini secara tradisional memang merupakan sumber PAD yang terbesar dan dominan. Dengan berhasil dikembangkannya sumber PAD lain, maka Pemerintah Kabupaten Batang telah berhasil melakukan diversifikasi pendapatan.

Sumber pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi laju perkembangannya adalah sebesar 4%. Laju perkembangan 4% yang lebih kecil dari laju perkembangan PAD sebesar 8% mencerminkan kemajuan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang
Kondisi pencapaian tersebut karena didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu :

- a. Penerimaan PAD yang bersumber dari peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- b. Peningkatan Dana Perimbangan yang bersumber dari :
 - 1) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Peningkatan alokasi DAU;
 - 4) Konfirmasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi dana lain (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah/DID). Kebijakan tersebut juga didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta penyempurnaan prasarana dan sarana.

b. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2007–2013 dilakukan melalui analisis belanja daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah Tahun 2007–2013 adalah sebagai berikut

- 1) Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :
- a) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;
 - b) Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
 - c) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - d) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- e) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik;
- f) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
- g) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten/kota;
- h) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- b) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
- c) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Belanja Daerah adalah pengeluaran untuk memenuhi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang diperuntukkan pembiayaan gaji pegawai dan berbagai aktivitas pengelolaan pemerintahan Kabupaten Batang. Belanja langsung berupa pembiayaan yang dikeluarkan untuk memenuhi pengadaan barang modal dan jasa untuk keperluan pembangunan ataupun investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Batang. Berikut ini dalam Tabel 3.2 disajikan proporsi (%) realisasi belanja terhadap anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Batang secara total.

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Total Belanja Kabupaten Batang

No	Uraian	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan
2	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	66,86%	65,76%	62,01%	-3,67%
	Belanja Pegawai	56,30%	56,42%	51,31%	-4,43%
	Belanja Bunga	0,01%	0,01%	0,01%	-31,93%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	
	Belanja Hibah	3,19%	3,99%	2,48%	-6,37%
	Bantuan Sosial	1,10%	1,02%	4,69%	176,72%
	Bantuan Keuangan	6,09%	0,00%	3,45%	
	Belanja Tak Terduga	0,16%	0,09%	0,08%	-23,84%
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00%	4,23%	0,00%	
	BELANJA LANGSUNG	33,14%	34,24%	37,99%	7,13%
	Belanja Pegawai	5,84%	5,64%	6,29%	4,04%
	Belanja Barang	16,24%	13,77%	17,81%	7,07%
	Belanja Modal	11,06%	14,83%	13,89%	13,88%
	JUMLAH BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Kinerja realisasi belanja terhadap total belanja dapat dikatakan mengalami perbaikan, dalam pengertian ini yang dimaksud adalah bahwa belanja terhadap total anggaran secara berangsur-angsur berhasil ditekan dari sebesar 66,86% pada tahun 2011 menjadi 65,76% pada tahun 2012, dan kembali menurun lebih kecil menjadi 62,01% pada tahun 2013. Penurunan ini terjadi karena berhasil ditekannya belanja tidak langsung dari 56,30% pada tahun 2011 dan menjadi 51,31% pada tahun 2013.

Apabila ditinjau dari aspek pembangunan, dan investasi yang dilakukan, maka penghematan atau penekanan belanja tidak langsung berhasil meningkatkan belanja langsung yang merupakan belanja modal dan belanja pembangunan ataupun pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batang. Belanja langsung Kabupaten Batang telah berhasil ditingkatkan pada tahun 2011 sebesar 33,14% menjadi 34,24% pada tahun 2012, dan kembali meningkat menjadi 37,99% pada tahun 2013. Secara akumulatif, peningkatan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Batang adalah meningkat sebesar 7,13% dan peningkatan terbesarnya dicapai oleh belanja modal yang meningkat sebesar 13,88%.

Kajian tentang belanja langsung menurut Permendagri 54 tahun 2010 juga mencermati proporsi beban tetap yang harus ditutup atau dipenuhi dari belanja langsung. Beban tetap yang dikaji antara lain proporsi pemenuhan kebutuhan pegawai, pengeluaran bunga, subsidi dan hibah, bantuan social, bantuan keuangan dan lainnya. Berikut ini pada Tabel 3.3 disajikan perkembangan berbagai pengeluaran tidak langsung tersebut dan rinciannya untuk melihat bagaimana pola pengeluaran belanja tidak langsung tetap yang terjadi dalam anggaran belanja Kabupaten Batang.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Batang

No.	Uraian	2011	2012	2013	Rerata Pertum buhan
2	BELANJA	796.248.255.493	900.205.033.365	1.067.412.675.201	15,82%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	532.358.814.240	591.981.647.379	661.905.860.907	11,51%
2.1					
	Belanja Pegawai	448.323.046.452	507.933.399.316	547.648.556.006	10,56%
	Belanja Bunga	101.678.326	82.530.764	62.958.879	-21,27%
	Belanja Subsidi	-	-	-	
	Belanja Hibah	25.389.362.750	35.935.641.250	26.446.874.000	7,57%
	Bantuan Sosial	8.766.946.152	9.154.307.249	50.049.360.230	225,57%
	Bantuan Keuangan	48.528.685.000	-	36.807.350.952	-11,84%
	Belanja Tak Terduga	1.249.095.560	765.998.200	890.760.840	-11,19%
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	38.109.770.600	-	
2.2	BELANJA LANGSUNG	263.889.441.253	308.223.385.986	405.506.814.294	24,18%
	Belanja Pegawai	46.538.598.799	50.778.323.514	67.174.322.026	20,70%
	- Honorarium PNS	19.033.761.364	15.137.230.010	20.734.693.768	8,25%
	- Honorarium Non PNS	23.475.153.225	22.365.363.018	26.154.202.708	6,11%
	- Uang Lembur	744.635.500	1.099.796.000	1.534.440.750	43,61%
	- Belanja Biasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	#DIV/0!
	- Belanja Kursus Pelatihan BinteK	3.285.048.710	1.780.985.500	1.772.045.050	-23,14%
	- Belanja Pegawai BLUD	-	10.394.948.986	16.524.639.750	
		-	-	454.300.000	
	Belanja Barang	129.308.569.815	123.964.577.623	190.109.518.494	24,61%
	- Bahan Pakai Habis	34.849.039.291	9.739.409.769	13.308.408.226	-17,70%
	- Bahan Material	26.253.098.177	17.973.679.550	26.983.606.772	9,30%
	- Jasa Kantor	16.842.463.339	21.529.337.556	23.723.657.792	19,01%
	- Premi Asuransi	1.226.465.513	1.238.437.375	725.074.400	-20,24%
	- Perawatan Kendaraan Bermotor	6.859.742.276	7.490.300.190	8.887.024.416	13,92%
	- Cetak dan Penggandaan	5.858.589.693	6.729.960.761	8.039.945.699	17,17%
	- Sewa	2.371.016.228	1.954.420.573	3.516.493.561	31,18%
	- Makan Minum	7.841.556.745	4.947.632.370	7.407.872.650	6,41%
	- Pakaian	1.658.789.700	1.744.940.655	2.456.552.215	22,99%

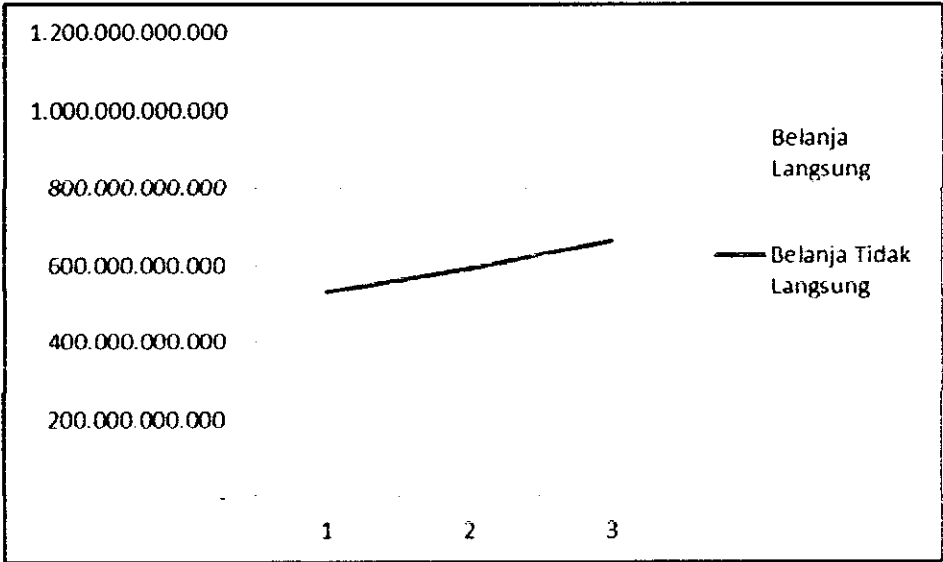
No.	Uraian	2011	2012	2013	Rerata Pertum buhan
	- Perjalanan	11.625.812.447	12.603.104.136	14.535.521.106	11,87%
	- Blj Kursus, Pelath,sosialisasi, Bintek	502.340.300	2.075.763.500	2.182.219.250	159,17%
	- Pemeliharaan	9.596.670.281	20.010.065.408	35.935.892.023	94,05%
	- Jasa Konsultasi	2.394.117.575	1.076.354.235	5.063.143.325	157,68%
	- Survey dan Penyusunan Design Engineering	377.759.550	192.327.250	363.654.800	20,00%
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	12.853.342.795	21.777.585.689	#DIV/0!
	- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.051.108.700	1.805.501.500	15.202.866.570	406,90%
	Belanja Modal	88.042.272.639	133.480.484.849	148.222.973.774	31,33%
	- Belanja Tanah	486.762.950	3.011.698.550	587.065.800	219,11%
	- Belanja Peralatan dan Mesin	28.026.464.788	34.414.713.846	36.424.978.584	14,32%
	- Belanja Gedung dan Bangunan	21.909.607.735	61.530.138.417	59.684.602.403	88,92%
	- Belanja Jalan irigasi dan Bangunan	26.737.241.935	29.874.695.825	48.759.821.697	37,47%
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	10.882.195.231	3.915.692.300	682.813.600	-73,29%
	- Belanja Aset Lainnya	-	733.545.911	2.083.691.690	#DIV/0!
	JUMLAH BELANJA	796.248.255.493	900.205.033.365	1.067.412.675.201	15,82%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Secara keseluruhan pada periode tahun 2011–2013 Belanja Kabupate Batang secara total meningkat sebesar 15,82%. Dalam periode yang sama beanja tdak langsung meningkat sebesar 11,51%, peningkatan sebesar ini terjadi karena adanya peningkatan pada belanja tambahan penghasilan PNS yang meningkat sebesar 33,60% selama kurun waktu periode tersebut. Penyebab lain yang signifikan adalah adanya peningkatan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggaran DPRD serta KDH dan WKDH yang meningkat sebesar 43,65%. Selain pengeluaran yang sifatnya gaji dan tunjangan meningkat, pengeluaran tidak langsung Pemerintah Kabupaten Batang meningkat secara tajam pada belanja bantuan social yang meningkat sebes ar 225,57%, dan juga belanja pemungutan pajak daerah yang meningkat 29,93%. Disisi lain Pemerintah kabupaten Batang juga berhasil menghemat belanja bunga sebesar -21,27% dan belanja bantuan keuangan sebesar 11,84%; dan belanja

tak terduga sebesar 11,19%, semuanya dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2011-2013.

Gambar 3.2
Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Kabupaten Batang selama tiga tahun terakhir



Belanja langsung yang meningkat secara signifikan adalah belanja langsung pegawai terutama uang lembur yang meningkat sebesar 43,61% dalam kurun waktu 2011-2013. Belanja barang sebagai cerminan belanja pembangunan meningkat sebesar 24,61%. Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan belanja Kursus, Pelatihan dan BinteK yang meningkat sebesar 159,17% dan belanja jasa konsultasi yang meningkat sebesar 157,68%. Belanja yang bersifat pembangunan fisik meningkat secara signifikan pada belanja gedung dan bangunan sebesar 88,91% dan belanja pada jalan dan irigasi sebesar 37,47%. Peningkatan pada belanja fisik ini diimbangi penurunan pada asset tetap lainnya sebesar -73,29%. Jadi secara komulatif belanja fisik untuk pembangunan hanya meningkat sedikit dalam kurun waktu bersangkutan. Hal ini mencerminkan bahwa belanja langsung Pemerintah Kabupaten Batang masih bersifat pengeluaran managerial pemerintahan.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu Tahun 2009 – 2013 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.4

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.4
Neraca Kabupaten Batang Tahun 2009 -2013

URAIAN	REALISASI (Rp)			
	2009	2010	2011	2012
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kasda	54.359.159.974,00	81.753.568.107,00	103.655.781.001,00	125.839.075.460,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	182.577.146,00	5.148.521,00	342.564.785,00	590.856.641,00
Kas di Bendahara Penerimaan	183.109.914,00	43.856.904,00	39.936.338,00	49.824.142,00
Kas di BLUD			-	6.520.451.162,00
Piutang Pajak Daerah	1.115.636.066,00	1.812.566.006,00	124.782.630,00	69.500.750,00
Piutang Retribusi	1.897.866.771,00	4.247.674.662,00	585.948.082,00	5.082.288.791,00
Bagian Lancar Tuntutan ganti rugi	11.400.000,00	11.200.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00
Piutang Dana Perimbangan	932.544.042,00	3.617.302.894,00	-	4.518.210,00
Piutang Lainnya	47.929.822,00	47.929.822,00	47.929.822,00	798.295.890,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih				47.473.261,00
Persediaan	7.490.650.735,00	9.959.846.788,50	11.421.697.995,00	12.264.438.209,00
JUMLAH ASET LANCAR	66.220.874.470,00	101.499.093.704,50	116.228.240.653,00	151.238.449.255,00
INVESTASI JANGKA PANJANG				180.600.314.557,37
Investasi Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya	1.839.220.015,98	2.540.851.950,00	2.553.904.950,00	568.238.000,00
Jumlah Investasi Non Permanen	1.839.220.015,98	2.540.851.950,00	2.553.904.950,00	568.238.000,00
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.235.875.309,55	26.238.364.830,55	52.176.835.035,45	56.851.784.735,11
Investasi Permanen Lainnya	5.008.000.000,00	5.008.000.000,00	-	-
Jumlah Investasi Permanen	31.243.875.309,55	31.246.364.830,55	52.176.835.035,45	56.851.784.735,11
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	33.083.095.325,53	33.787.216.780,55	54.730.739.985,45	57.420.022.735,11
ASET TETAP				
Tanah	263.269.484.625,00	240.505.606.625,00	405.017.244.281,00	588.883.433.831,00
Peralatan dan Mesin	150.802.059.331,00	151.875.546.148,00	206.081.163.332,00	220.383.613.101,00
Gedung dan Bangunan	465.813.762.889,00	464.114.341.752,00	469.613.055.576,00	546.136.576.295,09

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jalan, Irigasi dan Jaringan	652.581.990.093,00	665.078.464.368,00	682.702.029.992,00	709.204.855.809,00	748.923.488.566,93
Aset Tetap Lainnya	10.448.954.802,00	11.456.981.349,00	43.076.118.209,00	46.382.303.301,00	48.919.629.721,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.419.452.980,00	2.908.599.268,00	4.702.037.028,00	5.841.845.882,00	22.385.573.163,65
JUMLAH ASET TETAP	1.544.335.704.720,00	1.535.939.539.510,00	1.811.191.648.418,00	2.116.832.628.219,09	2.258.521.287.672,66
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	2.801.213.588,00	2.907.595.594,00	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	2.801.213.588,00	2.907.595.594,00	-	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran-Penjualan kios	431.136.350,00	717.526.250,00	689.957.200,00	765.884.900,00	682.548.400,00
Piutang TPTGR	63.850.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	53.950.000,00	41.440.909,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga					178.910.697,00
Piutang Retribusi			57.500.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
Aset Tak Berwujud				113.850.200,00	162.585.200,00
Aset Lain-Lain				7.123.882.558,00	13.562.319.270,00
JUMLAH ASET LAINNYA	494.986.350,00	781.076.250,00	811.007.200,00	8.115.067.658,00	14.685.304.476,00
JUMLAH ASET	1.644.134.660.865,53	1.674.808.139.833,05	1.985.869.231.850,45	2.333.606.167.867,20	2.515.894.596.824,15
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Bagian Lancar Hutang Dlm Negeri - Pemerintah Pusat	283.544.609,34	264.184.886,93	162.506.562,26	162.506.562,26	162.506.562,26
Hutang Perhitungan Pihak ketiga	78.978.430,00	-	30.107.374,00	1.785.000,00	2.715.208,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	772.614.651,00	1.990.479.605,00	4.365.992.383,00	10.343.711.496,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	362.523.039,34	1.036.799.537,93	2.183.093.541,26	4.530.283.945,26	10.508.933.266,26
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Hutang Penerusan Pinjaman	1.213.672.360,65	868.234.192,58	568.772.967,91	406.266.405,65	243.759.843,39
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.213.672.360,65	868.234.192,58	568.772.967,91	406.266.405,65	243.759.843,39
JUMLAH KEWAJIBAN	1.576.195.399,99	1.905.033.730,51	2.751.866.509,17	4.936.550.350,91	10.752.693.109,65
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR					

URAIAN	REALISASI (Rp)				
	2009	2010	2011	2012	2013
SILPA	54.455.258.589,00	81.758.700.893,00	103.934.094.134,00	132.531.957.261,00	146.693.658.753,00
Pendapatan yang ditangguhkan	190.610.015,00	43.872.639,00	74.080.616,00	51.224.978,00	
Cadangan Piutang	4.005.376.701,00	9.736.673.384,00	768.260.534,00	5.973.803.641,00	19.522.448.093,81
Cadangan Persediaan	7.490.650.735,00	9.959.846.788,50	11.421.697.995,00	12.264.438.209,00	14.138.247.398,56
Dana yang disediakan untuk Pembayaran	(283.544.609,34)	(1.036.799.537,93)	(2.152.986.167,26)	(4.113.258.779,26)	(10.262.972.954,26)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	65.858.351.430,66	100.462.294.166,57	114.045.147.111,74	146.708.165.309,74	170.091.381.291,11
EKUITAS DANA INVESTASI					
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	33.083.095.325,53	33.787.216.780,55	54.730.739.985,45	57.420.022.735,11	62.087.690.118,12
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.544.335.704.720,00	1.535.939.539.510,00	1.811.191.648.418,00	2.116.832.628.219,09	2.258.521.287.672,66
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	494.986.350,00	781.076.250,00	811.007.200,00	8.115.067.658,00	14.685.304.476,00
Dana yang disediakan untuk Pembayaran hutang jangka panjang	(1.213.672.360,65)	(868.234.192,58)	(568.772.967,91)	(406.266.405,65)	(243.759.843,39)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1.576.700.114.034,88	1.569.639.598.347,97	1.866.164.622.635,54	2.181.961.452.206,55	2.335.050.522.423,39
EKUITAS DANA CADANGAN					
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	2.801.213.588,00	2.907.595.594,00	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	2.801.213.588,00	2.907.595.594,00	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	1.642.558.465.465,54	1.672.903.106.102,54	1.983.117.365.341,28	2.328.669.617.516,29	2.505.141.903.714,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.644.134.660.865,53	1.674.808.139.833,05	1.985.869.231.850,45	2.333.606.167.867,20	2.515.894.596.824,15

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2009 -2013

Analisis Rasio	REALISASI (Rp)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	18266,666%	9789,655%	5324,016%	3338,388%	1718,541%
Rasio Quick	16200,411%	8829,021%	4800,827%	3067,667%	1584,005%
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,096%	0,114%	0,139%	0,212%	0,427%
Rasio Hutang terhadap Modal	0,096%	0,114%	0,139%	0,212%	0,429%
Rasio Aktivitas					
Rata-rata Umur Piutang	4,07	2,97	1,50	5,90	4,07
Perputaran Piutang	89,77	122,76	243,27	61,88	89,76
Rata-rata piutang pendapatan daerah	6.871.025.042,50	5.252.466.959,00	3.371.032.087,50	15.093.494.359,00	12.106.592.538,50
Rata-rata Umur Persediaan	425,16	391,79	378,47	392,88	182,50
Perputaran Persediaan	0,86	0,93	0,96	0,93	2,00
Rata-rata Nilai Persediaan	8.725.248.761,75	10.690.772.391,75	11.843.068.102,00	13.201.342.803,78	7.069.123.699,28

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2013 adalah sebesar 1.718,54. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 1.718,54 kali lebih.

2. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio *Quick* pada Tahun 2013 adalah sebesar 1.584,005. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Batang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2013 sebesar 0,427%, . Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2013 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 0,429%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Batang, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Rasio aktivitas merupakan perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah) menjadi kas. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Berdasarkan Tabel 3.5 Rasio Rata-rata Umur Piutang Tahun 2013 sebesar 4,07 Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki oleh Kabupaten Batang cenderung meningkat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Rata-rata umur persediaan Tahun 2013 sebesar 182,5 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencukupi input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan output pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Batang bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja daerah terd iri dari :

- a. **Belanja Langsung** : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
- b. **Belanja Tidak Langsung** : Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga.

Belanja Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu tujuh tahun (2007–2013) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam str uktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil dengan persentase yang relatif besar.

Kajian tentang Belanja Daerah menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 juga mendalami berapa besarnya kebutuhan apara tur daerah yang harus dipenuhi tiap tahunnya. Hal ini dikaji karena akan menunjukkan jumlah yang harus disediakan secara tetap tiap tahunnya, atau berapa besar beban tetap pemerintah Kabupaten Batang tiap tahunnya.

Berikut ini dalam Tabel 3.6 disajikan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Batang .

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Batang

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2011	796.248.255.493	797.925.820.260	99,79%
2	Tahun anggaran 2012	900.205.033.365	908.168.941.583	99,12%
3	Tahun anggaran 2013	1.067.412.675.201	1.072.466.138.145	99,53%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Data yang ada pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa beban tetap aparatur merupakan proporsi terbesar pengeluaran belanja pegawai. Semua tahun dalam periode 2011 – 2013 menunjukkan bahwa 99,6% belanja aparatur digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya pada dalam tata pemerintahan Pemerintah kabupaten, pemerintah daerah kabuoaten Batang juga memiliki rencana prioritas sesuai yang dijanjikan dalam janji politis saat pemilihan kepala daerah. Rencana prioritas juga berfungsi sebagai suatu yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah terpilih, serta mengatasi permasalahan isu strategis daerah. Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang harus dikeluarkan Pemerintah terkait dengan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan maupun pemenuhan kebutuhan aparatur dan karena kewajiban yang harus dipenuhinya.

Tabel 3.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang

No	Uraian	2011	2012	2013	Rerata Per-tumbuhan (%)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	532.358.814.240	591.981.647.379	661.905.860.907	11,51%
1.1	Belanja Pegawai	448.323.046.452	507.933.399.316	547.648.556.006	10,56%
	- Gaji dan Tunjangan PNS	375.292.399.210	405.549.754.990	418.442.804.803	5,62%
	- Tambahan Penghasilan PNS	70.295.712.000	96.864.912.180	125.355.823.340	33,60%
	- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.421.400.000	2.655.400.000	2.668.000.000	43,65%
	- Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.313.535.242	2.863.332.146	1.181.927.863	29,63%

No	Uraian	2011	2012	2013	Rerata Per-tumbuhan (%)
1.1	Belanja Bunga	101.678.326	82.530.764	62.958.879	-21,27%
1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	
1.3	Belanja Hibah	25.389.362.750	35.935.641.250	26.446.874.000	7,57%
1.4	Bantuan Sosial	8.766.946.152	9.154.307.249	50.049.360.230	225,57%
1.5	Bantuan Keuangan	48.528.685.000	-	36.807.350.952	
1.6	Belanja Tak Terduga	1.249.095.560	765.998.200	890.760.840	-11,19%
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	38.109.770.600	-	
2	BELANJA LANGSUNG	263.889.441.253	308.223.385.986	405.506.814.294	24,18%
2.1	Belanja Pegawai	46.538.598.799	50.778.323.514	67.174.322.026	20,70%
	- Honorarium PNS	19.033.761.364	15.137.230.010	20.734.693.768	8,25%
	- Honorarium Non PNS	23.475.153.225	22.365.363.018	26.154.202.708	6,11%
	- Uang Lembur	744.635.500	1.099.796.000	1.534.440.750	43,61%
	- Belanja Biasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	!
	- Belanja Kursus Pelatihan Bintek	3.285.048.710	1.780.985.500	1.772.045.050	-23,14%
	- Belanja Pegawai BLUD	-	10.394.948.986	16.524.639.750	
		-	-	454.300.000	
2.2	Belanja Barang	129.308.569.815	123.964.577.623	190.109.518.494	24,61%
	- Bahan Pakai Habis	34.849.039.291	9.739.409.769	13.308.408.226	-17,70%
	- Bahan Material	26.253.098.177	17.973.679.550	26.983.606.772	9,30%
	- Jasa Kantor	16.842.463.339	21.529.337.556	23.723.657.792	19,01%
	- Premi Asuransi	1.226.465.513	1.238.437.375	725.074.400	-20,24%
	- Perawatan Kendaraan Bermotor	6.859.742.276	7.490.300.190	8.887.024.416	13,92%
	- Cetak dan Penggandaan	5.858.589.693	6.729.960.761	8.039.945.699	17,17%
	- Sewa	2.371.016.228	1.954.420.573	3.516.493.561	31,18%
	- Makan Minum	7.841.556.745	4.947.632.370	7.407.872.650	6,41%
	- Pakaian	1.658.789.700	1.744.940.655	2.456.552.215	22,99%
	- Perjalanan	11.625.812.447	12.603.104.136	14.535.521.106	11,87%
	- Bjl Kursus, Pelath,sosialisasi, Bintek	502.340.300	2.075.763.500	2.182.219.250	159,17%
	- Pemeliharaan	9.596.670.281	20.010.065.408	35.935.892.023	94,05%
	- Jasa Konsultasi	2.394.117.575	1.076.354.235	5.063.143.325	157,68%
	- Survey dan Penyusunan Design Engineering	377.759.550	192.327.250	363.654.800	20,00%
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	12.853.342.795	21.777.585.689	45,64%
	- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.051.108.700	1.805.501.500	15.202.866.570	406,90%
2.3	Belanja Modal	88.042.272.639	133.480.484.849	148.222.973.774	31,33%
	- Belanja Tanah	486.762.950	3.011.698.550	587.065.800	219,11%
	- Belanja Peralatan dan Mesin	28.026.464.788	34.414.713.846	36.424.978.584	14,32%
	- Belanja Gedung dan Bangunan	21.909.607.735	61.530.138.417	59.684.602.403	88,92%
	- Belanja Jalan irigasi dan Bangunan	26.737.241.935	29.874.695.825	48.759.821.697	37,47%
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	10.882.195.231	3.915.692.300	682.813.600	-73,29%
	- Belanja Aset Lainnya	-	733.545.911	2.083.691.690	
3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.677.564.767	7.963.908.218	5.053.462.944	169,09%
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Investasi)	812.000.000	6.298.000.000	1.797.000.000	302,07%
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	162.506.562	162.506.562	162.506.562	0,00%
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	

PERUBAHAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

No	Uraian	2011	2012	2013	Rerata Per-tumbuhan (%)
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	703.058.205	1.503.401.656	3.093.956.382	109,82%
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	TOTAL	797.925.820.260	908.168.941.583	1.072.466.138.145	15,95%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Secara garis besar belanja wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Batang antara lain belanja tidak langsung dalam hal kepegawaian. Peningkatan belanja peawai ini meningkat sebesar 10,56% pada kurun waktu 2011 – 2013, peningkatan belanja wajib didominasi oleh pengeluaran untuk legislatif yang meningkat 43,65% dan tambahan penghasilan PNS meningkat sebesar 33,60%. Belanja yang mengikat Pemerintah Daerah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagian dapat ditekan antara lain belanja bunga -21,27%. Dalam hal bantan social sebagai suatu kewajiban mengikat pemerintah untuk menjalankan fungsi mensejahterakan masyarakat peningkatannya sangat signifikan yaitu sebesar 225,57%; belanja barang dan jasa untuk BLUD (Kesehatan RSUD) meningkat sebesar 45,64%, belanja survey dan penyusunan Design Engineering meningkat 45,64%. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah dan juga untuk memperoleh PAD, maka belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 406,90% dalam kurunwaktu 2011 – 2013.

Belanja untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan dan juga investasi nampak meningkat signifikan pada belanja modal yang meningkat sebesar 31,33%. Peningkatan ini dipicu oleh pengadaan tanah yang meningkat sebesar 219,11% dan belanja gedung dan bangunan yang meningkat sebesar 88,92%. Belanja pembangunan yang juga merupakan prioritas pelayanan kesejahteraan dan juga kemajuan wilayah diwujudkan dalam pembangunan jalan dan irigasi yang meningkat sebesar 37,47%.

Belanja prioritas antara lain sesuai dengan upaya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien maka kualitas aparatur pemerintah ditingkatkan. Anggaran belanja yang dialokasikan dan direalisasi meningkat sebesar 159,1 7% selama kurun waktu 2011–2013. Pengeluaran prioritas sebagai suatu usaha untuk mendukung kemajuan pemerintahan dapat dialokasikan pada belanja penyertaan modal pemerintah yang meningkat sebesar 302.0 7%

Kebijakan anggaran juga terkait dengan kebijakan atau stratgi untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran, dan ata u kebijakan untuk memperbesar SiLPA atau menjaga stabilitas anggaran.

Pada tabel 3.8 ini disajikan perkembangan pendapatan, belanja, surplus dan defisit serta kebijakan anggaran yang tercermin dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran anggaran.

Tabel 3.8
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang

NO	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	820.066.813.501	933.943.656.710	1.086.627.383.076
	<i>Dikurangi realisasi:</i>			
2.	Belanja Daerah	796.248.255.493	900.205.033.365	1.067.412.675.201
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.677.564.767	7.963.908.218	5.053.462.944
A	Surplus (Defisit) riil	22.140.993.241	25.774.715.127	14.161.244.931
	<i>Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:</i>			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.758.700.893	103.934.094.134	132.531.957.261
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	2.800.000.000	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	34.400.000	23.148.000	456.561
9.	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan	81.793.100.893	106.757.242.134	132.532.413.822

NO	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
	Pembiayaan Daerah			
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	103.934.094.134	132.531.957.261	146.693.658.753

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa peningkatan anggaran pendapatan yang lebih besar dari perkembangan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan surplus. Surplus riil pada tahun 2011 mencapai **22.140.993.241**, meningkat menjadi **25.774.715.127** pada tahun 2012, tetapi menurun menjadi **14.161.244.931** pada tahun 2013. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan manajemen pembiayaan yang berhati-hati, maka diperoleh total realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang selalu meningkat yaitu Rp. 81.793.100.893,- pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 106.757.242.134,- pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi Rp. 132.532.413.822 pada tahun 2013. Akibat dari capaian kinerja realisasi Penerimaan yang selalu meningkat ini maka pada tahun berjalan (tahun berkenaan) diperoleh SiLPA yang selalu meningkat yaitu sebesar Rp. 103.934.094.134,- pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi Rp. 103.934.094.134,- dan terakhir pada tahun 2013 menjadi Rp. 103.934.094.134,-.

3.2.3. Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran juga terkait dengan bebragai upaya untuk memanfaatkan atau bahkan menggunakan dana y ang ada untuk menutup defisit yang mungkin terjadi. Kebijakan anggaran di Kabupaten Batang yang bersifat hati-hati memang selalu menghasilkan surplus atau penerimaan riel pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Berikut ini dalam Tabel 3.9 disajikan perkembangan SiLPA dan pemanfaatannya selama periode amatan 2011–2013.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2011	2012	2013
		(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	81.758.700.893	103.934.094.134	132.531.957.261
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	2.800.000.000	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	23.148.000	456.561
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	103.934.094.134	132.531.957.261	146.693.658.753

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, selalu meningkat. Merujuk pada data dalam Tabel 3.9 di atas dapat diketahui bahwa peningkatan itu berasal dari perkembangan SILPA ditambah dengan berbagai penerimaan. Pada tahun 2012 SILPA berasal dari SSILPA tahun sebelumnya Rp.103.934.094.134,- ditambah pencairan dana Rp. 2.800.000.000,- dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 23.148.000,-. Pada tahun 2013 SILPA berasal dari SILPA tahun sebelumnya Rp. 132.531.957.261,- ditambah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 456.561,-. Peningkatan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengalami penurunan yang signifikan dari Rp. 23.148.000,- menjadi hanya Rp. 456.561

Dengan merujuk pada Permendagri 54 tahun 2010, maka analisis terhadap Kajian kebijakan anggaran secara lengkap dapat di analisis dengan mencermati berbagai data yang disusun pada format Tabel 3.10 yang formatnya berasal dari Permendagri 54 tahun 2010 sebagai format acuan kajian kebijakan keuangan daerah.

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Batang

No.	Uraian	2011		2012		2013		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1.	Jumlah SILPA	103.934.094.134	100%	132.531.957.261	100,00%	146.693.658.753	100,00%	19,10%
2.	Pelampauan penerimaan PAD	60.155.029.031	58%	84.720.049.515	63,92%	143.502.571.339	97,82%	55,11%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	573.026.906.695	551%	677.708.142.613	511,35%	727.548.569.854	495,96%	12,81%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	18.290.530.000	18%	18.901.700.000	14,26%	36.082.133.266	24,60%	47,12%
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	23.818.558.008	23%	33.738.623.345	25,46%	19.214.707.875	13,10%	-0,70%
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
7.	Kegiatan lanjutan							

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Kajian atas data yang ada dalam Tabel 3.10 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten Batang mengalami peningkatannya ng besar. Tahun 2011 Pelampauan penerimaan PAD disbanding sebelumnya (2010) besarnya 58% dan pelampauan PAD tahun 2012 besarnya Rp.84.720.049.515 atau meningkat 63,92% dibanding tahun 2011. Pelampauan atas penerimaan PAD ini selalu meningkat, hingga tahun 2013 menjadi Rp.143.502.571.339,- atau juga meningkat sebesar 97,82% disbanding tahun 2012. Secara total pelampuan PAD kurun waktu 2011 – 2013 mencapai 55,11%. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten batang dilihat Pelampauan penerimaan d ana perimbangan meningkat pesat, perkembangannya pada kurun waktu 2011 – 2013 mencapai 12,81%. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat secara signifikan sebesar 47,12% selama kurun waktu 2011–2013.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2007-2013, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2014-2017, yaitu sebagai berikut:

- a. Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- d. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;
- e. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
- f. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
- g. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
- h. Meningkatkan kontribusi BUMD;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

i. Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 - 2018 disusun dengan asumsi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2011-2013;
- b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dihitung mendasarkan kenaikan rata-rata Tahun 2011-2013 dikurangi dengan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P2);
- c. Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang menyangkut kebijakan pusat

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan akan mengalami peningkatan PAD rata-rata sebesar 15,99 % per tahun, terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan. Sedangkan untuk DAU dan DAK belum dapat diprediksi karena berkaitan dengan kinerja daerah. Selanjutnya informasi alokasi DAU dan DAK untuk tahun berikutnya baru akan disampaikan pada akhir tahun.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, jenis pendapatan asli daerah terdapat perubahan, yaitu jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Selanjutnya untuk retribusi daerah telah ditentukan jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten/kota.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.11
Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan di Kabupaten Batang

No	U R A I A N	2013	Tumbuh Thn (%)	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN	1.086.627.383.076	13,86%	1.185.107.390.698	1.312.554.526.960	1.459.313.963.190	1.628.998.080.077
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.502.571.339	30,56%	145.970.643.861	176.873.511.565	214.601.181.365	260.712.227.396
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	40.333.063.058	41,43%	36.749.000.000	42.261.350.000	48.600.552.500	55.890.635.375
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	35.812.498.970	22,51%	24.978.335.750	29.974.002.900	35.968.803.480	43.162.564.176
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.647.941.063	43,74%	6.659.764.742	7.658.729.453	8.807.538.871	10.128.669.702
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.709.068.248	64,77%	77.583.543.369	96.979.429.211	121.224.286.514	151.530.358.143
1.2	DANA PERIMBANGAN	907.042.678.471	11,18%	767.223.015.071	812.405.994.765	860.257.433.179	910.935.311.835
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	27.951.001.154	-2,08%	32.863.521.071	34.506.697.125	36.232.031.981	38.043.633.580
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.663.630.000	10,11%	682.182.894.000	723.113.867.640	766.500.699.698	812.490.741.680
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.792.440.000	0,16%	52.176.600.000	54.785.430.000	57.524.701.500	60.400.936.575
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	36.082.133.266	990,79%	271.913.731.766	323.275.020.631	384.455.348.646	457.350.540.846
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	0,00%	-	-	-	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00%	60.429.149.766	69.493.522.231	79.917.550.566	91.905.183.150
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.082.133.266	-1,92%	164.824.223.000	197.789.067.600	237.346.881.120	284.816.257.344
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00%	46.660.359.000	55.992.430.800	67.190.916.960	80.629.100.352

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

3.3.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014–2017 adalah sebagai berikut :

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui asosiasi masyarakat dalam Musrenbang;
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- f. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;

Proyeksi Belanja kedepan merupakan usaha untuk memperkirakan kebutuhan yang perlu diantisipasi berapa dana yang perlu disediakan. Proyeksi ini juga perlu untuk menentukan target PAD dan kebijakan pembiayaan di masa depan. Proyeksi kebutuhan belanja Kabupaten Batang di masa depan disajikan pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang

No	U R A I A N	2013	Tumbuh/ Thn (%)	2014	2015	2016	2017
2	B E L A N J A	1.067.412.675.201	13,54%	1.323.133.185.676	1.381.815.881.618	1.526.210.092.552	1.695.030.631.361
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	661.905.860.907	14,56%	767.672.015.199	793.027.040.912	862.093.921.404	938.067.489.944
2.1.1	Belanja Pegawai	547.648.556.006	14,33%	651.574.344.257	690.668.804.912	759.735.685.404	835.709.253.944
2.1.2	Belanja Bunga	62.958.879	-16,94%	358.236.000	358.236.000	358.236.000	358.236.000
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-11,16%	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	26.446.874.000	45,83%	28.356.106.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	50.049.360.230	112,00%	42.477.300.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	36.807.350.952		42.906.028.942	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	890.760.840	-40,80%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	405.506.814.294	20,43%	555.461.170.477	588.788.840.706	664.116.171.148	756.963.141.417
2.2.1	Belanja Pegawai	67.174.322.026	12,90%	75.668.835.529	80.208.965.661	85.021.503.600	90.122.793.816
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.109.518.494	24,63%	301.398.199.949	319.482.091.946	358.651.017.463	403.170.078.510
2.2.3	Belanja Modal	148.222.973.774	43,21%	178.394.134.999	189.097.783.099	220.443.650.085	263.670.269.090
	SURPLUS / (DEFISIT)	19.214.707.875	-271,17%	(138.025.794.978)	(69.261.354.658)	(66.896.129.362)	(66.032.551.284)

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Berdasarkan angka data tahun 2013 dan estimasi trend perkembangan yang telah dialami atau terjadi pada periode sebelumnya maka diestimasi angka trend perkembangan ke depan. Dengan dasar dua variable tersebut maka disusunlah prpyeksi kebutuhan anggaran ke depan.

3.3.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan dari sisi pengeluaran. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.13
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang

No	U R A I A N	2013	Tumbuh/ Thn (%)	2014	2015	2016	2017
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	132.532.413.822	15,47%	146.693.658.753	77.923.861.658	69.558.636.362	68.695.058.284
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.531.957.261	17,77%	146.693.658.753	77.923.861.658	63.558.636.362	68.695.058.284
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	0,00%	-	-	6.000.000.000	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	0,00%	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	456.561	0,00%	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.053.462.944	54,13%	8.667.863.775	8.662.507.000	2.662.507.000	2.662.507.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00%	-	6.000.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.797.000.000	168,05%	5.207.000.000	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	162.506.562	172,13%	162.507.000	162.507.000	162.507.000	162.507.000
3.2.3	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	3.093.956.382	109,82%	3.298.356.775	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-35,56%	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	127.478.950.878	16,81%	138.025.794.978	69.261.354.658	66.896.129.362	66.032.551.284
	SILPA TAHUN BERKENAAN	146.693.658.753	19,66%	-	-	0	0

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

Dari proyeksi Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah ditampilkan diatas, maka dapat dilihat pula proyeksi program prioritas yang masuk dalam komponen belanja langsung. Proyeksi program prioritas dan SKPD pemangku disampaikan dalam tabel berikut ini.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 3.14
SKPD dan Program Prioritas

No.	SKPD/Program Prioritas	TAHUN					
		2015		2016		2017	
		Rp	% Total Belanja	Rp	% Total Belanja	Rp	% Total Belanja
1	Dinas perindustrian dan perdagangan	46.500.000.000	3,37%	51.260.000.000	3,36%	450.000.000	0,03%
	Prog. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	45.810.000.000	3,32%	50.810.000.000	3,33%		
	Prog. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	690.000.000	0,05%	450.000.000	0,03%	450.000.000	0,03%
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	92.637.566.820	6,70%	110.315.558.920	7,23%	112.825.951.020	6,66%
	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	53.760.000.000	3,89%	63.360.000.000	4,15%	74.342.400.000	4,39%
	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	33.000.000.000	2,39%	40.000.000.000	2,62%	30.000.000.000	1,77%
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5.877.566.820	0,43%	6.955.558.920	0,46%	8.483.551.020	0,50%
3	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	505.000.000	0,04%	690.000.000	0,05%	500.000.000	0,03%
	Peningkatan Pengamanan Informasi	375.000.000	0,03%	400.000.000	0,03%	500.000.000	0,03%
	Perbaikan Sarana prasarana uji KBM	130.000.000	0,01%	290.000.000	0,02%		
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.300.000.000	0,75%	1.250.000.000	0,08%	1.250.000.000	0,07%
	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	600.000.000	0,04%	350.000.000	0,02%	950.000.000	0,02%
	Program pengembangan destinasi pariwisata	9.400.000.000	0,68%	600.000.000	0,04%		
	Program pengembangan nilai budaya	300.000.000	0,02%	300.000.000	0,02%	300.000.000	0,02%
5	Dinas Kesehatan	51.157.320.000	3,70%	48.304.460.000	3,16%	52.066.600.000	3,07%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22.482.320.000	1,63%	22.548.460.000	1,48%	22.614.600.000	1,33%
	Program pengadaan peningkt dan perbaikan sarpras puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	2.250.000.000	0,16%				
	Program pengadaan, peningkatan sarpras RS/RS jiwa/RS Paru paru/RS mata	23.300.000.000	1,69%	20.000.000.000	1,31%	20.000.000.000	1,18%
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	3.125.000.000	0,23%	5.756.000.000	0,38%	9.452.000.000	0,56%
6	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM	7.900.000.000	0,57%	8.600.000.000	0,56%	8.600.000.000	0,51%

No.	S K P D/Program Prioritas	TAHUN					
		2015		2016		2017	
		Rp	% Total Belanja	Rp	% Total Belanja	Rp	% Total Belanja
	Program Lingkungan sehat perumahan	500.000.000	0,04%	600.000.000	0,04%	600.000.000	0,04%
	Program Pemberdayaan komunitas perumahan	400.000.000	0,03%	1.000.000.000	0,07%	1.000.000.000	0,06%
	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	7.000.000.000	0,51%	7.000.000.000	0,46%	7.000.000.000	0,41%
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.175.000.000	0,09%	905.000.000	0,06%	905.000.000	0,05%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.175.000.000	0,09%	905.000.000	0,07%	905.000.000	0,07%
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.080.000.000	0,15%	2.385.000.000	0,16%	1.560.000.000	0,09%
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	650.000.000	0,05%	750.000.000	0,05%	80.000.000	0,00%
	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)	180.000.000	0,01%	210.000.000	0,01%	230.000.000	0,01%
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	150.000.000	0,01%	325.000.000	0,02%	400.000.000	0,02%
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.100.000.000	0,04%	1.100.000.000	0,03%	850.000.000	0,03%
9	Dinas Pendidikan , Pemuda dan OR	3.556.000.000	0,26%	4.511.000.000	0,30%	4.636.000.000	0,27%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	700.000.000	0,05%	1.400.000.000	0,09%	1.400.000.000	0,08%
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1.786.000.000	0,13%	1.826.000.000	0,13%	1.776.000.000	0,13%
	Program Pendidikan Menengah	910.000.000	0,07%	1.110.000.000	0,08%	1.285.000.000	0,08%
	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	160.000.000	0,01%	175.000.000	0,01%	175.000.000	0,01%
10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	1.043.439.250	0,08%	1.425.000.000	0,09%	1.775.000.000	0,10%
	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	197.419.250	0,01%	200.000.000	0,01%	250.000.000	0,01%
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/perkebunan	35.000.000	0,00%	75.000.000	0,00%	100.000.000	0,01%
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	240.000.000	0,01%	300.000.000	0,01%	375.000.000	0,01%
	Percegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	127.120.000	0,01%	200.000.000	0,01%	250.000.000	0,01%
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	443.900.000	0,03%	650.000.000	0,03%	800.000.000	0,04%
11	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.911.000.000	0,21%	3.289.430.000	0,22%	3.717.055.900	0,22%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.236.000.000	0,09%	1.396.680.000	0,09%	1.578.248.400	0,09%
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.175.000.000	0,06%	1.327.750.000	0,06%	1.500.357.500	0,06%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	500.000.000	0,04%	565.000.000	0,04%	638.450.000	0,04%

No.	S K P D/Program Prioritas	TAHUN					
		2015		2016		2017	
		Rp	% Total Belanja	Rp	% Total Belanja	Rp	% Total Belanja
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.054.500.000	0,08%	2.860.000.000	0,19%	3.180.000.000	0,19%
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan	291.500.000	0,02%	335.000.000	0,02%	380.000.000	0,03%
	Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	685.000.000	0,05%	2.150.000.000	0,16%	2.400.000.000	0,17%
	Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	50.000.000	0,00%	125.000.000	0,01%	150.000.000	0,01%
	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	28.000.000	0,00%	250.000.000	0,02%	250.000.000	0,01%
	Jumlah	221.219.826.070	16,01%	236.795.448.920	15,52%	192.465.606.920	11,35%
	Proyeksi Pagu Total Belanja	1.391.815.881.618		1.526.210.092.552		1.695.030.631.361	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab isu strategis memiliki dampak bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang.

Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan selama jangka waktu 5 tahun.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang permasalahan yaitu permasalahan penataan dan pembinaan birokrasi; permasalahan iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah; permasalahan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan permasalahan kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan.

Secara rinci uraian permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai urusan wajib dan pilihan sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Penataan dan Pembinaan Birokrasi

1. Urusan Perencanaan Pembangunan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :

- a. Adanya aspirasi masyarakat yang belum tertampung di tingkat kabupaten;

P E R U B A H A N

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- b. Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari kualitas maupun kuantitas
- 2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
- a. Masih rendahnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; masih rendahnya kegiatan pembinaan politik daerah
 - b. Menurunnya kegiatan pembinaan politik daerah
- 3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
- a. Masih tingginya angka kriminalitas yang tertangani dan cenderung meningkat;
 - b. Masih rendahnya jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk ;
 - c. Meningkatnya jumlah demo yang terjadi selama 5 tahun terakhir
- 4. Urusan Komunikasi dan Informatika**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
- a. Minimnya jumlah pameran/ ekspo yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Batang
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan Web site milik pemerintah daerah;
 - c. Masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah
- 5. Urusan Kearsipan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
- a. Belum optimalnya pengelolaan Arsip daerah;
 - b. Minimnya SDM pengelola kearsipan
- 6. Urusan Statistik**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya:
- a. Kurangnya sinkronisasi data pemerintahan dan pembangunan antar SKPD dan pemerintah daerah
 - b. Keterlambatan ketersediaan data penunjang pemerintahan dan pembangunan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

4.1.2. Permasalahan Iklim Investasi yang berkorelasi pada Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Lapangan Kerja, dan Peningkatan Pendapatan Daerah.

- 1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif;
 - b. Masih rendahnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil
- 2. Urusan Penanaman Modal**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Rendahnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
 - b. Rendahnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN;
 - c. Kurangnya promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Batang di tingkat Nasional
- 3. Urusan Ketahanan Pangan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Perlunya peningkatan ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan
 - b. Perlunya peningkatan cadangan Pangan Daerah
 - c. Belum optimalnya upaya-upaya penganeekaragaman dan pengamanan pangan
 - d. Perlunya stabilitas harga dan pasokan pangan
- 4. Urusan Pertanian**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Masih rendahnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya;
 - b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%) cenderung menurun
 - c. Kurang optimalnya pembinaan terhadap petani/ peternak
- 5. Urusan Kehutanan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Perlunya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
 - b. Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan hutan.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- 6. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderung menurun
 - b. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan
- 7. Urusan Pariwisata**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Menurunnya tingkat kunjungan hotel
 - b. Terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana pra sarana di obyek wisata
- 8. Urusan Kelautan dan Perikanan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan pada masyarakat;
 - b. Menurunnya kondisi lingkungan wilayah pesisir karena abrasi dan anomali iklim global/kondisi perairan;
 - c. Tingkat kapasitas SDM masyarakat pesisir/nelayan yang masih rendah;
 - d. Rendahnya dukungan / bantuan permodalan dari perbankan terhadap pelaku usaha perikanan.
- 9. Urusan Perdagangan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK) cenderung mengalami penurunan
 - b. Belum optimalnya upaya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal;
 - c. Belum tersedianya sarana prasarana perdagangan yang memadai
- 10. Urusan Perindustrian**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya:
 - a. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHK) cenderung mengalami penurunan
 - b. kurang padunya pengembangan industri dengan kelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

- 1. Urusan Pekerjaan Umum**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
 - b. rendahnya rasio rumah layak huni;
 - c. Menurunnya jumlah Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
- 2. Urusan Perumahan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. masih terdapat lingkungan permukiman yang kurang layak
 - b. menurunnya presentase rumah tangga ber-Sanitasi
- 3. Urusan Penataan Ruang**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. masih minimnya jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Batang;
 - b. belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah
- 4. Urusan Perhubungan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Menurunnya jumlah arus penumpang angkutan umum
 - b. Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, seperti pelabuhan laut, pelabuhan lokal, dan terminal
- 5. Urusan Lingkungan Hidup**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. belum optimalnya upaya penanganan sampah;
 - b. perlunya peningkatan daya tampung TPS
 - c. Rendahnya rasio TPS per penduduk
- 6. Urusan Pertanahan**, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya : belum optimalnya pengelolaan administrasi pertanahan

4.1.4. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- 1. Urusan Pendidikan,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan SD/ MI/ Paket A, SMP/ MTs/ Paket B, dan SMA/ SMK/ MA/ Paket C
 - b. masih rendahnya rasio guru per murid;
- 2. Urusan Kesehatan,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Meningkatnya presentase balita gizi buruk
 - b. Masih rendahnya jumlah dokter spesialis dan dokter gigi
 - c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
- 3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Rendahnya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
 - b. Rendahnya Rasio bayi berakte kelahiran
 - c. Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun cenderung menurun
- 4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Masih rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
 - b. Masih rendahnya pemahaman terhadap gender dan perlindungan anak;
- 5. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. Menurunnya rasio akseptor KB
 - b. kurangnya jumlah penyuluh Keluarga Berencana
- 6. Urusan Sosial,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. masih rendahnya upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - b. perlunya peningkatan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
- 7. Urusan Ketenagakerjaan,** beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
 - a. masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja;

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- b. adanya sengketa pengusaha-pekerja yang terjadi tiap tahunnya;
- c. masih rendahnya presentase pencari kerja yang ditempatkan

8. Urusan Kebudayaan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :

- a. Minimnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
- b. Perlunya peningkatan sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- c. Optimalisasi pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

9. Urusan Pemuda dan Olahraga, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :

- a. masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan;
- b. minimnya jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga

10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :

- a. Perlunya peningkatan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
- b. Menurunnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
- c. Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

11. Urusan Perpustakaan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :

- a. Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan
- b. Perlunya peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

12. Urusan Ketransmigrasian, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :

minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program transmigrasi

P E R U B A H A N

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

4.2. ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang pada periode Tahun 2007-2011, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Batang pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2012-2017, yaitu:

4.2.1. Isu Strategis Penataan Dan Pembinaan Birokrasi

1. Reformasi birokrasi yang menyeluruh dalam 8 area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
2. Reformasi pelayan publik untuk mewujudkan pelayanan prima dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2.2. Isu Strategis Iklim Investasi Yang Berkorelasi Pada Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan peran Koperasi dan UKM dalam usaha perdagangan, dan orientasi kebijakan industri yang *pro growth, pro poor, pro job* dan *pro environment*.
2. Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

1. Peningkatan dan Revitalisasi infrastruktur daerah untuk meningkatkan perekonomian.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

2. Pengembangan wilayah pemukiman yang layak huni dengan memperhatikan pola pemanfaatan lahan terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang .

4.2.4. Isu Strategis Kualitas Sumber Daya Masyarakat Dalam Pembangunan

1. Peningkatan dan Pemerataan derajat kesejahteraan sosial masyarakat .
2. Peningkatan peran serta perempuan, dan kepemudaan dalam pembangunan, disamping optimalisasi sarana dan prasarana olahraga di daerah.
3. Optimalisasi dan pengembangan sarana kesehatan sehingga mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat .
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan.
5. Redesain sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Visi dan Misi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat serta rumusan perbaikan kedepan bagi Kabupaten Batang. Sehingga, dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini, rumusan Visi dan Misi yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tidak akan berubah, karena merupakan janji politik kepada masyarakat Batang.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2012-2017 yaitu:

"TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN PROFESIONAL, UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAERAH, DAN PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BATANG"

Visi tersebut sejalan dengan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Batang 2005-2025, yakni: **"Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan"**. Visi yang telah ditetapkan diatas, mengandung pengertian bahwa pemerintahan kabupaten harus bisa bekerja secara efektif, bersih dan professional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera.

Adapun makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Batang tersebut, maka diberikan pengertian tentang terjemahan dan batasan operasionalnya, yaitu:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- **PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, DAN PROFESIONAL**

Mengandung pengertian bahwa pemerintahan harus bersih dari praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat, memiliki rancang bangun organisasi dan sistem kinerja yang efektif dalam mencapai tujuan, efisien dalam menggunakan anggaran, serta professional dan ramah dalam melayani masyarakat.

- **PEREKONOMIAN DAERAH YANG KUAT**

Mengandung pengertian bahwa Kabupaten Batang harus memiliki kemampuan untuk membangun daerah secara mandiri, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah upaya yang sungguh - sungguh untuk mengembangkan potensi perekonomian daerah dan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi para putra daerah.

- **MASYARAKAT YANG SEJAHTERA**

Mengandung arti suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, tercukupi kebutuhan dasar pokok, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Usaha akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pengusaha lokal untuk berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk menarik kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Harus diingat bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya berkaitan dengan kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, melainkan juga kemajuan dengan dimensi batin, mental, dan spiritual. Masyarakat diarahkan supaya memiliki dan mempraktekkan sikap keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Usaha juga diarahkan untuk budaya dan peradaban masyarakat agar bisa meningkatkan keteraturan mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi kebudayaan asli dan budaya-budaya positif yang telah ada sehingga identitas Kabupaten Batang tetap terjaga.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Visi tersebut masih relevan jika merujuk pada Visi Gubernur Jawa Tengah yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Demikian halnya dengan rujukan arah visi pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dimana seperti dimuat dalam RPJPN 2005-2025 yang merupakan tahap III RPJMN III memuat visi “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Dimana rumusan tersebut dibagi dalam delapan arah kebijakan utama yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
8. Penegakan kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional, serta Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

5.2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Rumusan misi dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini merupakan penjabaran atas visi "Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang". Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah:

1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Misi tersebut juga sejalan dengan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 yaitu:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan .

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud an.

5.3.1. Tujuan Misi I

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, baik, bersih, transparan dan adil, Dengan indikator sasaran:
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
 - b. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
 - c. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang baik, cepat dan transparan, serta penguatan Inovasi Daerah dengan indikator sasaran:
 - a. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
 - b. Web site milik pemerintah daerah
3. Mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sasaran:
 - a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP ,
 - b. Kegiatan pembinaan politik daerah
 - c. Jumlah LSM

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

5.3.2. Tujuan Misi II

1. Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan Investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja, dengan sasaran:
 - a. Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang
 - b. Jumlah penyerapan tenaga kerja
 - c. Jumlah realisasi nilai investasi
 - d. Jumlah izin usaha yang diterbitkan
2. Pengembangan Perdagangan dan Industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB%)
 - b. Ekspor Bersih Perdagangan
 - c. Pertumbuhan Industri
 - d. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%) ,
 - e. Persentase penanganan sampah .
3. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan mewujudkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran:
 - a. Nilai tukar petani
 - b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)
 - c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
 - d. Populasi Hewan ternak
 - e. Produksi perikanan Tangkap
 - f. Produksi perikanan Budidaya
 - g. Ketersediaan pangan utama
4. Meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata , dengan sasaran:
 - a. Persentase koperasi aktif
 - b. Usaha Mikro dan Kecil
 - c. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB
 - d. Obyek Wisata yang ditangani
 - e. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

5.3.3. Tujuan Misi III

1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah, dengan sasaran:
 - a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
 - b. Ketaatan terhadap RTRW,
 - c. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB,
 - d. Luas irigasi dalam kondisi baik
2. Pengembangan wilayah pemukiman penduduk dan perumahan layak huni , dengan sasaran:
 - a. Rumah tangga pengguna air bersih
 - b. Rumah layak huni
 - c. Rumah tangga bersanitasi.
3. Pengembangan dan pemerataan sarana perhubungan dan transportasi publik, dengan sasaran:
 - a. Rasio ijin trayek
 - b. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis ,
 - c. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Jumlah Kendaraan)

5.3.4. Tujuan Misi IV

1. Peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial , dengan sasaran:
 - a. Penanganan/ pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial ,
 - b. PMKS yg memperoleh bantuan sosial ,
 - c. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ,
 - d. Cakupan peserta KB aktif ,
 - e. Kepemilikan KTP
 - f. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan, kepemudaan, dan keolahragaan dalam aspek kehidupan masyarakat , dengan sasaran:
 - a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ,
 - b. Jumlah kegiatan kepemudaan ,

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

- c. Jumlah kegiatan olahraga.
- 3. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup,
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup,
- 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan, dengan sasaran:
 - a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM),
 - b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK,
- 5. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dengan standar layanan prima, dengan sasaran:
 - a. APM/ APK PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK,
 - b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK,
 - c. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun,
 - d. Pengelolaan arsip secara baku,

Selengkapnya, keterkaitan antara visi misi, tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dijelaskan pada tabel berikut:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012 -2017

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR
1	PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, DAN PROFESIONAL	1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.	1.1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, baik, bersih, transparan dan adil.	a) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA b) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD c) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
			1.2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang baik, cepat dan transparan serta penguatan Inovasi Daerah	a) Jumlah penyiaran radio/TV lokal b) Web site milik pemerintah daerah
			1.3. Mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	a) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, b) Kegiatan pembinaan politik daerah c) Jumlah LSM
2	PEREKONOMIAN DAERAH YANG KUAT	2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.	2. 1. Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan Investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja	a) Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang b) Jumlah penyerapan tenaga kerja c) Jumlah realisasi nilai investasi d) Jumlah ijin usaha yang diterbitkan

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR
			2. 2. Pengembangan Perdagangan dan Industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan	a) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB%) b) Ekspor Bersih Perdagangan c) Pertumbuhan Industri d) Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%), e) Persentase penanganan sampah.
			2. 3. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan mewujudkan ketahanan pangan daerah	a) Nilai tukar petani b) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%) c) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis d) Populasi Hewan ternak e) Produksi perikanan Tangkap f) Produksi perikanan Budidaya g) Ketersediaan pangan utama
			2. 4. Meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata	a) Persentase koperasi aktif b) Usaha Mikro dan Kecil c) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB d) Obyek Wisata yang ditangani e) Penyelenggaraan festival seni dan budaya
3	3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan	3. 1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah		a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik b) Ketaatan terhadap RTRW, c) Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

BAB V In

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR
		terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat		d) Luas irigasi dalam kondisi baik
			3. 2. Pengembangan wilayah pemukiman penduduk dan perumahan layak huni	a) Rumah tangga pengguna air bersih b) Rumah layak huni c) Rumah tangga bersanitasi
			3. 3. Pengembangan dan pemerataan sarana perhubungan dan transportasi publik	a) Rasio ijin trayek b) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, c) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Jumlah Kendaraan)
4	MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan	4.1. Peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial	a) Penanganan/ Pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, b) PMKS yg memperoleh bantuan sosial, c) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, d) Cakupan peserta KB aktif, e) Kepemilikan KTP f) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
			4.2. Meningkatkan kualitas dan peran perempuan, kepemudaan, dan keolahragaan dalam aspek kehidupan masyarakat	a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, b) Jumlah kegiatan kepemudaan, c) Jumlah kegiatan olahraga.
			4.3. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	a) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR
				hidup,
			4.4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan	a) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), b) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK,
			4.5. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dengan standar layanan prima	a) APM/ APK PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, b) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, c) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, d) Pengelolaan arsip secara baku .

5.4. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

Pentahapan Pembangunan yang dimaksudkan adalah adanya penekanan fokus perhatian pada 3 (tiga) segmentasi periode pembangunan jangka menengah meliputi

5.4.1. Tahap Pertama "PENGUATAN FONDASI PEMERINTAHAN (Tahun 2012-2014)

Tahap penguatan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang didukung birokrasi yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pelayanan publik yang prima. Pembangunan diarahkan pada pembinaan birokrasi pemerintahan, peningkatan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien yang berkinerja tinggi, serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima demi terciptanya kepuasan kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Urusan yang menjadi fokus prioritas adalah: (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian, (2) Urusan Perencanaan Pembangunan, (3) Urusan Statistik, (4) Urusan Komunikasi dan Informatika, dan (5) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Tahapan pertama pembangunan dengan tema Penguatan Fondasi Pemerintahan memiliki tema dan prioritas tahunan yang menjadi fokus pembangunan daerah yaitu:

a. Tahun 2012 "KONSOLIDASI DAN INTEGRASI"

Tahun 2012 merupakan tahun transisi kepemimpinan di Kabupaten Batang, sehingga diperlukan penguatan dan konsolidasi internal yang meliputi penguatan sumber daya aparatur, dan penguatan pemahaman dan integrasi perencanaan daerah.

Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Perencanaan Pembangunan. Program prioritas diantaranya adalah Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan.

b. Tahun 2013 "BIROKRASI BERSIH DAN PROFESIONAL"

Tahun 2013 dengan tema Birokrasi Bersih dan Profesional yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada pengembangan SDM baik kualitas maupun kuantitas aparatur, dan daya dukung organisasi dilingkungan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

pemerintah Kabupaten Batang, sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan profesional.

Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian. Program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

c. Tahun 2014 “PELAYANAN PUBLIK PRIMA”

Tahun 2014 dengan tema Pelayanan Publik Prima yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada upaya menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat Batang yang prima sehingga tercipta kepuasan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

5.4.2. Tahap Kedua “PENGUATAN EKONOMI DAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR” (Tahun 2015)

Tahap kedua diharapkan dapat memberikan penguatan pada perekonomian daerah, sehingga kebijakan diarahkan pada penciptaan iklim investasi daerah yang didukung oleh birokrasi pemerintahan yang responsif dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dengan maksimal (perdagangan industri, kelautan perikanan, pertanian, dan kehutanan) dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru dan ketahanan pangan daerah. Selain itu kebijakan juga diarahkan pada pengembangan dan peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang mendukung perkembangan perekonomian daerah dengan konektivitas antar daerah yang baik. Adapun urusan yang menjadi fokus prioritas adalah: (1) Urusan Penanaman Modal, (2) Urusan Ketenagakerjaan, (3) Urusan Perindustrian, (4) Urusan Perdagangan, (5) Urusan Lingkungan Hidup, (6) Urusan Pertanian, (7) Urusan Kehutanan, (8) Urusan Kelautan dan Perikanan, (9) Urusan Ketahanan Pangan, (10) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

(11) Urusan Kebudayaan, (12) Urusan Pariwisata, (13) Urusan Pekerjaan Umum, (14) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, (15) Urusan Penataan Ruang, (16) Urusan Pertanahan, (17) Urusan Perumahan, dan (18) Urusan Perhubungan.

Tahapan kedua pembangunan dengan tema "Penguatan Ekonomi Dan Daya Dukung Infrastruktur" memiliki tema dan prioritas tahunan yang menjadi fokus pembangunan daerah yaitu Tahun 2015 dengan tema **"EKONOMI DAN DAYA SAING"** dimana program diprioritaskan pada penguatan ekonomi, iklim investasi serta daya dukung infrakstruktur.

Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Urusan Penanaman Modal, Urusan Perindustrian dan Urusan Pekerjaan Umum. Dimana program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Program Pengembangan Sentra -Sentra Industri Potensial dan Program Pembangunan Infrastruktur.

5.4.3. Tahap Ketiga "PERWUJUDAN MASYARAKAT BATANG SEJAHTERA" (Tahun 2016-2017)

Tahap pemantapan pencapaian masyarakat Kabupaten Batang yang lebih sejahtera diman kebijakan diarahkan pada peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat Batang dari aspek pendidikan dan kesehatan, pemberdayaa n perempuan., pemuda dan anak, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Batang. Adapun urusan yang menjadi fokus prioritas adalah : (1) Urusan Kependudukan dan Capil, (2) Urusan Sosial, (3) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (4) Urusan Ketrasmigrasian, (5) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , (6) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, (7) Urusan Kesehatan, (8) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (9) Urusan Pendidikan, (10) Urusan Perpustakaan, dan (11) Urusan Kearsipan.

Tahapan ketiga pembangunan dengan tema "Perwujudan Masyarakat Batang Sejahtera" memiliki tema dan prioritas tahunan yang menjadi fokus pembangunan daerah yaitu:

a. Tahun 2016 "MASYARAKAT BATANG BERKUALITAS"

Tahun 2016 dengan tema Masyarakat Batang Berkualitas yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada upaya menciptakan masyarakat Batang yang berkualitas.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan dimana program prioritas diantaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

b. Tahun 2017 “MASYARAKAT BATANG SEJAHTERA”

Tahun 2017 dengan tema Masyarakat Batang Sejahtera yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada upaya mewujudkan masyarakat Batang yang sejahtera dan turut serta dalam pembangunan.

Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Adapun program prioritas ditahun ini diantaranya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Batang mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strat egi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (Tahun 2012 -2017) disajikan pada tabel berikut:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

MISI I:Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Misi I Kabupaten Batang

NO	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, baik, bersih, transparan dan adil.	a) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA b) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD c) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	a) Peningkatan kinerja profesionalisme aparatur dan lembaga pemerintah b) Meningkatkan peran serta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah c) Perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terukur d) Meningkatkan sumberdaya perencanaan yang memadai; e) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	a) Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur b) Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif c) Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; d) Peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah; e) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana tahunan maupun lima tahunan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

NO	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang baik, cepat dan transparan serta penguatan Inovasi Daerah	a) Jumlah penyiaran radio/TV lokal b) Web site milik pemerintah daerah	a) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan b) Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan c) Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik d) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana publik e) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	a) Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan b) Mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi pembangunan daerah c) Menjaln kerjasama dengan pihak III dalam penyediaan informasi publik d) Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan
3	Terwujudnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	a) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, b) Kegiatan pembinaan politik daerah c) Jumlah LSM	a) Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara b) Penguatan produk-produk hukum yang berorientasi pada rakyat	a) Menciptakan kondisi masyarakat yang saling menghormati dan toleransi dalam kehidupan yang demokratis b) Peningkatan kapasitas aparatur badan hukum

MISI II:Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 6.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Misi II Kabupaten Batang

NO	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan Investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja	a) Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang b) Jumlah penyerapan tenaga kerja c) Jumlah realisasi nilai investasi d) Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	a) Meningkatkan kemampuan birokrasi untuk bekerja pro investasi, kreatif dan responsive terhadap kebutuhan investor dengan kualitas pelayanan yang memuaskan b) Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru	a) Memberikan kesempatan, kemudahan investor dan masyarakat untuk berinvestasi b) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung investasi daerah c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru
2	Pengembangan Perdagangan dan Industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan	a) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB%) b) Ekspor Bersih Perdagangan c) Pertumbuhan Industri d) Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%), e) Persentase penanganan sampah.	a) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekspor unggulan daerah c) Peningkatan penguasaan iptek sistem produksi dan teknologi industri d) Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan	a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah b) Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat c) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
3	Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan,	a) Nilai tukar petani b) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan perkebunan.	a) Pemanfaatan dan pengalokasian lahan bagi pengembangan produk unggul pertanian dan

NO	TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perikanan dan kelautan mewujudkan ketahanan pangan daerah	c) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis d) Populasi Hewan ternak e) Produksi perikanan Tangkap f) Produksi perikanan Budidaya g) Ketersediaan pangan utama	b) Peningkatan program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh c) Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian dan peternakan d) Penetapan peruntukan lahan pertanian, sawah dan kehutanan e) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kelautan dan perikanan f) Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan g) Peningkatan kreativitas dan keanekaragaman pengolahan pangan	perkebunan b) Peningkatan peran kelembagaan petani/ perkebunan masyarakat dan penyuluh c) Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk ternak d) Pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan e) Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk perikanan f) Peningkatan pemerataan akses sarana distribusi dan sarpras produksi
4	Meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata	a) Persentase koperasi aktif b) Usaha Mikro dan Kecil c) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB d) Obyek Wisata yang ditangani e) Penyelenggaraan festival seni dan budaya	a) Pemberdayaan IKM dan Koperasi berbasis masyarakat b) Pengembangan dan pengenalan seni budaya lokal c) Peningkatan intensitas parade budaya lokal d) Meningkatkan daya tarik investasi dan kemitraan kepariwisataan	a) Meningkatkan kualitas produk industri kecil yang berbasis potensi lokal b) Meningkatkan budaya dan kesenian lokal yang budi luhur sebagai citra masyarakat Batang c) Mengembangkan pariwisata sebagai sarana rekreasi, pendidikan dan perekonomian daerah

MISI III: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat .

Tabel 6.3.

Strategi dan Arah Kebijakan Misi III Kabupaten Batang

NO	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah	a) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik b) Ketaatan terhadap RTRW, c) Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB d) Luas irigasi dalam kondisi baik	a) Pendanaan tahun jamak untuk peningkatan pembangunan infrastruktur b) Pembangunan, rehabilitasi jalan dan jembatan c) Pembangunan, rehabilitasi irigrasi, drainase dan gorong gorong d) Penetapan prioritas kawasan strategis dan cepat tumbuh e) Membuka akses dan konektivitas antar daerah/ desa terisolir f) Pemanfaatan SDA dengan memperhatikan daya dukung lingkungan g) Penetapan rencana tata ruang RDRK dan RTRW h) Pengelolaan dan penyelesaian tanah yang bersengketa	a) Meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi, drainase serta gorong gorong dalam menopang perekonomian b) Pengembangan wilayah strategis yang mempunyai dampak ekonomi yang luas c) Meningkatkan kualitas pekerjaan jasa konstruksi d) Peningkatan kerjasama dengan asosiasi dalam pembangunan infrastruktur e) Penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung f) Peningkatan Ketertiban, Kecerahan pembangunan dan penataan ruang g) Proaktif dalam pengelolaan dan penyelesaian administrasi pertanahan
2	Pengembangan wilayah pemukiman penduduk dan	a) Rumah tangga pengguna air bersih	a) Pengembangan perumahan rakyat b) Penetapan zonasi ruang	Pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang sehat dan

PERUBAHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	perumahan layak huni	b) Rumah layak huni c) Rumah tangga bersanitasi	pemukiman	nyaman
3	Pengembangan dan pemerataan sarana perhubungan dan transportasi publik	a) Rasio ijin trayek b) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, c) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Jumlah Kendaraan)	a) Pengembangan dan pemeliharaan kuantitas dan kualitas pelabuhan b) Pembinaan arah dan penyediaan transportasi publik yang memadai	a) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan, darat, terminal b) Pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas

MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Tabel 6.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV Kabupaten Batang

NO	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial	a) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, b) PMKS yg memperoleh bantuan sosial, c) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, d) Cakupan peserta KB aktif, e) Kepemilikan KTP f) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	a) Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang komprehensif b) Efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran kesejahteraan sosial c) Optimalisasi sarana prasarana kesejahteraan sosial d) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesadaran keluarga berencana e) Revitalisasi dan pemaksimalan upaya program KB f) Pemerataan kesejahteraan rakyat melalui transmigrasi	a) Pengadministrasian yang baik masyarakat Batang mulai dari kelahiran dan kepemilikan KTP b) Meningkatkan Pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial c) Sinkronisasi dan efisiensi pendanaan kesejahteraan sosial d) Perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I e) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ketransmigrasian
2	Meningkatkan kualitas dan peran perempuan, dan kepemudaan, dan keolahragaan dalam aspek kehidupan masyarakat	a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, b) Jumlah kegiatan kepemudaan, c) Jumlah kegiatan olahraga.	a) Mensinergikan aktivitas stake holder dalam pengarusutamaan gender b) Penyelesaian kasus dan perlindungan perempuan dan anak c) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan d) Meningkatkan pembinaan bakat	a) Meningkatkan sinergitas aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender b) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peran dan partisipasi

NO	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			untuk meningkatkan prestasi olah raga e) Penyediaan sarana prasarana olahraga	pemuda dalam pembangunan d) Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang olah raga secara kuantitatif dan kualitatif e) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga yang memadai
3	Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	a) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup, b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup,	a) Meningkatkan gizi masyarakat dan status kesehatan b) Meningkatkan kesadaran budaya hidup sehat dan bersih (BHSD) c) Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas pelayanan institusi kesehatan d) Optimalisasi sarana prasarana kesehatan e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas keterampilan dan tenaga medis f) Meningkatkan program Jampermas (Jaminan Persalinan Massal)	a) Meningkatkan perlindungan terhadap peserta Jamkesda b) Sinkronisasi pendanaan kesehatan c) Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin d) Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan rumah sakit umum daerah e) Menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu/ lansia
4	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan	a) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), b) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK,	a) Peningkatan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan b) Perluasan peran dan kewenangan desa / kelurahan	a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.

NO	TUJUAN	SASARAN/INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dengan standar layanan prima	a) APM/ APK PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, b) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, c) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, d) Pengelolaan arsip secara baku.	a) Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat pada semua jenjang pendidikan b) Memperkuat kualitas aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola dan tata nilai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan prima bagi masyarakat Kabupaten Batang; c) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui informasi dan peran perpustakaan d) Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan	a) Penyelenggaraan dan peningkatan pendidikan yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan pada semua jenjang pendidikan. b) Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan: c) Peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan d) Menumbuhkan dan mengembangkan budaya baca masyarakat e) Penyediaan arsip dan dokumentasi daerah dan keterbukaan informasi publik f) Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai manajemen layanan prima pendidikan.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Batang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

7.1 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum memberikan gambaran strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Dengan rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Batang menurut masing-masing misi adalah sebagai berikut:

7.1.1. Kebijakan Umum Misi Pertama

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi pertama “Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima”, maka

PERUBAHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada pembinaan birokrasi pemerintahan, peningkatan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien yang berkinerja tinggi, serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima demi terciptanya kepuasan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Pertama adalah:

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah & Persandian.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
3. Urusan Komunikasi dan Informatika
4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
5. Urusan Statistik

7.1.2. Kebijakan Umum Misi Kedua

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi kedua "Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah", maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada penciptaan iklim investasi daerah yang didukung oleh birokrasi pemerintahan yang responsif dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dengan maksimal (perdagangan industri, kelautan, perikanan, pertanian, dan kehutanan) dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru dan ketahanan pangan daerah.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Kedua adalah:

1. Urusan Penanaman Modal
2. Urusan Ketenagakerjaan
3. Urusan Perindustrian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Pertanian
7. Urusan Kehutanan
8. Urusan Kelautan dan Perikanan
9. Urusan Ketahanan Pangan
10. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Kebudayaan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

12. Urusan Pariwisata**7.1.3. Kebijakan Umum Misi Ketiga**

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi ketiga “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang mendukung perkembangan perekonomian daerah dengan konektivitas antar daerah yang baik.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Ketiga adalah:

1. Urusan Pekerjaan Umum
2. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam
3. Urusan Penataan Ruang
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Perumahan
6. Urusan Perhubungan

7.1.4. Kebijakan Umum Misi Keempat

Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi keempat “Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan”, maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Batang dari aspek pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batang.

Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Keempat adalah:

1. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Urusan Sosial
3. Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
4. Urusan Ketransmigrasian
5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
7. Urusan Kesehatan
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9. Urusan Pendidikan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

10. Urusan Perpustakaan
11. Urusan Kearsipan

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah menetapkan kebijakan umum maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah Kabupaten Batang. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Program pembangunan daerah Kabupaten Batang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Batang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis. Program pembangunan daerah Kabupaten Batang sebagai berikut:

7.2.1 Program Pembangunan Daerah Menurut Misi

7.2.1.1. Program Pembangunan Misi I

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
4. Program Peningkatan Pelayanan KDH/ WKDH,
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,
6. Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan,
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ,
8. Program Pengembangan Data/Informasi ,
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ,
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik ,

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

11. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi,
12. Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,
13. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
14. Program Peningkatan Kehidupan Beragama.
15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.2.1.2. Program Pembangunan Misi II

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja,
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial,
8. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional,
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
10. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
11. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12. Program Perlindungan dan Konservasi SDA,
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
14. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,
15. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,
16. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan,
17. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap,
19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
20. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
21. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan,
22. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
23. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan,
24. Program Peningkatan Ketahanan Pangan,
25. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
26. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

27. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah,
28. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
29. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,
30. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
31. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

7.2.1.3. Program Pembangunan Misi III

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya,
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong,
5. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan,
7. Program Perencanaan Tata Ruang,
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,
10. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan,
11. Program Lingkungan Sehat Perumahan,
12. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan,
13. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
14. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,
15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,
16. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

7.2.1.4. Program Pembangunan Misi IV

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan,
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
5. Program Keluarga Berencana,

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

6. Program Pelayanan Kontrasepsi ,
7. Program pengembangan kawasan transmigrasi ,
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan ,
9. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan ,
10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ,
11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga ,
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ,
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ,
14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ,
15. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata ,
16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ,
17. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ,
18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa ,
19. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ,
20. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan ,
21. Program Pendidikan Anak Usia Dini ,
22. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ,
23. Program Pendidikan Menengah ,
24. Program Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus ,
25. Program Pendidikan Non Formal ,
26. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ,
27. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan ,
28. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan ,
29. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

7.2.2 Program Pembangunan Daerah Menurut Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tidak terkecuali penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Batang yang juga harus mengacu pada KLHS. Hasil Kajian KLHS tersebut, maka dirumuskan mitigasi dan/atau alternatif yang dapat diajukan sebagai pertimbangan dalam kerangka mengurangi atau meniadakan dampak atas pembangunan berkelanjutan dimaksud. Berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif selanjutnya disusun rekomendasi untuk penyempurnaan atau perbaikan kebijakan, rencana dan Program (KRP). Proses perumusan rekomendasi tersebut merupakan langkah akhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Batang. Hasil rumusan rekomendasi dijadikan sebagai dasar untuk penyempurnaan KRP. Dalam konteks Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 rumusan rekomendasi diintegrasikan dalam penyempurnaan Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 untuk kemudian menjadi Perda. Berikut ini hasil rumusan Rekomendasi KRP untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

Tabel 7.1
Mitigasi dan/atau Alternatif serta Rekomendasi
dalam Perbaikan Kebijakan, Rencana dan Program
Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
1.	Program Pembangunan Misi I			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilakukan secara proporsional dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilakukan melalui pembiayaan yang proporsional untuk pelayanan masyarakat
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip saling keterkaitan antara wilayah hulu dan hilir, prinsip keseimbangan/pemerataan antara nilai kearifan local social budaya dan mekanisme pasar serta prinsip keadilan antarkelompok masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan melalui perencanaan partisipatif, metode dan data serta informasi yang didukung oleh sumber daya dan peralatan serta mekanisme memadai	Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip keterkaitan, keseimbangan dan keadilan

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
	Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	Tindakan pengendalian dilakukan dengan penegakan aturan secara persuasif Pemberian kompensasi/insentif dan disinsentif secara proporsional	Penguatan ekonomi masyarakat sebagai sumber alternatif	Penataan dan pengendalian program pembangunan dilakukan dengan penegakan aturan dan pemberian insentif/disinsentif serta penguatan ekonomi masyarakat
	Pengembangan Data/Informasi	Penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas infrastruktur Penyiapan perangkat yang mendukung sistem kelembagaan/ pranata sosial		Pengembangan data/informasi dilakukan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur, SDM pendukung kelembagaan
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas infrastruktur Penyiapan perangkat yang mendukung sistem kelembagaan/ pranata sosial		Pengembangan data/informasi dilakukan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur, SDM pendukung kelembagaan
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas infrastruktur Penyiapan perangkat yang mendukung sistem kelembagaan/ pranata sosial		Pengembangan data/informasi dilakukan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur, SDM pendukung kelembagaan
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas infrastruktur Penyiapan perangkat yang mendukung sistem kelembagaan/ pranata sosial		Pengembangan data/informasi dilakukan melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur, SDM pendukung kelembagaan
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak	Dengan penegakan aturan secara persuasif	Pemberdayaan social ekonomi masyarakat	Pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
	Kriminal			criminal dilakukan dengan penegakan aturan hokum bersama dengan pemeberdayaan masyarakat
2.	Program Pembangunan Misi II			
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengenaan persyaratan umum AMDAL, UKL, UPL dalam pelaksanaan kegiatan	Pengaturan mengenai arahan pengembangan pada wilayah yang didorong pertumbuhannya dengan ketentuan skala, lokasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang ada	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dilakukan dengan pengenaan persyaratan umum pembangunan dan arahan pengembangan wilayah
	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pengenaan persyaratan umum AMDAL, UKL, UPL dalam pelaksanaan kegiatan	Pengaturan mengenai arahan pengembangan pada wilayah yang didorong pertumbuhannya dengan ketentuan skala, lokasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang ada	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dilakukan dengan pengenaan persyaratan umum pembangunan dan arahan pengembangan wilayah
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengenaan persyaratan umum AMDAL, UKL, UPL dalam pelaksanaan kegiatan	Pengaturan mengenai arahan pengembangan pada wilayah yang didorong pertumbuhannya dengan ketentuan skala, lokasi disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang ada	Peningkatan promosi dan kerja sama investasi dilakukan dengan pengenaan persyaratan umum pembangunan dan arahan pengembangan wilayah
	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Mewajibkan sentra industry melakukan pemeliharaan lingkungan dan dilakukan dalam satu system kelola yang terintegrasi dalam bentuk kawasan industri	Pengembangan sentra industry pada wilayah yang dekat dengan bahan baku	Pengembangan sentra-sentra industri potensial dilakukan dengan pemeliharaan lingkungan berbentuk kawasan dan dekat dengan bahan baku

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kewajiban menggunakan tenaga kerja lokal dalam proses produksi (padat karya) Kewajiban penarapan SNI pada produk impor	Pengembangan infrastruktur berbasis peningkatan daya saing daerah pada kawasan tertinggal Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kerja sama perdagangan internasional dilakukan dengan memanfaatkan potensi local, menerapkan SNI dan peningkatan daya saing
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kewajiban menggunakan tenaga kerja lokal dalam proses produksi (padat karya) Penggunaan teknologi ramah lingkungan	Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan kemampuan teknologi industri dilakukan dengan pemanfaatan ekonomi local dan ramah lingkungan
	Perlindungan dan Konservasi SDA	Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi	Diversifikasi usaha dan kerjasama pemanfaatan kawasan	Perlindungan dan konservasi SDA dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan diversifikasi usaha
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Teknik konservasi yang memperbanyak tutupan lahan dan memperkuat perakaran	Mengenakan insentif ekonomi bagi aktivitas yang prokonservasi Mengenakan disinsentif ekonomi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindakan konservasi pada tahap praproduksi, produksi dan pascaproduksi	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan dengan teknik konservasi , pengenaan insentif/ disinsentif ekonomi
	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi	Mengenakan insentif ekonomi bagi aktivitas yang prokonservasi Mengenakan disinsentif ekonomi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindakan	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengenaan insentif/disinsentif

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
			konservasi pada tahap praproduksi, produksi dan pascaproduksi	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi	Mengenakan insentif ekonomi bagi aktivitas yang prokonservasi Mengenakan disinsentif ekonomi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindakan konservasi pada tahap praproduksi, produksi dan pascaproduksi Diversifikasi usaha dan kerjasama pemanfaatan kawasan	Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan penebaran insentif/disinsentif serta diversifikasi usaha
	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Zonasi penangkapan berdasarkan klasifikasi perahu, modal usaha Ketentuan penggunaan alat	Diversifikasi usaha perikanan untuk menahan laju peningkatan pelaku ekonomi di perairan yang sudah kelebihan kapasitas	Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan zonasi penangkapan dan diversifikasi usaha
	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Zonasi perikanan budidaya dengan penggunaan teknologi produksi	Penerapan konsep minapolitan untuk menciptakan nilai tambah perikanan budidaya	Pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya dilakukan dengan system zonasi dan konsep minapolitan
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Penguatan pranata social melalui pembuatan aturan-aturan (pengaturan) yang melibatkan masyarakat secara luas sehingga efektif dilaksanakan		Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui penguatan pranata social yang melibatkan masyarakat

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
				setempat
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian melalui perlindungan/ zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diperkuat dengan insentif pertanian, system informasi lahan pertanian, pemberdayaan petani dan pembiayaan pertanian	Diversifikasi pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan nilai tambah	Peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta rehabilitasi
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan budaya dilakukan dengan dilandasi prinsip integrasi dalam system aktivitas ekonomi yang dinamis berkembang	Pemberian kompensasi dan insentif bagi masyarakat dan pelaku pelestari budaya	Pengelolaan kekayaan budaya dilakukan dengan keseimbangan antara upaya pelestarian dalam situasi yang dinamis/berubah
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan promosi, pemasaran, penataan kelembagaan, infrastruktur dari daya tarik wisata yang dikembangkan pada suatu destinasi memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengembangan wisata alternative berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya local	Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan pola wisata alternative yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan promosi, pemasaran yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan daya tarik wisata	Pengembangan wisata alternative berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya local	Pengembangan pemasaran pariwisata dilakukan dengan pola wisata alternative yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3.	Program Pembangunan Misi III			
	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Membangun model/konstruksi jalan yang meminimalkan penggunaan lahan sawah Membangun konstruksi jalan yang tetap menyatukan suatu komunitas masyarakat agar tidak terpisah	Mengubah trase jalan dan lokasi jembatan disesuaikan dengan kondisi fisik, social lingkungan	Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lahan pertanian pangan, dan kesatuan social masyarakat di sekitarnya
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan	Membangun model/konstruksi	Mengubah trase dan lokasi	Pengembangan dan pengelolaan

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
	Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang meminimalkan kerusakan keanekaragaman hayati	disesuaikan dengan kondisi lingkungan	jatringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dilakukan dengan meminimalkan kerusakan keanekaragaman hayati
	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pengembangan kawasan cepat tumbuh dilandasi upaya untuk menggerakkan kawasan di sekitarnya secara integrative dalam satu kesatuan Pengembangan kawasan cepat tumbuh dilakukan dengan memperhatikan insentif dan disinsentif kawasan	Zonasi kawasan cepat tumbuh dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakuan dengan memperhatikan integrasi antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pinggiran
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan drainase/gorong-gorong dilakukan satu kesatuan dengan pembangunan jaringan jalan	Menyusun masterplan drainase perkotaan	Pembangunan saluran drainase memperhatikan masterplan drainase yang ada
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan turap/talud/bronjong dilakukan satu kesatuan dengan pembangunan jaringan lainnya dalam kerangka pengendalian bencana (banjir/tanah longsor)	Relokasi orang terkena dampak	Pembangunan turap/talud/bronjong dilakukan satu kesatuan dengan pembangunan jaringan lainnya dalam kerangka pengendalian bencana (banjir/tanah longsor)
	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Zonasi wilayah pertambangan Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan pertambangan	Mengenakan insentif ekonomi bagi aktivitas yang prokonservasi Mengenakan disinsentif ekonomi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindakan konservasi pada tahap praproduksi, produksi dan pascaproduksi	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dilakukan dengan prinsip zonasi dan pemberdayaan serta mekanisme insentif/disinsentif

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
			Diversifikasi usaha dan kerjasama pemanfaatan kawasan pertambangan	
	Perencanaan Tata Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang berupa pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terus menerus pada perangkat daerah maupun masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan melalui perencanaan partisipatif, metode dan data serta informasi yang didukung oleh sumber daya dan peralatan serta mekanisme memadai	Perencanaan tata ruang dilakukan dengan pola penyelenggaraan yang bersifat menerus, komprehensif
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penerapan peraturan zonasi secara proporsional, transparan dan partisipatif Tindakan pengendalian dilakukan dengan penegakan aturan secara persuasif Pemberian kompensasi/insentif dan disinsentif secara proporsional	Penguatan ekonomi masyarakat terkena dampak pengendalian pemanfaatan ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan penerapan peraturan zonasi secara proporsional
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tindakan pengendalian dilakukan dengan penegakan aturan secara persuasif Pemberian kompensasi/insentif dan disinsentif secara proporsional	Penguatan ekonomi masyarakat terkena dampak pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan dengan ketentuan aturan yang berlaku dan penguatan ekonomi bagi masyarakat/orang terkena dampak pembangunan
	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Tindakan pengendalian dilakukan dengan penegakan aturan secara persuasif Pemberian kompensasi/insentif	Penguatan ekonomi masyarakat terkena dampak pengendalian Permukiman kembali bagi	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilakukan dengan penegakan hukum yang konsisten dan pemberian komepensasi serta

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
		dan disinsentif secara proporsional	orang terkena dampak	penguatan ekonomi dan permukiman kembali
	Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan	Membangun model/konstruksi prasarana dan sarana perhubungan yang meminimalkan penggunaan lahan sawah Membangun konstruksi prasarana dan sarana perhubungan yang tetap menyatukan suatu komunitas masyarakat agar tidak terpisah	Mengubah spek prasarana dan sarana perhubungan disesuaikan dengan kondisi fisik, social lingkungan	Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan dengan konstruksi yang meminimalkan penggunaan lahan produktif dan perubahan spesifikasi
	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Peningkatan upaya pengendalian kerusakan jalan dengan pengawasan moda kendaraan secara berkala, pembatasan tonaseaktivasi jembatan timbang dan sistem kelolanya	Pengenaan pajak jalan	Peningkatan pelayanan angkutan dilakukan dengan peningkatan pengendalian kerusakan jalan dan pendekatan pajak
4.	Program Pembangunan Misi IV			
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penguatan peraturan yang bersifat <i>affirmative policy</i> bagi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk beraktivitas Pemberian jaminan social bagi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan dan komunikasi	Pemberdayaan fakir miskin, komunita adat terpencil serta PMKS dilakukan dengan kebijakan keberpihakan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat
	Keluarga Berencana		Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan dan komunikasi	Peningkatan keluarga berencana dilakuan dengan pelibatan tokoh agam dan tokoh masyarakat
	Pelayanan Kontrasepsi	Pengaturan dalam peredaran dengan memperhatikan ketentuan norma masyarakat		Pelayanan kontrasepsi dilakukan melalui peredaran yang normative
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan	Penguatan peraturan yang bersifat	Pelibatan tokoh agama dan tokoh	Peningkatan peran serta dan

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
	Jender dalam Pembangunan	<i>affirmative policy</i> bagi perempuan untuk beraktivitas	masyarakat dalam pembinaan dan komunikasi	kesetaraan jender dalam pembangunan dilakukan melalui kebijakan keberpihakan dengan meibatkan semua komponen
	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Penguatan peraturan yang bersifat <i>affirmative policy</i> bagi perempuan untuk beraktivitas Peningkatan ketrampilan dan diversifikasi usaha	Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan dan komunikasi	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilakukan melalui kebijakan keberpihakan dengan meibatkan semua komponen
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Penguatan peraturan yang bersifat <i>affirmative policy</i> bagi pemuda untuk beraktivitas Peningkatan ketrampilan	Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pembinaan dan komunikasi	Peningkatan peran serta kepemudaan melalui kebijakan keberpihakan dengan meibatkan semua komponen
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pengadaan dan pembangunan dilakukan pada lokasi yang sesuai menurut tata ruang		Peningkatan sarana dan prasaran olah raga berpedoman pada tata ruang
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pengadaan dan pembangunan dilakukan pada lokasi yang sesuai menurut tata ruang		Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana berpedoman pada tata ruang
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan program padat karya	Peningkatan inovasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui peningkatan program padat karya dan inovasi
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Diversifikasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah	Pembukaan akses modal, akses pasar, akses teknologi bagi produk unggulan desa	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dilakukan dengan diversifikasi usaha dan pembukaan akses untuk produk perdesaan
	Pendidikan Menengah	Pemetaan kebutuhan sekolah sesuai rentang kendali pelayanan pendidikan	Jaminan social untuk dapat meraih pendidikan menengah	Pendidikan menengah dilakukan dengan pemetaan kebutuhan berbasis rentang kendali

No.	Kebijakan, Rencana dan Program	Mitigasi	Alternatif	Rekomendasi
				pelayanan pembangunan
	Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus	Pemetaan sekolah berkebutuhan khusus	Jaminan social untuk dapat meraih pendidikan berkebutuhan khusus	Pendidikan luar bias/pendidikan khusus dilakukan melalui pemetaan kebutuhan berbasis rentang kendali pelayanan pembangunan

Sumber : Analisis Penyusun KLHS, 2014

Berdasarkan analisis KLHS tersebut di atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD tersebut, tetapi untuk melakukan kajian guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam Review RPJMD Kabupaten Batang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, KLHS dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batang memenuhi prinsip saling ketergantungan (*interdependency*), prinsip keseimbangan (*equilibrium*), dan prinsip keadilan (*justice*).

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab ini akan disajikan uraian hubungan urusan yang dilaksanakan berbasis misi dengan SKPD terkait dengan program yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan (2017) yang dibandingkan dengan pencapaian indikator target pada awal periode perencanaan (2012).

Adapun indikasi rencana program prioritas dirumuskan secara lebih sistematis disertai informasi tentang indikator tahunan dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana tercantum dalam matriks berikut ini:

PERUBAHAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Batang periode tahun 2012 – 2017. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Kewajiban pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Ketiga aspek indikator kinerja daerah Kabupaten Batang yang disusun menurut urusan dirumuskan secara sistematis dan dituangkan dalam Matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD				Target Capaian Tiao Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017			2012	2013	2014	2015		
ASPEK KEBERANTERAN MASYARAKAT																
Fokus Kesetaraan dan Pemberdayaan																
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perencanaan																
1.1.	Pertumbuhan PDR	%	5,02	5,17	5,40	5,50	5,60	5,70			5,70				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda
1.3	PORE per kapita	%	3,65	3,96	4,27	4,58	4,89	5,12			5,12				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda
1.4	Indeks Gini		0,3051	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30			0,30				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda
Fokus Kesetaraan Masyarakat																
1. Pendidikan																
1.1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	%	99,20	99,80	99,90	100,00	100,00	100,00			100,00				Program Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIKPORA
1.2	Angka Melek Huruf	Tahun	6,20	6,70	6,80	6,90	7,00	7,20			7,20				Program Pendidikan Non Formal	DISDIKPORA
1.3	Angka Partisipasi Kasar	%	102,10	104,10	104,50	104,75	104,85	105,00			105,00				Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA
	a. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket	%	87,85	90,50	91,75	93,00	94,00	95,00			95,00				Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA
	b. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/P	%	35,90	43,35	46,50	49,22	52,25	55,00			55,00				Program Pendidikan Menengah	DISDIKPORA
1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	61,29	42,65	45,12	48,56	50,12	52,00			52,00				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA
	a. Jenjang SD/Sejarah	%	21,38	13,12	14,18	16,11	18,12	20,00			20,00				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA
	b. Jenjang SMP/Sejarah	%	9,16	7,90	8,18	8,50	9,09	9,20			9,20				Program Pendidikan Menengah	DISDIKPORA
1.5	Angka Partisipasi Murni	%	86,55	91,15	92,10	93,64	94,16	95,00			95,00				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA
	a. Angka Partisipasi Murni SD/MTs/Paket A	%	61,95	70,12	75,63	78,15	80,68	82,66			82,66				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA
	b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket	%	29,91	39,15	41,75	43,14	47,88	50,00			50,00				Program Pendidikan Menengah	DISDIKPORA
2. Kesehatan																
2.1	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,30	70,50	70,65	70,70	70,75	70,80			70,80				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	DINKES
2.2	Keluarga sadar gizi	%	28,52%	40%	60%	70%	72%	75%			75%				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES
3. Pertanian																
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	%	56,83	57,3	61,57	63,29	65,01	66,73			66,73				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DPKKAD
4. Ketanagakerjaan																
4.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	47,48	49,85	52,35	54,96	57,71	60,60			60,60				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DISNAKERTRANS
Fokus Seni Budaya dan Olahraga																
1. Kebudayaan																
1.1	Jumlah grup kesenian	Buah	489	489	489	489	489	489			489				Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	DISBUDPAR

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Tercapai Sasaran Tita Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017												
2. Pemuda dan Olahraga																				
2.1	Jumlah Klub Olahraga	Buah	225	230	240	245	245	250					250			Program Pembinaan dan Penguatan Olahraga	DISDIKPORA			
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Buah	3	4	4	4	5	5					5			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISDIKPORA			
ASPEK PELAYANAN UMUM																				
Fokus Layanan Umum Wajib																				
1. Pendidikan																				
1.1	Pendidikan Dasar																DISDIKPORA			
	a. Angka Partisipasi Sekolah	%	102.10	102.05	102.55	102.80	103.05	103.30					103.30			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA			
	Janjang SD/Sederajat	%	865.47	901.00	921.00	936.40	941.60	950.00					950.00			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA			
	Janjang SMP/Sederajat	%	607.91	651.00	701.20	781.50	806.80	826.60					826.60			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA			
	b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	%	57.75	56.21	53.64	52.78	51.08	50.00					50.00			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA			
	c. Rasio Guru/Murid	%	616.15	657.41	722.23	754.64	787.05	819.46					819.46			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA			
	d. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	%	45.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKPORA			

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tias Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.2	Pendidikan Menengah	%																	
	a. Angka Partisipasi Sekolah	%	373.80	391.50	417.50	431.40	478.98	500.00					500.00						DISDIKPORA
	b. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	9.87	10.19	10.51	10.83	11.15	11.47					11.47						DISDIKPORA
	c. Rasio guru terhadap murid	%	672.36	672.36	672.36	672.36	672.36	672.36					672.36						DISDIKPORA
	d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99					1.99						DISDIKPORA
1.3	a. Pendidikan dasar yang berusia > 15 tahun	%	99.20	99.80	99.90	100.00	100.00	100.00					100.00						DISDIKPORA
	Penilaian Pendidikan																		DISDIKPORA
	a. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bang	%	98.72	98.72	98.72	98.72	98.72	98.72					98.72						DISDIKPORA
	b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SH/MA kondisi bangunan baik	%	94.74	94.74	94.74	94.74	94.74	94.74					94.74						DISDIKPORA
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini		51.71	51.71	51.71	51.71	51.71	51.71					51.71						DISDIKPORA
1.4	Angka Putus Sekolah SD/MT	%	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22					0.22						DISDIKPORA
	a. Anak Putus Sekolah SD/MT	%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50					0.50						DISDIKPORA
	b. Anak Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78					0.78						DISDIKPORA
	c. Anak Putus Sekolah SMA/SH/MA	%	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76					99.76						DISDIKPORA
	Angka Kelulusan SD/MI	%	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76					99.76						DISDIKPORA
1.5	a. Anak Kelulusan SD/MI	%	97.11	97.11	97.11	97.11	97.11	97.11					97.11						DISDIKPORA
	b. Anak Kelulusan SMP/MTs	%	99.58	99.58	99.58	99.58	99.58	99.58					99.58						DISDIKPORA
	c. Anak Kelulusan SMA/SH/MA	%	104.36	104.36	104.36	104.36	104.36	104.36					104.36						DISDIKPORA
	d. Anak Kelulusan SMA/SH/MA	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17					61.17						DISDIKPORA
1.6	a. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke SM	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA
	b. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke SMA/SH/MA	%	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17					61.17						DISDIKPORA
	c. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke D4	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA
	d. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S1	%	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17					61.17						DISDIKPORA
	e. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S2	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA
1.7	a. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S1/D4	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA
	b. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S1/D4	%	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17					61.17						DISDIKPORA
	c. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S1/D4	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA
	d. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S1/D4	%	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17	61.17					61.17						DISDIKPORA
	e. Anak Kelulusan dari SMP/MTs ke S1/D4	%	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18					51.18						DISDIKPORA

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tiga Tahun 2013-2015					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
2. Kesehatan																			
2.1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	%		182	150	148	145	13	142					142		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.2	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%		93.93%	94.00%	95%	96%	97%	97.50%					97.50%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.3	Cakupan pelayanan nifas	%		94.50%	95.34%	96%	97%	97.50%	98%					98%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%		90%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					100%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%		95.16%	97.58%	98%	98.50%	100%	100%					100%		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES		
	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	%		100%	100%	100.00%	100%	100%	100%					100%		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES		
2.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%		94%	95%	96%	96.50%	97%	97.50%					97.50%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.6	Cakupan peserta aktif KB	%		80%	81.08%	81.50%	82%	82.50%	83%					83%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup			15	14.85	13	12.5	12	11.5					11.5		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.8	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			18.50	18.12	17	16.50	16	15.50					15.50		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%		80%	99%	99.45%	99.50%	99.55%	99.60%					99.60%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.10	Cakupan kunjungan bayi			95.00%	96%	97.00%	97.50%	98.00%	98.50%					98.50%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.11	Cakupan pelayanan anak Balita	%		83%	83.17%	84%	85%	86%	87%					87%		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES		
2.12	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan selanjutnya	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES		
2.13	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	%		100%	100%	100.00%	100%	100%	100%					100%		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES		
2.14	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan) keluar rumah	%		2.53%	3.19%	3.50%	4.50%	5.50%	6.50%					6.50%		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES		
2.15	Keluarga sadar gizi	%		40%	50%	60%	70%	72%	75%					75%		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES		
2.16	Cakupan Desa Siga Aktif	%		71%	72%	100%	100%	100%	100%					100%		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES		
2.17	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%		95.16%	97.58%	98%	98.50%	100%	100%					100%		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES		
2.18	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun			≥2/100.000	≥2/100.000	>2/100.000	>2/100.000	>2/100.000	>2/100.000					>2/100.000		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES		
2.19	Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR)	%		75%	76.0%	77%	78%	79%	80%					80%		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES		
2.20	Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure)	%		88%	88.5%	89%	89.5%	90%	90%					90%		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES		
2.21	Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	%		28%	30%	35%	45%	50%	55%					55%		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES		
2.22	Incident rate DBD			<2/ 10.000	<2/ 10.000	<2/10.000	<2/10.000	<2/10.000	<2/10.000					<2/10.000		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES		

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	SIDANG URUSAN/INDIKATOR	Sasaran %	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD 100%	Tercapainya Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD 100%	Program Prioritas	SKPD terkait
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		
2.23	Penderita DBD yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.24	CFR/Angka kematian DBD	%	0	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.25	Cakupan pelayanan diare yang ditangani	%	100%	43%	48%	50%	60%	70%	80%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.26	CFR/Angka kematian Diare	%	0	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	<0,001%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.27	Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.28	Klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.29	Prevalensi penderita kusta	%	0,45/ 10.000	<1/ 10.000	<1/ 10.000	<1/10.000	<1/10.000	<1/10.000	<1/10.000	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.30	Penderita kusta yang selesai berobat (RPT rate)	%	87%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES
2.31	Penderita malaria yang diobati	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DIKNES

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan %	Tingkat Capaian Tercapai Tahun					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	100%		
2.32	Kerus Filarisis yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES
2.33	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masvaralat.miskin	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
2.35	Rasio dokter spesialis per 100.000 Penduduk		2	2	2	2	2	2	2	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah Sakit Mata	DINKES
2.36	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk		10	9.5	10	10.5	11	11.5	11.5	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah Sakit Mata	DINKES
2.37	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk		1.5	1.5	1.5	1.7	2	2.5	2.5	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah Sakit Mata	DINKES
2.38	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	%	69	74	75	80	85	90	90	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah Sakit Mata	DINKES
2.39	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	%	71	71	73	75	77	79	79	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah Sakit Mata	DINKES
3	Pelayanan Umum										
3.1	Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	%	66.71%	71.60%	78.27%	80.05%	83.17%	83.17%	83.17%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Bawa dan Jernang Pengaliran Jalannya	DBMSDA
3.2	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	M2	15.000	16.100	17.600	18.000	18.700	18.700	18.700	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Bawa dan Jernang Pengaliran Jalannya	DBMSDA
3.3	Luas Seluruh irigasi Kabupaten	M2	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485	22.485	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Bawa dan Jernang Pengaliran Jalannya	DBMSDA
3.4	Panjang Jalan Desa Dalam Kondisi Baik	%	30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	DBMSDA
3.5	Panjang Jalan Desa Dalam Kondisi Baik	Km	149	211.2	264	316.79	369.59	369.59	369.59	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	DBMSDA
3.6	Jumlah Panjng seluruh Jalan Desa	Km	497	527.99	527.99	527.99	527.99	527.99	527.99	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	DBMSDA
3.7	Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Km	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.8	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	434.65	463.62	492.6	521.58	550.55	550.55	550.55	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Target Capaian Tiga Tahun					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015		
3.9	Penjang Jalan Seluruhnya	Km	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.10	Jumlah Panjang Jalan	Km	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	579.53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.11	Penjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/jam)	Km	65%	68%	70%	75%	80%	80%	65%	68%	70%	80%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.12	Penjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik	Km	290	305	315	338	360	360	290	305	315	360	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.13	Penjang Seluruh Jalan Kab. Diderah tab	Km	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.14	Penjang seluruh jalan kabupaten (km)	Km	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DBMSDA
3.15	Persentase rumah tinggal bersantasi	%	46.20	46.20	47.12	47.12	48.06	48.06	45.29	46.20	47.12	48.06	Program Ungkungan Sehat	Dinkes, DCKTRKESDM
3.16	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DCKTRKESDM
3.17	Rasio rumah layak huni	%	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.17	0.17	0.17	0.22	Program Ungkungan Sehat	DCKTRKESDM
3.18	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	32.01%	32.81%	33.63%	34.47%	35.33%	36.21%	33%	32.01%	32.81%	35.33%	Program Pembangunan Saluran Drainase / Goreng-Gorong	DCKTRKESDM
3.19	Lingkungan Pemukiman	%	15.36	17.59	19.82	22.05	24.28	26.51	13.13	15.36	17.59	24.28	Program Pemberdayaan Komunitas	DCKTRKESDM
	Tersedianya air ingasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	100.00%	100.00%	64.00%	66.00%	68.00%	70.00%	100%	100.00%	64.00%	70.00%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	DBMSDA
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	DBMSDA
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	DBMSDA
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	%	24.00%	35.00%	50.00%	55.00%	58.00%	60.00%	24%	24.00%	35.00%	60%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	DBMSDA
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	%	24.00%	35.00%	50.00%	55.00%	58.00%	60.00%	24%	24.00%	35.00%	60%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	DBMSDA
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	%	24%	35%	50.00%	55.00%	58.00%	60.00%	24%	24%	35%	60%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	DBMSDA

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bawang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG USUBAN/INDIKATOR	Satuan	Tercapai Capaian Tiga Tahun					Kondisi Kinerja Pada		Program Prioritas	SKPD terkait	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	Awal Periode RPJMD			Akhir Periode RPJMD
4. Perumahan												
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	66,92%	68%	69%	70%	72%	74%	76%	Program Lingkungan Sehat	DCKTRKESDM	
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	%	93,62%	94,00%	94,36%	94,67%	95,03%	95,38%	95,74%	Program Lingkungan Sehat	DCKTRKESDM	
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	45,29%	46%	47%	48%	50%	52%	55%	Program Lingkungan Sehat	DCKTRKESDM	
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0,55%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	Program Lingkungan Sehat	DCKTRKESDM	
4.5	Rumah layak huni	%	57,06%	76%	82%	65%	70%	75%	80%	Program Lingkungan Sehat	DCKTRKESDM	
5. Penataan Ruang												
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-KBL/HGB	%	2,72	3,81	5,33	7,46	10,45	14,63	20,48	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
5.2	Kecamatan terhadap RTRW	%	95	95	100	100	100	100	100	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
5.3	Luas wilayah produktif	%	79,85	79,85	79,85	84,74	86,43	88,16	89,92	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
5.4	Luas wilayah industri	%	1,48	1,49	1,51	1,57	1,60	1,63	1,67	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
5.5	Luas wilayah pertanian	%	0,11	0,1	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
5.6	Luas wilayah perkotaan	%	19,22	19,22	19	18,09	17,73	17,37	17,03	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
5.7	Luas wilayah perkotaan	%	14,38	14,38	14,38	15,26	15,57	15,88	16,19	Program Perencanaan Tata Ruang	DCKTRKESDM	
6. Perencanaan Pembangunan												
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditandatangani dengan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	
6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan DPRD/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	
6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan DPRD/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	
6.4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RPJPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	
7. Perhubungan												
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	15.057.360	10.540.112	10.442.376	9.398.139	8.458.326	7.612.494	6.851.245	Program Pengembangan dan Peningkatan Jalan	DINHUBKOMINFO	
7.2	Rasio ljin trayak	%	65	62	60	57	55	53	50	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian kendaraan bermotor	DINHUBKOMINFO	
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	610	612	614	616	618	620	622	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian kendaraan bermotor	DINHUBKOMINFO	
7.4	A. Pelabuhan Laut	buah	1	1	1	1	1	1	1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	DINHUBKOMINFO	
	B. Pelabuhan Lokal	buah	6	6	6	6	6	6	6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	DINHUBKOMINFO	
7.5	2. Terbang	buah	1	1	1	1	1	1	1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	DINHUBKOMINFO	
	A. Type B	buah	8	9	9	9	9	10	10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	DINHUBKOMINFO	
	B. Type C	buah	74	72	70	66	66	61	60	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DINHUBKOMINFO	
7.6	Angkutan darat	buah	622	622	622	612	611	609	610	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian kendaraan bermotor	DINHUBKOMINFO	
7.7	Kepemilikan KIR angkutan umum	buah									DINHUBKOMINFO	

Tabel 9.1
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2012	Target Capaian Tahun 2012-2017					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2017	Program Prioritas	SKPD terkait
				2012	2013	2014	2015	2016	2017		
7.8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	satuan menit	64 menit	65 menit	65 menit	65 menit	65 menit	65 menit	65 menit	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan bermotor	DINHUBKOMINFO
7.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	30,999	31.000	31.000	34.000	31.000	31.000	31.000	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan bermotor	DINHUBKOMINFO
8. Lingkungan Hidup											
8.1	Persentase penanganan sampah	%	48,70	4,19	51,84	62,38	67,74	73,57	79,89	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DCXTRKESDM
8.2	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit)	Unit	74	94	104	114	124	134	144	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DCXTRKESDM
8.3	Jumlah daya tampung TPS (m³)	M3	129,92	132,52	135,17	137,87	140,63	143,44	146,31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DCXTRKESDM
8.4	Rasio TPS per penduduk	%	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DCXTRKESDM

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017							
9.	Pertanian														
9.1.	Persentase pemohon sertifikat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penataan Pengusahaan, Penilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	SETDA	
9.3.	Ponea (Program Nasional)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penataan Pengusahaan, Penilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	SETDA	
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil														
10.1	Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun	buah	89.508	15.961	36.643	14.285	14.723	15.868	15.868	15.868	15.868	15.868	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0.81	0.87	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.3	Rasio bayi ber-akta Kelahiran	%	45	0.35	0.77	0.79	0.81	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.4	Rasio pasangan berakta menikah	%	0.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.5	Rasio Akta Kematian	%	38%	0.48	0.60	0.65	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.6	Kepemilikan KTP	%	81%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.7	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	601	385	362	392	422	452	452	452	452	452	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.8	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
10.9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Program Penataan Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL	
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1.93%	1.85%	1.94%	1.94%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.93%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	BPPKB	
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	189.061	192.793	192.914	194.216	195.526	196.845	196.845	196.845	196.845	189.061	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	BPPKB	
11.3	Rasio KDRT	%	0.01%	0.00%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.01%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Program Keserasian Kebiasaan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	BPPKB	
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	192.793	192.793	196.577	197.933	199.299	200.674	200.674	200.674	200.674	192.793	Program Keserasian Kebiasaan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	BPPKB	
11.6	Penyelesaian pengadilan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.17	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	46%	46%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.18	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tataaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	46%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.19	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	0%	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tiga Tahun 2015					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
11.20	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan masyarakat	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.21	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	46%	74%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.22	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.23	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
11.24	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BPPKB	
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																			
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Keluarga	0,2522	0,2530	0,2560	0,2568	0,2504	0,2500	0,2496	0,2496	0,2496	0,2496	0,2496	0,2496	0,2496	0,2497	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.2	Rasio akseptor KB	%	80,34%	83%	80,07%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	8178%	Program Pelayanan Kontrasepsi	BPPKB	
12.3	Cakupan peserta KB aktif	Orang	125.964	133.942	131.296	134.445	137.272	140.099	142.926	142.926	142.926	142.926	142.926	142.926	142.926	142.926	Program Pelayanan Kontrasepsi	BPPKB	
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Orang	128.023	127.848	127.178	123.920	122.552	121.184	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.5	Rata-rata jumlah IJWA per kepala keluarga	Orang	3.51	3.49	3.48	3.39	3.36	3.32	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.6	Cakupan Pasangan Usia Subur(PUS) yang terdapat di bawah 20 tahun	%	2.65%	2.65%	3%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.7	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	83.8%	83.8%	80.1%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak memenuhi (jumlah desa)	%	8.50%	8.50%	13.11%	6.5%	5.5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79%	79%	80.3%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	77.0%	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	BPPKB	
12.10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	82.8%	82.8%	86.3%	83.0%	84.0%	86.0%	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	87.0%	Program Keluarga Berencana	BPPKB	
12.11	Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan	%	0.31%	0.31%	0.35%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	100.0%	Program Penyisipan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	BPPKB	
12.13	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	%	102%	102%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyisipan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	BPPKB	
12.14	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	0%	0%	0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	Program Pelayanan Kontrasepsi	BPPKB	
12.15	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling-KBB	BPPKB	
13. Sosial																			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	9	9	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	DINSOS	
13.2.	PKKS yg memperoleh bantuan sosial	Orang	25%	25%	30%	30%	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINSOS	

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Sasaran	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tahun 2015					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kekehidupan sosial	Orang	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Program Pemberdayaan Fakir	DINSOS
13.4	Jumlah penyandang masalah kekehidupan sosial (PKKS)(Jiwa)	Orang	22,025	21,695	21,049	20,733	20,463	20,217	20,217	20,217	20,217	20,217	20,217	20,217	Program Pemberdayaan Fakir	DINSOS
14. Ketenagakerjaan																
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja (Jiwa)	Orang	70.39	70.39	73.4	76.41	79.43	82.46	85.46	85.46	85.46	85.46	85.46	85.46	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
14.2	Angka sangketa pengusaha-pekerja per tahun	Buah	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	%	70.39	70.39	73.4	76.41	79.43	82.46	85.46	85.46	85.46	85.46	85.46	85.46	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Program Peningkatan Kesamuderaan Kerja	DISNAKERTRANS
14.5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	6.5	6.59	7.64	7.81	8.36	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
14.6	Keselamatan dan perlindungan	Orang	20%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																
15.1	Persentase koperasi aktif	%	234 (77%)	70%	70.99%	71%	72%	73%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	Program Peningkatan Kualitas Kalambeadan Komral	DISYANKOP
15.2	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	100,912	101,120	101,335	101,120	101,310	101,415	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	Program Peningkatan Idim Usaha Kecil Menengah Yang Konusif	DISYANKOP
16. Penanaman Modal																
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMNA)	Unit	29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	KPM-PPT
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMNA)	Unit	624.51	2,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	KPM-PPT
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja (kenalkan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	392	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	KPM-PPT
16.4	Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMNA) (milyar)	Rp	1,198.05	2,688	6,818.8	6,935.3	7,068.1	7,207.6	5,354.1	5,354.1	5,354.1	5,354.1	5,354.1	5,354.1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	KPM-PPT
16.1	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	Unit	626	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMPT
16.2	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	2,520	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMPT
16.3	Jumlah realisasi nilai investasi	Unit	132	114	120.52	126.54	132.87	139.52	146.49	146.49	146.49	146.49	146.49	146.49	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMPT
16.4	Jumlah (Jin usaha yang diterbitkan	Buah	2,820	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	BPMPT
17. Kebudayaan																
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	DISBUDPAR
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	DISBUDPAR
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	307	309	310	312	314	317	320	320	320	320	320	320	Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	DISBUDPAR

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Betang Tahun 2013-2017

NO	SIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD				Target Capaian Tiao Tahun 2015				Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
18. Kepemudaan dan Olahraga																
18.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Buah	10	11	11	14	14	15	15	15	15	15	15	Program Peningkatan Peran Serta Keakademian	DISDIKORA	
18.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Buah	25	27	30	34	38	38	40	40	40	40	40	Program Pembinaan dan Penguatan Olahraga	DISDIKORA	
18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Buah	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	Program Peningkatan Peran Serta Keakademian	DISDIKORA	
18.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	Buah	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	Program Pembinaan dan Penguatan Olahraga	DISDIKORA	
18.5	Jumlah Gelanggang Remaja/Balai Remaja (Selain milik Swasta)	Buah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Program Peningkatan Peran Serta Keakademian	DISDIKORA	
18.6	Jumlah Lapangan Olahraga	Buah	3	6	8	10	12	15	16	20	20	20	20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISDIKORA	
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OGP	Kali	1	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	Program Kermitraan Wawasan Kebangsaan	KESBANGPOLIMA S	
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	Buah	9	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	KESBANGPOLIMA S	
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Persandian																
20.1	Jumlah Unmas per Jumlah 10.600 Penduduk	permil	10.005 : 10.000 = 1.004	10.005 : 10.000 = 1.005	10.036 : 10.000 = 1.036	10.067 : 10.000 = 1.067	10.098 : 10.000 = 1.098	10.129 : 10.000 = 1.029	10.160 : 10.000 = 1.060	10.190 : 10.000 = 1.090	10.221 : 10.000 = 1.021	10.252 : 10.000 = 1.052	10.283 : 10.000 = 1.083	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertarikan dan keakademian	Satpol PP	
20.2	Permas	Buah	Kampung : 1.534	Kampung : 1.534	Kampung : 1.554 : 248 = 6.26	1.574 : 248 = 6.34	1.604 : 248 = 6.46	1.624 : 248 = 6.54	1.654 : 248 = 6.66	Kampung : 654	1.684 : 248 = 6.78	1.714 : 248 = 6.90	1.744 : 248 = 7.02	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertarikan dan keakademian	Satpol PP	
20.3	Jumlah Demo	Kali	7	7	10	5	6	8	7	7	7	7	7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertarikan dan keakademian	Satpol PP	
21. Ketahanan Pangan																
21.1. Ketahanan pangan utama																
21.1.1	- Padi	Kg	211.953	211.953	210.876	180.146	181.046	181.951	182.860	183.769	184.678	185.587	186.496	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	DISTANAK	
		Kg	22.374	22.374	30.067	43.336	43.769	44.202	44.635	45.068	45.501	45.934	46.367	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)		
21.1.2	- Jagung	Kg	6.358.743	6.358.743	6.534.856	9.650.000	9.700.000	9.750.000	9.800.000	9.850.000	9.900.000	9.950.000	10.000.000	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
		Kg	2.155.202	2.155.202	2.230.866	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)		
21.1.3	- Susu (liter)	Liter	127.983	127.983	140.729	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
		%	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100	100	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)		
21.1.4	Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	%	82	82	80	88	90	90	100	100	100	100	100	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.5	Cadangan Pangan Daerah		4	4	7	40	60	80	100	100	100	100	100	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.6	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Kal	2.271	2.271	7.042	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.7	- Energi per kapita													Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.8	- Protein per kapita		262	262	195	57	57	57	57	57	57	57	57	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.9	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah		83	83	83	88	90	90	100	100	100	100	100	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.10	Penguatan cadangan pangan		4	4	7	40	60	80	100	100	100	100	100	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	
21.1.11	Stabilitas harga dan pasokan pangan		82	82	80	88	90	90	100	100	100	100	100	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/keakademian)	BPPKP	

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan Kali	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tita Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
21.9	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Kali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program peningkatan ketahanan pangan (kecamatan/desa/kecamatan)	BPPKP	
21.10	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kali	47	50	55	60	70	85						Program peningkatan ketahanan pangan (kecamatan/desa/kecamatan)	BPPKP	
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berbasis Desa	BAPERMADES	
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68.00%	Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa	BAPERMADES	
22.3	Jumlah LSM		23	86	100	105	110	115					115		KANTOR KESANGPOL BAPERMADES	
22.4	LPM Berprestasi		-											Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berbasis Desa	BAPERMADES	
22.5	PKK Aktif	%	95%	95%	96%	97%	98%	100%					100%	Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa	BAPERMADES	
22.6	Posyandu Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%	Program Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa	BAPERMADES	
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	2%	4%	6%	8%	9%	10%					10%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berbasis Desa	BAPERMADES	
23. Statistik																
23.1	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BAPPEDA	
23.2	Buku "PORR kabupaten"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	BAPPEDA	
24. Kearifan																
24.1	Pengelolaan arsip secara baku		37.3	55	59.8	67.3	74.8	82.3					82.3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	KEARSIPAN	
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		3	3.3	3.99	4.38	4.8	5.28					5.28	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	KEARSIPAN	

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batake Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tiga Tahun 2018					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Program Prioritas	SKPD terkait	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018								
25. Komunikasi dan Informatika																	
25.1	Jumlah jaringan komunikasi	Buah	20	25	30	35	40	45	50	50	50	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.2	Web site milik pemerintah daerah	Buah	1	10	20	30	40	30	66	66	66	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.3	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk		10	10	10	10	10	10	50	50	50	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.4	Jumlah surat kabar nasional/lokal		12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.5	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi		12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.6	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.7	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti koran, majalah, brosur, spanduk dan lain-lain	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.8	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti koran, majalah, brosur, spanduk dan lain-lain	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.9	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti koran, majalah, brosur, spanduk dan lain-lain	kali	12 X 15	12 X 15	12 X 15	12 X 15	12 X 15	12 X 15	12 X 15	12 X 15	12 X 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.10	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan lain-lain	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.11	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Disseminasi				
25.12	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	6	6	12	12	12	12	12	12	12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Bag. Humas & Protokol				
26.13	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	4	4	4	5	5	5	5	5	5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Bag. Humas & Protokol				
26. Perencanaan																	
26.1	Jumlah perpustakaan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN				
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	85.501	114.578	205.302	98.977	103.926	109.122	114.578	114.578	114.578	Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN				
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	44.921	45.375	49.713	47.375	48.375	49.375	50.375	50.375	50.375	Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN				
Fokus Layanan Urusan Pribadi																	
1. Pertanian																	
1.1	Produktivitas padi sawah (Ton/ha)	Ton/ha	4.31	5.553	5.605	4.576	4.586	4.59	4.594	4.594	4.594	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan	DISTANAK				
	Produksi Padi (Ton)	Ton	187.556.9	245.126	248.660	180.146	181.046	181.951	182.860	182.860	182.860	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan	DISTANAK				
1.2	Produktivitas jagung (Ton/ha)	Ton/ha	6.24	5.065	5.11	6.27	6.276	6.282	6.288	6.288	6.288	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan	DISTANAK				
1.3	Produksi jagung (Ton)	Ton	51.521.0	44.942	45.566	43.336	43.769	44.208	44.648	44.648	44.648	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Peternakan	DISTANAK				
1.4	Jumlah Kelompok Tani Binaan	Unit	852	910	968	1026	1084	1142	1200	1200	1200	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DISTANAK				

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan %	Target Capaian Tita Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017						
1.5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PORB ADHB (%)	%	30.44	30.75	30.6	30.68	30.76	30.83	30.83	Program peningkatan produksi pertanian/ perikanan				DISTANAK
1.6	Kontribusi sektor pertanian (peternakan)	%	19.22	19.41	19.32	19.36	19.41	19.46	19.46	Program peningkatan produksi pertanian/ perikanan				DISTANAK
1.7	Kontribusi sektor pertanian (peternakan)	%	15.70	15.78	15.78	15.82	15.86	15.90	15.90	Program peningkatan produksi pertanian/ perikanan				DISTANAK
1.8	Populasi Hewan Ternak	Ekor	65	65	80	65	65	65	65	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Sapi perah	Ekor	23.150	23.450	18000	32620	35230	38048	38048	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Kerbau	Ekor	3.460	3.570	1500	3714	3769	3864	3864	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Kambing	Ekor	78.200	78.900	78900	82088	83729	85404	85404	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Domba	Ekor	39.500	40.200	33000	41824	42661	43514	43514	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Ayam buras	Ekor	701.600	709.300	650900	737956	752715	767769	767769	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Ayam ras	Ekor	3.686.250	3.455.952	9455952	3925487	4067509	4209632	4209632	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Itik	Ekor	147.433	150.381	1.20361	156457	159586	162778	162778	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
1.9	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	%	43	47	52	57	63	69	69	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
1.10	Ketersediaan Lahan Ternak (ha)	Ha	78.70	80.28	81.88	83.52	85.18	86.89	86.89	Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
1.11	Penyakit ternak yang tertangani :									Program peningkatan produksi hasil pertanian				DISTANAK
	- Jumlah ternak yang disuntik	Ekor	600	625	700	725	750	775	775					
	- Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)	%	17.34	18.91	2.93	2.97	3.01	3.05	3.05					
2.	Kehutanan													
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	16.00	14.00	12.00	10.00	8.00	8.00	8.00	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				Dishutbun
2.2.	Merusakkan Kawasan Hutan	%	24.00	21.00	18.00	15.00	12.00	12.00	12.00	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				Dishutbun
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral													
3.1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PORB	%	1.11	1.11	1.11	1.5	1.15	1.2	1.2	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				Bappeda
4.	Pariwisata													
4.1.	Tingkat Kunjungan Hotel	Orang	31.000	31.700	32.000	32.500	33.000	33.500	33.500	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				DISBUDPAR
4.2.	Obyek Wisata yang dilayani	Unit	5	5	5	5	5	5	5	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				DISBUDPAR
4.3.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PORB ADHB (%)	%	750 juta	750 juta	800 juta	850 juta	900 juta	1 milyar	1 milyar	Program pengembangan sarana pariwisata				DISBUDPAR

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017

NO	BIDANG URUBAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD				Tetapan Capaian Ilap Tahun				Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Program Prioritas	SKPD terkait
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017		
5.	Kelautan dan Perikanan													
5.1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	Ton	28.197.382	30.949.225	32.806.178	34.774.549	36.861.022	39.072.684	39.072.684	39.072.684	39.072.684	39.072.684	Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dilakukan
5.2	Produksi perikanan Budidaya (ton)	Ton	1.440.30	1.800.40	2.250.50	2.700.60	3.240.72	3.888.86	3.888.86	3.888.86	3.888.86	3.888.86	Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Dilakukan
5.3	Cakupan bina kelompok Pengawas (orang)	Orang	210	240	270	300	330	360	360	360	360	360	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan Perikanan	Dilakukan
5.4	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th.)	Kg/Kapita/Thn	13.7	14	27	30	33	35	35	35	35	35	Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Dilakukan
5.5	Tingkat Pengelolaan Konservasi		Didirikan	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola Optimum	Dikelola Optimum	Dikelola Optimum	Dikelola Optimum	Dikelola Optimum	Prog. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dilakukan
5.6	Cakupan bina kelompok Tangkap (kelompok)	5	39	49	59	61	63	65	65	65	65	65	Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dilakukan
5.7	Cakupan bina kelompok Budidaya (kelompok)	Kelompok	84	89	20	25	30	35	35	35	35	35	Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Dilakukan
5.8	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Pekahsar)	Kelompok	20	25	30	35	40	45	45	45	45	45	Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masy. Kelautan dan Perikanan ; Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Dilakukan
6.	Perdagangan													
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB%)	%	16.19%	16.19%	15.99%	16.00%	16.09%	16.12%	16.12%	16.12%	16.12%	16.12%	Prog. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	DISPBRINDAGKO P
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHBK%)	%	17.14%	16.65%	16.49%	16.61%	16.66%	16.71%	16.71%	16.71%	16.71%	16.71%	Prog. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	DISPBRINDAGKO P
6.2.	Bispor Bersih Perdagangan	\$	\$48.175.517,70	\$48.175.517,70	\$54.093.069,47	\$54.182.287,35	\$65.452.614,02	\$71.997.875,47	\$71.997.875,47	\$71.997.875,47	\$71.997.875,47	\$71.997.875,47	Prog. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	DISPBRINDAGKO P
7.	Perindustrian													
7.1	Pertumbuhan Industri.	Unit	10.404	10.488	10.573	10.660	10.755	10.851	10.851	10.851	10.851	10.851	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	DISPBRINDAGKO P
7.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	210	215	232	232	237	237	237	237	237	237	Program Penataan struktur Industri	DISPBRINDAGKO P
7.3	Jumlah IKM (unit)	Unit	10.516	10.425	10.516	10.642	10.733	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	DISPBRINDAGKO P
7.4	Jumlah Unit usaha sentra industri (Unit)	Unit	212	216	215	230	240	255	255	255	255	255	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	DISPBRINDAGKO P
7.4	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	%	25.61%	26.02%	25.60%	25.75%	26.00%	26.05%	26.05%	26.05%	26.05%	26.05%	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	DISPBRINDAGKO P
7.6	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	%	27.62%	27.53%	27.16%	27.23%	27.30%	27.50%	27.50%	27.50%	27.50%	27.50%	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	DISPBRINDAGKO P
8.	Ketransmigrasian													
8.1.	Kontribusi transmigrasi terhadap PORB	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Program Pengembangan kawasan kemitirasi	
ASPEK DAYA SANGAT DAERAH														
Forum Koordinasi Regional Daerah														
1.	Partisipasi													
2.1.	Nilai tukar petani		100	101.82	105.59	109.5	113.55	117.75	117.75	117.75	117.75	117.75	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Perikanan

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bawang Tahun 2012-2017

NO	SIDANG USUBAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD					Target Capaian Tiga Tahun 2015			Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Program Prioritas	SKPD terkait	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017					
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur															
1. Perhubungan															
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (jumlah kendaraan)	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Program Pengendalian dan Pemertan Jalan Lintas	DINHUBKOMINFO	
1.2	Jumlah orang terangkut angkutan umum	Orang	15.057.360	10.540.112	10.442.376	9.398.139	8.458.326	7.612.494	6.851.245	6.851.245	6.851.245	6.851.245	Program Pengendalian dan Pemertan Jalan Lintas	DINHUBKOMINFO	
1.3	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	15.057.360	10.540.112	10.442.376	10.298.734	10.103.542	10.100.310	10.100.310	10.100.310	10.100.310	10.100.310	Program Pengendalian dan Pemertan Jalan Lintas	DINHUBKOMINFO	
1.4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	15.057.360	10.540.112	10.442.376	10.298.734	10.103.542	10.100.310	10.100.310	10.100.310	10.100.310	10.100.310	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas perhubungan	DINHUBKOMINFO	
1.5	Rasio jin trayek	Unit	65	62	60	60	60	59	59	59	59	59	Program Pengendalian dan Pemertan Jalan Lintas	DINHUBKOMINFO	
1.6	Jumlah uji kir angkutan umum	Buah	610	612	614	616	618	620	622	622	622	622	Program Pengendalian dan Pemertan Jalan Lintas	DINHUBKOMINFO	
1.7	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis												Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas perhubungan	DINHUBKOMINFO	
1. Pelabuhan															
A. Pelabuhan Laut															
a. Pelabuhan Lokal															
2. Terminal															
A. Tipe A															
a. Tipe B															
b. Tipe C															
1.8 Angkutan darat															
Kepemilikan KIR angkutan umum															
Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR															
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum															
Penataan Ruang															
2.1. Kecepatan terhadap RTRW															
2.2. Luas wilayah produktif															
2.3. Luas wilayah Industri															
2.4. Luas wilayah kebencanaan															
2.5. Luas wilayah kesehatan															
2.6. Luas wilayah perkotaan															
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kespasialan dan Persandian															
3.1. Jumlah bank dan cabang															
3.2. Jumlah perusahaan asuransi dan cabang															
3.3. Jenis, kelas, dan jumlah restoran															
3.4. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel															
Fokus Sumber Daya Manusia															
1. Ketenagakerjaan															
1.1 Rasio lulusan SI/S2/S3															

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2012-2017 merupakan revisi dokumen RPJMD sebelumnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025. RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Bupati Batang Tahun 2012-2017 serta merupakan perencanaan yang berkesinambungan dari RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta mengingat waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2017 untuk menyusun RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, maka RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Sehubungan

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**

dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Batang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan melakukan akselerasi pencapaian target sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
2. Bupati Batang, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 pada setiap tahunnya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Batang serta menjamin konsistensinya.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 ke dalam Renstra SKPD Kabupaten Batang.
6. Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah secara spasial.
7. Evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 akan dilakukan pada setiap tahunnya dengan mengacu pada indikator kinerja makro (misi-urusan) dan mikro (urusan-program).

PERUBAHAN

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017**